

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Eko Murdiyanto

Sosiologi Perdesaan/ Eko Murdiyanto

-Edisi I – Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta 2008.

264 hlm: 21 cm

ISBN: 978-979-8918-88-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh:

Wimaya Press

UPN “Veteran” Yogyakarta

Edisi pertama : Desember 2008

Alamat Penerbit:

Badan Usaha Universitas (BUU)

Jl SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur Yogyakarta. 55283

Telp/Fac: (0274) 489027

ISBN : 978-979-8918-88-9

**K**ajian sosiologi perdesaan yang berfokus pada memahami memahami karakter masyarakat sebagai suatu komunitas Yang utuh semakin pesat perkembangannya. Hal ini seiring dengan kondisi masyarakat di perdesaan yang senantiasa berubah sejak revolusi industri bergulir di Eropa dan membawa konsekuensi perubahan dalam masyarakat yang cenderung cepat. Perubahan ini mendorong munculnya mobilitas penduduk di seluruh dunia.

Sejalan dengan itu perubahan pola dalam mobilitas penduduk membawa implikasi bagi perkembangan masyarakat secara luas. Akibat yang kemudian muncul bagi daerah perdesaan, adalah perubahan baik secara fisik maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu proses mobilitas penduduk atau migrasi harus senantiasa dipandang sebagai proses alami, sehingga perubahan dalam masyarakat yang ditimbulkannya dapat diantisipasi.

Dengan memahami perubahan dalam masyarakat di perdesaan diharapkan program pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik dapat dilakukan dengan smart. Buku ini mencoba memberikan wacana bagaimana memahami karakter masyarakat di perdesaan sebagai suatu komunitas secara utuh, yaitu suatu pemahaman yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk memahami kondisi masyarakat di perdesaan dalam rangka pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik dengan tidak meninggalkan masa lalu dan memperbaiki masa depan.



**Eko Murdiyanto**, Lahir di Yogyakarta, 6 Maret 1970 Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta. Memperoleh gelar SP dari Sosek Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta (1995); gelar M.Si. dalam Sosiologi Perdesaan dari IPB Bogor (2001). Aktif meneliti dan menulis tentang Sosiologi Perdesaan dan Pertanian, Studi Gender, Migrasi, Industri Kecil, Agroforestry, Monitoring dan Evaluasi, Perubahan Sosial, Komunikasi dan informasi Pertanian, dan Kelembagaan

**ISBN**

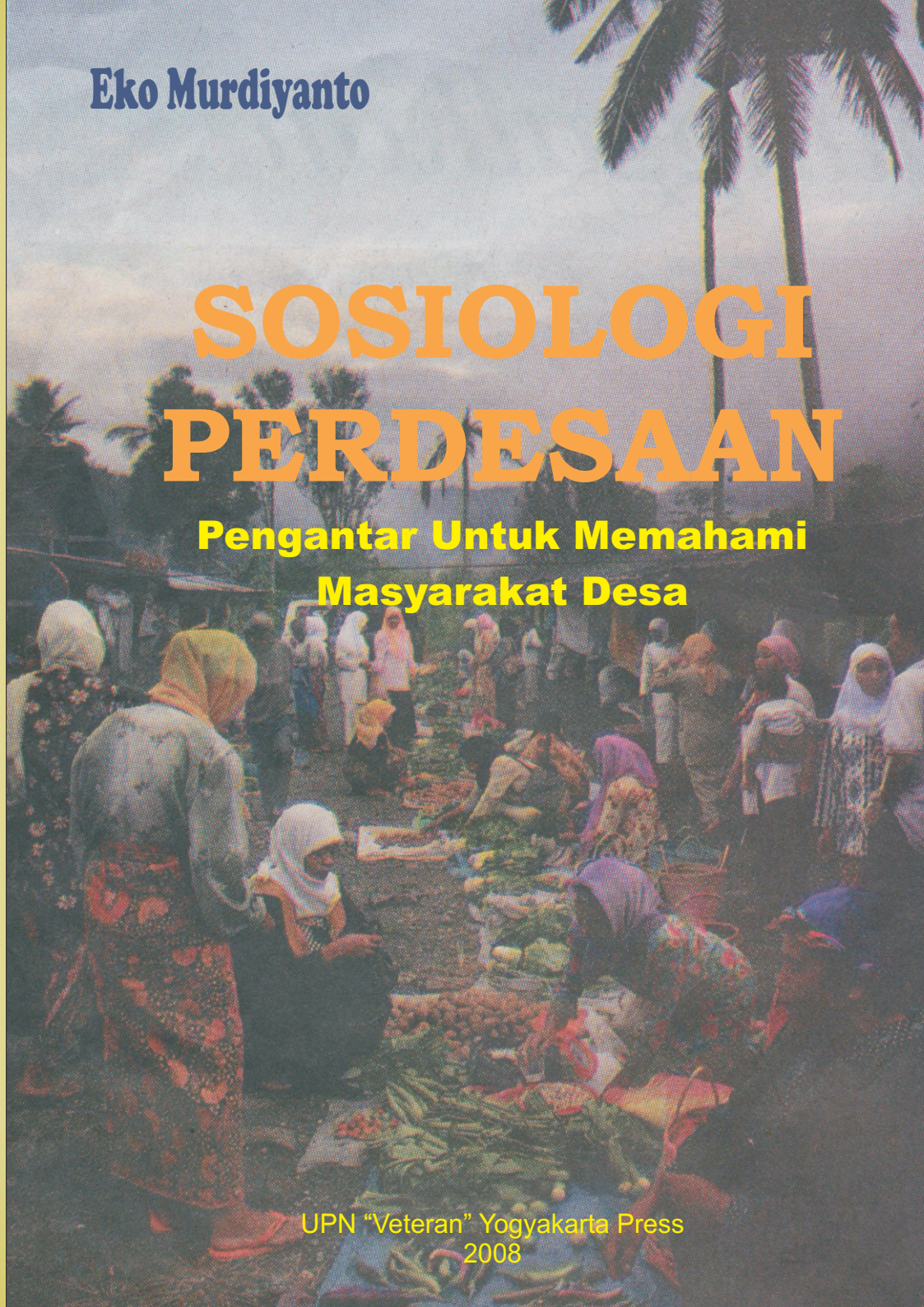
**Sosiologi Perdesaan**

**Eko Murdiyanto 2008**

**Eko Murdiyanto**

# **SOSIOLOGI PERDESAAN**

**Pengantar Untuk Memahami  
Masyarakat Desa**



**UPN "Veteran" Yogyakarta Press  
2008**

**Eko Murdiyanto**  
**Sosiologi Perdesaan,**  
**Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa**  
Yogyakarta : UPN “Veteran” Yogyakarta Press. 2008

VII + **218** hlm :  
**ISBN : 979-**

Hak cipta dilindungi undang- undang.  
*All right reserved.*

Diterbitkan oleh :  
UPN “Veteran” Yogyakarta Press

Edisi Pertama : *Agustus 2008*

Alamat Penerbit :  
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 486733

**ISBN : 979-**



# Sosiologi Perdesaan

Pengantar Untuk Memahami  
Masyarakat Desa

**Eko Murdiyanto**

*Yakin dan percayalah,  
Dihari-hari yang melelahkan, disitu ada keceriaan  
Di hari-hari yang panas menyakkan, yang diselingi  
dengan hujan lebat berhamburan , yang kadang-  
kadang diikuti petir mengelegar menyambar-  
nyambar, Di situ ada juga **BIDADARI***

Buat:  
Ayah dan ibuku, yang selalu memberikan curahan  
kasih dan sayang  
Istriku, Muflichah dan anak-anakku;  
Mufqi Rafif Darmawan dan Afrina Zahra  
Khoirunnisa yang senantiasa mengingatkan  
untuk *ati-ati*, hati-hati dalam hidup, dan  
selalu berjalan di jalan-Nya.

## **KATA PENGANTAR**

Sosiologi perdesaan sebagai suatu bagian dari sosiologi terapan semakin pesat perkembangannya dewasa ini. Hal ini dipicu dengan makin bertambahnya pemahaman bahwa sosiologi perdesaan diperlukan bagi perkembangan dan aplikasi ilmu lain kepada masyarakat luas, terutama masyarakat di perdesaan. Dengan kata lain memahami sosiologi perdesaan merupakan pembuka untuk menerapkan suatu ilmu kepada masyarakat.

Kajian sosiologi perdesaan berfokus pada memahami karakter masyarakat sebagai suatu komunitas yang utuh. Namun memahami karakter masyarakat di perdesaan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap desa secara fisik. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa budaya material dan immaterial memiliki hubungan dengan tipe desa secara fisik. Dengan memahami desa secara komprehensif akan menambah wawasan mengenai kondisi masyarakat di Indonesia masa lalu, masa kini dan gambaran yang terjadi di masa depan.

Kondisi masyarakat di perdesaan yang senantiasa berubah seperti gelombang lautan, dimulai semenjak revolusi industri bergulir di Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perubahan dunia yang begitu cepat juga menjadi penyebab munculnya migrasi manusia di seluruh dunia. Sejalan dengan perubahan pola dalam

migrasi manusia ternyata hal ini membawa pengaruh dan perubahan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Secara keseluruhan fenomena migrasi membawa implikasi bagi perkembangan masyarakat secara luas. Implikasi yang kemudian muncul terutama bagi daerah asal, dalam hal ini daerah perdesaan, adalah perubahan baik secara fisik maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu proses mobilitas penduduk atau migrasi harus senantiasa dipandang sebagai proses alami, sehingga perubahan dalam masyarakat yang ditimbulkannya dapat diantisipasi.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi kita yang akan memahami masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan, dalam rangka pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik.

Eko Murdiyanto, MSi

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Tabel</b>	vii
<b>Daftar Gambar</b>	viii
<b>Bab 1. Sosiologi dan Sosiologi Perdesaan .....</b>	<b>1</b>
• Sosiologi .....	1
• Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Perkembangan Ilmu Sosiologi .....	13
• Perkembangan teori Sosiologi .....	20
• Perkembangan sosiologi pada Abad pencerahan .....	24
• Sosiologi modern .....	26
• Metode-metode dalam Sosiologi ...	27
• Pokok bahasan sosiologi .....	30
• Sosiologi Perdesaan .....	31
• Latar Belakang Sosiologi Pedesaan	33
<b>Bab II. Karakteristik Dan Tipologi Desa .....</b>	<b>38</b>
• Pemahaman Desa .....	38
• Beberapa Konsep Mengenai Desa .	40
• Karakteristik Desa .....	42

• Desa-desa di Indonesia .....	50
• Tipologi Desa di Indonesia .....	53
• Pola Lokasi & Wilayah Desa .....	55
<b>Bab III. Masyarakat Dan Kebudayaan Agraris .....</b>	<b>65</b>
• Masyarakat .....	65
• Elemen-elemen dalam Masyarakat	67
• Kebudayaan .....	73
• Perkembangan kebudayaan .....	75
• Wujud Kebudayaan .....	78
• Pola-pola Kebudayaan .....	80
• Karakteristik Masyarakat Desa .....	81
• Konsep Pola Adaptif Ekologi .....	88
• Tipologi Masyarakat Agraris Menurut Pola Adaptasi Ekologi .....	92
<b>Bab IV. Aspek Sosial Desa .....</b>	<b>94</b>
• Proses Sosial & interaksi sosial .....	94
• Keluarga dan Sistem Kekerabatan .	113
• Kelembagaan Sosial .....	116
• Kelompok Sosial .....	122
• Grup Sosial .....	128
• Organisasi Sosial .....	131

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik–Birokrasi sebagai Sistem (Pemerintahan) ..... 134</li> <li>• Stratifikasi Sosial ..... 143</li> </ul>	
<b>Bab V.</b>	<b>Aspek Ekonomi Desa ..... 156</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resiprositas ..... 156</li> <li>• Redistribusi ..... 164</li> <li>• Subsistensi ..... 165</li> <li>• Dana-dana yang harus dikeluarkan petani ..... 166</li> </ul>	
<b>Bab VI.</b>	<b>Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Desa ..... 172</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Modernisasi ... 172</li> <li>• Perubahan &amp; Bentuk Perubahan .. 183</li> <li>• Modernisasi Hubungan-hubungan Sosial ..... 189</li> </ul>	
<b>Bab VII.</b>	<b>Mobilitas Dan Proses Perubahan Masyarakat Desa ..... 199</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas (Gerak) Penduduk ..... 199</li> <li>• Migrasi, pembangunan dan perubahan ..... 204</li> <li>• Prinsip Resiprositas pada Masyarakat Agraris yang Sedang</li> </ul>	

Berubah .....	208
<i>a. Sambatan</i> .....	213
<i>b. Gugur gunung</i> .....	213
<i>c. Nyumbang</i> .....	215
<i>d. Selamatan</i> .....	217

## Daftar Pustaka

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Perspektif Fungsionalis dan Konflik .....	9
Tabel 2.	Kajian berdasarkan perspektif sosiologis .....	11
Tabel 3.	Karakteristik masyarakat Desa dan Kota Menurut Roucek & Warren ...	43
Tabel 4.	Karakteristik masyarakat Desa dan Kota Menurut Horton & Hunt .....	44
Tabel 5.	Karakteristik Desa dan Kota menurut Sorokin dan Zimmerman	46
Tabel 6.	Nama-nama kesatuan masyarakat hukum setingkat desa di Indonesia	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pola Desa Melingkar di Bali sebelum era Modernisasi .....	56
Gambar 2.	Pola Lokasi Desa di Nusa Tenggara .....	57
Gambar 3.	Pola Lokasi Desa Transmigrasi di Desa Bugel Kabupaten Kulon Progo .....	58
Gambar 4.	Pola Lokasi Desa Konsentris .....	59
Gambar 5.	Pola Lokasi desa di Padang (Sumatera Barat) yang berpusat di Surau (masjid) .....	60
Gambar 6.	Pasar Lima di Banjarmasin yang terletak Sejajar Sungai Mahakam	61



# Bab I

## Sosiologi dan Sosiologi Perdesaan

Sosiologi perdesaan sebagai suatu bagian dari sosiologi terapan semakin pesat perkembangannya dewasa ini. Hal ini dipicu dengan makin bertambahnya pemahaman bahwa sosiologi diperlukan bagi perkembangan dan aplikasi ilmu yang lain kepada masyarakat luas. Dengan kata lain sosiologi perdesaan merupakan pembuka untuk diterapkannya suatu ilmu kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan pemahaman mengenai Konseptualisasi sosiologi dan sosiologi Perdesaan.

### Sosiologi

Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sebagai cabang Ilmu Sosial, sosiologi mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, August Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Namun demikian, Émile Durkheim (Perancis) orang pertama yang berhasil melembagakan Sosiologi sebagai disiplin akademis. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan

kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Sosiologi berasal dari bahasa latin *Socius* yang berarti teman, bersama-sama dan *Logos* yang berarti omongan. Maka secara umum pengertian sosiologi diartikan sebagai tentang masyarakat (omongan tentang teman, tentang kebersamaan). Sosiologi lahir ketika Auguste Comte, menerbitkan buku "*Cours De Philosophie Positive*" (1838) dan lebih dipopulerkan oleh Herbert Spencer yang menerbitkan buku *Principles of Sociology* (1876). Dalam buku itu, Comte menyebutkan ada tiga tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya, yaitu:

1. Tahap teologis; adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia.
2. Tahap metafisis; pada tahap ini manusia menganggap bahwa didalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam.
3. Tahap positif; adalah tahap dimana manusia mulai berpikir secara ilmiah.

Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sosiologi dinamis memusatkan

perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan.

Sosiologi muncul sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir kemudian di Eropa. Untuk memahami bahwa sosiologi tidak hanya sekedar sebagai ilmu tentang masyarakat diperlukan beberapa batasan dari sejumlah ahli sosiologi, diantaranya:

1. Pitirin Sorokin (1928), sosiologi mempelajari gejala sosial budaya dari sudut umum, sifat esensi gejala tersebut serta hubungan antar gejala tersebut yang amat banyak. Secara lebih jelas Pitirin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial serta ciri-ciri umum semua gejala-gejala sosial.
2. FF Cuber (1951), sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antar manusia.
3. RM Mc Iver & CH Page (1955), sosiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan sosial dan dengan seluruh jaringan hubungan itu disebut masyarakat.
4. Roucek & Warren (1962), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
5. William F Ogburn dan Mayer F Nimkoff (1964), Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

6. JAA Van Dorn dan CJ Lammers (1964) , sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
7. Max Weber, Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
8. Selo Soemardjan & Soeleman Soemardi (1964), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.
9. ER Babbie (1983), sosiologi adalah telaah kehidupan sosial, mulai dari interaksi sampai hubungan global antar bangsa.
10. Paul B. Horton, Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
11. Soejono Soekanto, Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
12. Allan Jhonson, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut apabila dicari kesamaannya maka dapat dirumuskan secara umum bahwa :

**Sosiologi** adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Atau

**Sosiologi** adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum

Sosiologi mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat (*community, society*) dalam berbagai aspeknya. Oleh karena itu terdapat beberapa perspektif dalam memandang suatu masyarakat. Suatu masyarakat dipandang oleh perspektif tersebut dari sudut pandang yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang berbeda dan mencapai kesimpulan yang berbeda.

Dalam sosiologi terdapat beberapa perspektif, diantaranya perspektif evolusionis, interaksionis, fungsionalis, teori konflik, teori sumber, teori sistem, teori pertukaran, fenomenologi, metodologi etnis dan lainnya. Disini akan dikemukakan perspektif dalam sosiologi menurut Horton & Hunt mengemukakan tentang 4 Perspektif atau pendekatan yang dipakai dalam sosiologi, yaitu:

1. Perspektif Evolusionis, yaitu perspektif teoritis yang paling awal dalam sejarah sosiologi yang didasarkan pada karya August Comte dan Herbert Spencer. Perspektif ini memberikan keterangan-keterangan yang memuaskan tentang bagaimana masyarakat berkembang dan tumbuh. Para sosiolog yang memakai

perspektif evolusioner untuk mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda, untuk mengetahui apakah ada urutan umum yang dapat ditemukan. Dalam suatu kasus kita mungkin akan menduga apakah ada kesamaan antara paham komunis yang terjadi di Rusia dengan yang terjadi di Cina, apakah perkembangannya sama untuk kedua negara tersebut yang memiliki kultur dasar berbeda. Dalam konteks inilah perspektif evolusionis melihat perubahan yang terjadi di kedua negara tersebut dalam rentang waktu yang lama dan berbeda di antara keduanya.

2. Perspektif Interaksionis, yang tidak menyarankan teori besar tentang masyarakat, karena istilah "masyarakat", "negara", "lembaga" adalah abstraksi konseptual saja, sedangkan yang ditelaah dalam perspektif ini adalah orang-orang dan interaksinya. Para ahli interaksi simbolik seperti GH Mead, CH Cooley memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Orang-orang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat dan yang paling penting dengan menggunakan kata-kata secara tertulis ataupun lisan. Suatu kata tidaklah memiliki makna yang melekat dalam kata itu sendiri, melainkan hanyalah suatu bunyi dan baru akan memiliki makna bila orang sependapat bahwa bunyi tersebut mengandung arti khusus. Para ahli perspektif interaksi modern seperti E Goffman dan H Blumer menekankan bahwa orang tidak menanggapi orang lain sesuai dengan "bagaimana mereka membayangkan orang itu". Dalam perilaku

manusia, kenyataan bukanlah sesuatu yang tampak saja, tetapi dibangun dalam pikiran orang-orang pada waktu mereka saling menilai dan menerka perasaan serta gerak hati satu sama lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua kenyataan adalah subyektif atau hanya ada dalam pikiran, tetapi juga fakta obyektif dalam alam semesta. Makna diberikan pada suatu fakta dan tindakan manusia oleh manusia. Perspektif interaksionis simbolis memusatkan perhatiannya pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti itu diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapinya.

3. Perspektif Fungsionalis, yang melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Para ahli fungsionalis seperti Talcot Parsons, Kingsley Davis dan Robert Merton berpendapat bahwa setiap kelompok atau lembaga akan melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus, karena hal itu fungsional. Namun suatu nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda.
4. Perspektif Konflik, yang secara luas didasarkan pada karya Karl Marx yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-

kekuatan dalam sejarah. Perspektif ini dikembangkan oleh C Wright Mills, Lewis Coser, Aron Dahrendorf dan Collins, yang melihat suatu masyarakat agak berbeda dengan pendapat para fungsionalis. Mereka melihat bahwa masyarakat sebagai terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Secara garis besar perbedaan perspektif fungsionalis dengan konflik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Perspektif Fungsionalis dan Konflik

<b>Persepsi tentang</b>	<b>Teori Fungsionalis</b>	<b>Teori Konflik</b>
Masyarakat	Suatu sistem yang stabil dari kelompok-kelompok yang bekerja sama	Suatu sistem yang tidak stabil dari kelompok dan kelas yang saling bertentangan
Kelas Sosial	Suatu tingkat status dari orang-orang yang memperoleh pendapatan dan memiliki gaya hidup yang serupa. Berkembang dari isi perasaan orang dan kelompok yang berbeda	Sekelompok orang yg memiliki kepentingan ekonomi dan kebutuhan kekuasaan yang serupa. Berkembang dari keberhasilan sebagian orang dlm mengeksploitasi orang lain.

Lanjutan Tabel 1.

Perbedaan Sosial	Tidak dapat dihindarkan dalam susunan masyarakat yang kompleks, terutama karena perbedaan kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda	Tidak perlu dan tidak adil, terutama disebabkan perbedaan dalam kekuasaan, dapat dihindari dengan jalan penyusunan kembali masyarakat secara sosialis
Perubahan Sosial	Timbul dari perubahan fungsional masyarakat yang terus berubah	Dipaksakan oleh suatu kelas thd kelas lain untuk kepentingan kelas pemaksa
Tata tertib sosial	Hasil usaha tidak sadar dari orang-orang untuk mengorganisasi kegiatan mereka secara produktif	Dihasilkan dan dipertahankan oleh pemaksa yang terorganisasi oleh kelas yang dominan
Nilai-nilai	Konsensus atas nilai-nilai yang mempersatukan masyarakat	Kepentingan yang bertentangan akan memecah belah masyarakat. Khayalan konsensus nilai-nilai dipertahankan oleh kelas yg dominan

Lanjutan Tabel 1.

Lembaga-lembaga sosial	Menanamkan nilai-nilai umum dan kesetiaan yang mempersatukan masyarakat	Menanamkan nilai-nilai kesetiaan yang melindungi golongan yang mendapat hak-hak istimewa
Hukum dan Pemerintahan	Menjalankan peraturan yang mencerminkan konsensus nilai-nilai masyarakat	Menjalankan peraturan yang dipaksakan oleh kelas yang dominan untuk melindungi hak-hak istimewa

Berdasarkan uraian diatas terlihat perbedaan yang jelas diantara keempat perspektif tersebut. Para evolusionis memusatkan perhatiannya pada kemiripan dalam masyarakat yang tengah berubah, interaksionis memusatkan perhatiannya pada perilaku perorangan dan kelompok yang sebenarnya, fungsionalis lebih memusatkan perhatiannya pada konsensus nilai dan teori konflik memusatkan perhatiannya pada perbedaan, ketegangan dan perubahan. Sebagai contoh munculnya suatu kasus dikeluarkannya prosedur kelulusan yang baru tanpa adanya diskusi dengan mahasiswa sebagai kelompok yang akan terkena kebijakan baru tersebut. Setelah beberapa hari mengeluh, kemarin sekelompok mahasiswa memasuki ruangan dekanat untuk melakukan aksi menolak perberlakuan kebijakan tersebut. Para mahasiswa menyegel semua kantor administrasi fakultas dan meminta

semua staf administrasi untuk libur. Polisi diminta datang untuk mengatasi

Kondisi tersebut oleh pihak kampus dan .....

Bagaimana mempelajari peristiwa sosial ini dari keempat perspektif? Secara singkat dapat digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kajian Berdasarkan Perspektif Sosiologis

Perspektif	Kajian
Evolusionis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana urutan terjadinya konfrontasi antara mahasiswa dengan dekanat?</li> <li>2. Pola yang sudah ada yang bagaimana, yang diikuti</li> <li>3. Bagaimanakah peristiwa tersebut merupakan produk dari situasi sebelumnya?</li> </ol>
Interaksionis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peraturan dibuat dan dirubah?</li> <li>2. Siapa yang mempunyai wewenang untuk mengubah peraturan, bagaimana caranya?</li> <li>3. Bagaimana "orang yang baik" dan "orang yang buruk" mendapat julukan?</li> <li>4. Bagaimana ketegangan yang terjadi dan peran apa yang dimainkan pada waktu semangat konfrontasi berkembang?</li> </ol>
Fungsionalis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan-alasan apakah yang mendorong perubahan kebijakan tersebut?</li> <li>2. Dengan perubahan kebijakan, tujuan apa yang bisa dicapai Fakultas dan mahasiswa?</li> <li>3. Dengan konfrontasi ini, tujuan apa yang bisa dicapai oleh aktivitas mahasiswa?</li> <li>4. Akibat-akibat apakah yang akan timbul dari konfrontasi tersebut?</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2

Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa masukan dari mahasiswa tidak diminta sebelum melakukan perubahan kebijakan ini?</li> <li>2. Siapakah yang akan mendapat keuntungan dan siapa yang dirugikan dengan perubahan kebijakan tersebut?</li> <li>3. Mengapa Fakultas menginginkan perubahan dan mengapa mahasiswa menentangnya?</li> </ol>
---------	---

Berdasarkan contoh diatas terlihat perbedaan penekanan dalam kajiannya, yaitu:

- 1) evolusionis pada perkembangan historis perbedaan kelas dalam masyarakat yang berbeda,
- 2) interaksionis menelaah bagaimana kelas masyarakat didefinisikan dan bagaimana orang memandang dan memperlakukan anggota dari kelas mereka dan kelas lainnya,
- 3) fungsionalis memperhatikan bagaimana perbedaan kelas berfungsi dalam sebuah masyarakat untuk membagikan tugas dan imbalan dan menjaga agar sistem terus berjalan, dan
- 4) teoritis konflik memusatkan perhatian pada bagaimana perbedaan kelas dipaksakan dan dipertahankan oleh kelas dominan untuk keuntungan pihaknya dan atas beban pihak yang kurang beruntung.

Secara umum perspektif yang berbeda tersebut saling melengkapi, karena yang satu melihat sesuatu yang mungkin diabaikan atau tidak dilihat perspektif yang lain. Semua perspektif tersebut digunakan dalam susunan yang berbeda. Perbedaan perspektif ini hanyalah dalam hal



penekanan atau titik fokus kajian. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa kebanyakan sosiolog akan menolak untuk diklasifikasikan dalam salah satu perspektif tersebut, hanya saja mereka mempunyai perspektif yang paling mereka senangi dan sangat mereka percayai. Semua perspektif bermanfaat dan diperlukan untuk pemahaman yang lengkap tentang masyarakat.

### **Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Perkembangan Ilmu Sosiologi**

#### **1. Auguste Comte (1798-1857)**

Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena yang pertama-tama memberi nama pada ilmu tersebut. Masyarakat harus diteliti atas dasar fakta-fakta obyektif. Comte tidak secara rinci menguraikan masalah-masalah yang menjadi obyek sosiologi, tetapi mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu *sosial statistics* (merupakan ilmu yang mempejari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan) dan *sosial dynamic* (meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa). Perkembangan tersebut melewati beberapa tahap sesuai dengan tahap perkembangan pikiran manusia, yaitu: tahap teologis (tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan oleh hal itu disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada diatas manusia), tahap metafisis (tahapan dimana manusia masih percaya bahwa gejala-gejala di dunai ini disebabkan oleh kekuatan yang berada diatas manusia), dan tahap positif (tahap diman

manusia telah sanggup berpikir secara ilmiah). Hasil karya Comte yang utama antara lain; *The Positive Philosophy* dan *Subjective Synthesis*.

#### **2. Herbert Spencer (1820-1903)**

Spencer menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Obyek sosiologi pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial dan industri. Sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara unsur-unsur masyarakat seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga, hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan. Unsur-unsur masyarakat tadi mempunyai hubungan yang tetap dan harmonis serta merupakan suatu integrasi. Hasil karya Spencer yang utama antara lain; *Principle of Psychology* dan *Principles of Ethics*.

#### **3. Emile Durkheim (1858-1917)**

Durkheim berpendapat bahwa sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Durkheim membagi sosiologi menjadi 7 seksi, yaitu; sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral, sosiologi tentang kejahatan, sosiologi ekonomi, demografi dan sosiologi estetika. Hasil karya Durkheim yang utama antara lain; *The Sosial division of Labor*, dan *The rules of Sociological method*.

#### **4. Max Weber (1864-1920)**

Max Weber memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial (terkenal dengan metode "pengertian" atau

*method of understanding*). Weber juga dikenal dengan teori *ideal typus*, yaitu suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa gejala-gejala dalam masyarakat. Ajaran sosiologinya menyumbang perkembangan menani analisis wewenang, birokrasi, sosiologi agama, dan organisasi-organisasi ekonomi. Hasil karya Weber yang utama antara lain; *The Economy and Society, The Theory of social and economic organization, dan Collected essays on Sociology and Social Problems*.

5. Charles Horton Cooley (1864-1929)

Cooley mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbal-balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat. Pada saat manusia berada dibawah dominasi kelompok utama (*primary group*) yaitu keluarga, kelompok permainan dan tetangga yang ditandai dengan saling kenal diantara mereka serta kerja sama pribadi yang erat adalah peleburan individu-individu dalam satu kelompok, sehingga tujuan individu menjadi tujuan kelompok. Hasil karya Cooley yang utama antara lain; *Human Nature and Social order, Social organization dan Social Process*.

6. Pierre Guillaurne Frederic Le Play (1806-1882)

Le Play mengenalkan suatu metode tertentu dalam meneliti dan menganalisa gejala-gejala sosial yaitu dengan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta sosial dan analisis induktif. Le Play juga menggunakan metode studi kasus dalam penelitian-penelitiannya. Penelitian tentang masyarakat menghasilkan dalil bahwa lingkungan

geografis menentukan jenis pekerjaan dan hal akan mempengaruhi organisasi ekonomi, keluarga serta lembaga-lembaga lainnya. Hasil karya Le Play yang utama antara lain; *Social reform in france, The organization of family dan The organization of Labor*.

7. Ferdinand Tonnies

Tonnies dikenal dengan teorinya mengenai *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok sosial. *Gemeinschaft* (paguyuban) adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang juga bersifat nyata dan organis sebagaimana dapat diumpamakan pada peralatan hidup tubuh manusia. Bentuk ini terutama dapat dijumpai pada keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya. *Gesellschaft* (patembayan) sebagai bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Bentuk ini merupakan suatu bentuk dalam pikiran semata, strukturnya bersifat mekanis sebagaimana sebuah mesin. Bentuk ini biasanya terdapat pada organisasi pedagang, organisasi suatu pabrik, organisasi industri dan sebagainya. Hasil karya Tonnies yang utama antara lain; *Gemeinschaft und Gesellschaft dan Sociological studies and criticism*.

8. Leopold von Wiese (1876-1949)

Von Wiese menganggap sosiologi sebagai suatu pengetahuan empiris yang berdiri sendiri. Obyek khusus

sosiologi adalah interaksi sosial atau proses sosial. Katagori proses sosial selanjutnya dibagi atas dasar derajat asosiatif atau disosiatifnya. Hasil karya Von Wiese yang utama antara lain; *Systematic Sociology dan Sociology of Sosial Relation*.

9. Alfred Vierkandt (1867-1953)

Vierkandt terutama mempelajari interaksi dalam masyarakat dan hasil interaksi tersebut. Masyarakat merupakan himpunan interaksi-interaksi sosial, sehingga sosiologi bertugas untuk mengkonstruksikan teori-teori tentang masyarakat dan kebudayaan. Setiap masyarakat merupakan suatu kebulatan dimana masing-masing unsur saling mempengaruhi. Dasar semua struktur soaial adalah ikatan emosional, tak ada konflik antara kesadaran individu dengan kelompok. Oleh karena itu individu tunduk kepada tujuan kelompok. Hubungan antara satu individu merupakan suatu mata rantai, hubungan tersebut akan timbul dan hilang, tetapi struktur dan tujuan kelompok tetap bertahan. Hasil karya Vierkandt yang utama antara lain; *Primitive and civilized peoples dan family, people and state in their sosial life*.

10. Lester Frank Ward (1841-1913)

Ward merupakan pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sosiologi bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan manusia. Menurut Ward, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu, karena interaksi berubah menjadi kekuatan sosial. Kekuatan sosial mempunyai

kemampuan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia di dalam memenuhi tujuannya. Hasil karya Ward yang utama antara lain; *Dynamic society dan Pure Sociology*.

11. Vilfredo pareto (1848-1923)

Pareto membuat beberapa teori yang serig disebut *logi-experimental science*. Sosiologinya didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan, eksperimen terhadap fakta-fakta dan rumus-rumus matematika. Menurut Pareto, masyarakat merupakan suatu sistem kekuatan yang seimbang dan keseimbangan tersebut tergantung pada ciri-ciri tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia, dan tindakan manusia tergantung dari keinginan-keinginan serta dorongan dalam dirinya. Hasil karya Pareto yang utama antara lain; *treatise on general sociology* yang diterjemahkan menjadi *The Mind and Society*.

12. Goerge Simmel (1858-1918)

Simmel berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan khusus, yaitu satu-satunya ilmu pengetahuan analitis yang abstrak diantara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Masyarakat merupakan suatu proses yang terus berjalan dan berkembang. Masyarakat ada dimana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi timbul karena kepentingan-kepentingan dan dorongan tertentu. Obyek sosiologi meurutnya adalah bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Hasil karya Simmel yang utama antara lain; *Concerning sosial differentiations, Basic problems of sociology dan Conflict of Modern culture*.

13. William Graham Sumner (1840-1910)

Sumner mendasarkan pada konsep *in-group* dan *out group*. Masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok sosial. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga-warga sekelompok maupun warga-warga dari kelompok lain. Apabila suatu kebiasaan dianggap demikian pentingnya bagi kesejahteraan kelompok sosial, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau moral kelompok yang mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Menurut Sumner ada 4 dorongan universal dalam diri manusia, yaitu rasa lapar, rasa cinta, rasa takut dan rasa hampa. Dari dorongan tersebut timbullah kepentingan-kepentingan yang menyebabkan terjadinya pola-pola kegiatan kebudayaan. Hasil karya Sumner yang utama antara lain; *What social classes owe to folkways* dan *The science of Sociology*.

14. Robert Ezra Park (1864-1944)

Park beranggapan bahwa sosiologi meneliti masyarakat setempat dari sudut hubungan antar manusia. Hasil karya Park yang utama antara lain; *Introduction to the Science of Sociology* dan *Race and Culture*.

15. Karl Manheim (1893-1947)

Manheim mempelopori suatu cabang sosiologi, yaitu sosiologi pengetahuan yang khusus menelaah hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Teori yang sangat terkenal adalah mengenai krisis. Akar dari segenap pertentangan yang menimbulkan krisis terletak dalam ketegangan-ketegangan yang timbul di semua lapangan kehidupan karena asas *laissez faire* berdampingan dengan

asas-asas baru dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, sangat perlu diadakan *planning for freedom*, yaitu perencanaan yang diawasi secara demokratis dan menjamin kemerdekaan aktivitas-aktivitas individu maupun kelompok di dalam maupun di luar rangka pertimbangan-pertimbangan tersebut. Hasil karya Manheim yang utama antara lain; *Ideology and Utopia* dan *Man and society in an age of reconstruction*.

### Perkembangan teori Sosiologi

Perkembangan teori sosiologi tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Auguste Comte sebagai bapak sosiologi. Seperti yang disebutkan dalam Soekanto (1982), hal ini menyebabkan masa Comte dapat dianggap sebagai patokan dalam perkembangan sosiologi. Konsep Comte yang kemudian terkenal adalah ketika Comte membedakan sosiologi menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatiannya pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Asumsi dasar sosiologi statis adalah bahwa semua gejala sosial saling berkaitan, yang berarti bahwa percuma mempelajari gejala sosial secara tersendiri. Unit sosial yang terpenting bukanlah individu, tetapi keluarga yang bagian-bagiannya terikat oleh simpati. Agar suatu masyarakat berkembang maka simpati harus diganti dengan kooperasi, yang hanya mungkin ada apabila terdapat pembagian kerja.

Sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan dalam arti pembangunan. Comte yakin bahwa masyarakat akan berkembang menuju suatu kesempurnaan. Meskipun demikian Comte lebih

mementingkan perubahan-perubahan atau perkembangan dalam cita-cita daripada bentuk.

Setelah era Auguste Comte, sosiologi mengalami perkembangan pesat yang dapat dikelompokkan ke dalam mazhab-mazhab. Beberapa mazhab tersebut antara lain:

- a. Mazhab Geografi dan lingkungan, yang menguraikan bahwa tidak mungkin suatu masyarakat terlepas dari tanah atau lingkungan dimana masyarakat itu berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Teori-teori ini mencakup sejarah perkembangan masyarakat-masyarakat tersebut. Beberapa tokoh mazhab ini antara lain; Edward Buckle dari Inggris dan Le Play dari Perancis.
- b. Mazhab Organisme dan Evolusioner, yang sangat dipengaruhi teori-teori bidang biologi dalam arti luas. Mazhab ini menganalogikan antara masyarakat manusia dengan organisme manusia. Tokoh penting mazhab ini antara lain Herbert Spencer, Emile Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Dalam bukunya *Principle of Sociology*, Spencer berpendapat bahwa suatu organisme akan berkembang menjadi semakin sempurna sifatnya, dengan kriteria kompleksitas, diferensiasi dan integrasi. Demikian juga halnya dengan masyarakat. Perkembangan masyarakat dari pertanian ke industri terjadi karena kompleksitas, diferensiasi dan integrasi yang semakin mantap dalam masyarakat menuju pada keadaan hidup yang damai. Durkheim dan Tönnies juga terpengaruh oleh kehidupan sosial lainnya dalam suatu hubungan dengan sesamanya, dan

dapat dipertahankan dalam masyarakat yang modern sekalipun.

- c. Mazhab Formal, sangat terpengaruh oleh ajaran dan filsafat Immanuel Kant. Beberapa tokoh mazhab ini antara lain George Simmel, Leopold Von Wiese dan Alfred Vierkandt. Simmel berpendapat bahwa elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antar elemen-elemen tersebut. Berbagai lembaga didalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi dan konflik. Semua hubungan-hubungan sosial, keluarga, agama, peperangan, kelas-kelas dapat diberi karakteristik menurut salah satu bentuk diatas atau ketiga-tiganya. Seorang warga masyarakat akan mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi warga masyarakat tak akan mungkin seseorang mengalami proses interaksi antara individu dengan kelompok.
- d. Mazhab Psikologi, yang mendasarkan teorinya pada psikologi. Beberapa tokoh mazhab ini diantaranya Gariel Tarde, Richard Horton Cooley, dan L.T. Hobhouse. Menurut Tarde, gejala sosial mempunyai sifat psikologi yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, dimana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Bentuk utama dari interaksi mental individu adalah imitasi, oposisi dan adaptasi atau penemuan baru. Imitasi seringkali berhadapan dengan oposisi yang menuju pada bentuk adaptasi yang baru. Dengan demikian mungkin terjadi perubahan sosial yang

disebabkan oleh penemuan baru, perubahan-perubahan dan seterusnya.

- e. Mazhab Ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx dan Max Weber. Konsep yang terkenal dari keduanya adalah pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berdasarkan pada kepemilikan ekonomi. Marx mempergunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun teori tentang perubahan yang menunjukkan tentang perkembangan masyarakat menuju suatu keadaan dimana ada keadilan sosial. Weber berpendapat bahwa tingkah laku individu-individu dalam masyarakat diklasifikasikan menurut 4 tipe ideal aksi sosial, yaitu; 1) aksi yang bertujuan, 2) aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan, 3) aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi dan 4) aksi yang emosional yang menyangkut perasaan seseorang. Atas dasar keempat aksi tersebut maka timbul hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.
- f. Mazhab Hukum, yang dipelopori oleh Emilei Durkeim, Max Weber dan Lawrence M Friedmen. Menurut Weber terdapat 4 tipe ideal hukum, yaitu; 1) hukum irasional dan materiil diman pembentukan undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah, 2) hukum irasional dan formal, dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, tetapi pada wahyu atau ramalan, 3) hukum rasional dan materiil, dimana keputusan-keputusan pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijakan

penguasa atau ideologi, dan 4) hukum rasional dan formal, dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

### **Perkembangan sosiologi pada Abad pencerahan**

Banyak ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dahulu, seperti Socrates, Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja. Tanpa ada yang bisa mencegah, masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pemikir di abad pertengahan, seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Para pemikir tersebut berpendapat bahwa *sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya.*

Berkembangnya ilmu pengetahuan di abad pencerahan (abad ke-17 M), turut berpengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat, ciri-ciri ilmiah mulai tampak di abad ini. Para ahli di zaman itu berpendapat bahwa pandangan mengenai perubahan masyarakat harus berpedoman pada akal budi manusia.

Perubahan-perubahan besar terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 M. Dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. Hal ini terlihat dengan jelas terutama dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Perancis. Gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Para ilmuwan tergugah, mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat.



Perubahan yang terjadi akibat revolusi industri menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun rusak. Bangasawan dan kaum Rohaniawan yang semula bergemilang harta dan kekuasaan, disetarakan haknya dengan rakyat jelata. Raja yang semula berkuasa penuh, kini harus memimpin berdasarkan undang-undang yang di tetapkan. Banyak kerajaan-kerajaan besar di Eropa yang jatuh dan terpecah, seperti Tsar di Rusia, Raja-raja di Perancis dan sebagainya.

Perubahan adanya revolusi industri ini mulai menggugah para ilmuwan pada pemikiran bahwa perubahan masyarakat harus dapat dianalisis, karena perubahan masyarakat yang besar telah membawa banyak korban berupa perang, kemiskinan, pemberontakan dan kerusakan. Bencana itu dapat dicegah sekiranya perubahan masyarakat sudah diantisipasi secara dini. Oleh karena itu muncul pemikiran bahwa:

- a. Perubahan masyarakat bukan merupakan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan dapat diketahui penyebab dan akibatnya.
- b. Harus dicari metode ilmiah yang jelas agar dapat menjadi alat bantu untuk menjelaskan perubahan dalam masyarakat dengan bukti-bukti yang kuat serta masuk akal. Dengan metode ilmiah yang tepat perubahan masyarakat sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga krisis sosial yang parah dapat dicegah.

### **Sosiologi modern**

Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada dan bukannya di Eropa yang merupakan tempat dimana sosiologi muncul pertama kalinya. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas dan lain lain. Konsekuensi gejolak sosial itu, perubahan besar masyarakat pun tak terelakkan.

Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern, yang merevisi dan penyesuaian sosiologi abad pertengahan dengan kondisi terkini.

Berkebalikan dengan pendapat sosiologi sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung mikro (pendekatan empiris), artinya perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial demi fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh yang lebih luas. Sejak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian dalam sosiologi, terutama penelitian yang bersifat empiris.

## Metode-metode dalam Sosiologi

Sosiologi mempelajari obyeknya (masyarakat) dengan menggunakan beberapa cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dalam sosiologi terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.

1. Metode Kualitatif, mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata dalam masyarakat. Metode ini berdasarkan pengertian (*verstehen*). Dalam metode ini termasuk didalamnya adalah metode:
  - a. *Historis*, metode yang menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa dalam silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Seseorang yang akan menyelidiki akibat-akibat revolusi secara umum akan mempergunakan bahan-bahan sejarah untuk meneliti revolusi-revolusi penting yang terjadi di masa silam.
  - b. *Komparatif*, metode yang mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidangnya-bidangnya untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta sebab-sebabnya. Perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perilaku masyarakat pada masa silam dan masa sekarang dan mengenai masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama.

- c. *Studi Kasus (case study)*, yang bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu. Dasar studi kasus adalah penelaahan suatu masalah khusus yang merupakan gejala umum dari persoalan-persoalan lainnya dapat menghasilkan dalil-dalil umum. Alat-alat yang dipergunakan dalam metode studi kasus adalah wawancara (*interview*) baik yang tersusun maupun yang tidak tersusun, pertanyaan-pertanyaan (*questionnaires*) dengan telah dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dari daftar-daftar pertanyaan (*schedules*), participant observer technique (penyelidik ikut serta dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok sosial yang sedang diamati).

2. Metode Kuantitatif, mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala-skala, indeks, tabel dan formula. Metode yang termasuk kuantitatif adalah metode statistik yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematis. Akhir-akhir ini berkembang *sociometry* yang mempergunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan penjenisan metode dalam sosiologi dapat dibagi menjadi:

1. Metode Induktif, yang mempelajari suatu gejala khusus yang untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas.
2. Metode Deduktif, yang memulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus.

Pembagian metode sosiologis yang lainnya adalah berdasarkan jenis metode, yaitu:

1. Metode empiris, yang menyandarkan diri pada keadaan-keadaan yang dengan nayat dapat didapat dalam masyarakat. Metode ini diwujudkan dengan riset atau penelitian yaitu cara mempelajari suatu masalah secara sistematis dan intensif untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai masalah tersebut. Riset dapat bersifat riset dasar (*basic*) yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dari ilmu pengetahuan dan riset aplikasi (*applied*), yang ditujukan pada penggunaan ilmu pengetahuan secara praktis.
2. Metode rationalistis, yang mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Metode ini masih digunakan oleh para ahli, terutama metode fungsionalisme. Metode ini bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial masyarakat. Metode ini berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk masyarakat mempunyai hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi, masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi dan para ahli sering menggunakan lebih dari

satu metode untuk menyelidiki obyeknya (subyek sosiologis).

### **Pokok bahasan sosiologi**

Sosiologi sebagai ilmu memiliki beberapa pokok bahasan, yaitu:

1. Fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contoh, di perguruan tinggi seorang mahasiswa diwajibkan untuk datang tepat waktu ketika kuliah dan bersikap hormat kepada seluruh civitas akademika. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu (kampus), yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu (mahasiswa).
2. Tindakan sosial, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial.
3. Khayalan sosiologis, diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Menurut Wright Mills, dengan khayalan sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat untuk melakukan

khayalan sosiologis adalah *troubles* (permasalahan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi) dan *issues* (merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu). Contoh, jika Indonesia hanya terdapat satu orang yang menganggur, maka hal ini disebut *trouble* atau hanya menjadi masalah individual yang pemecahannya dapat melalui peningkatan keterampilan pribadi. Namun apabila di Indonesia terdapat 50 juta penduduk yang menganggur, maka pengangguran tersebut merupakan *issue*, yang pemecahannya menuntut kajian lebih luas lagi, tidak sekedar peningkatan ketrampilan individu semata.

4. Realitas sosial, yaitu kenyataan yang ada dibelakang tabir, dimana seorang sosiolog dituntut untuk dapat menyingkap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Penyingkapan berbagai tabir tersebut harus mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif, jauh dari sikap subyektif.

### Sosiologi Perdesaan

Secara umum terdapat dua versi sosiologi perdesaan, yaitu versi lama (klasik) dan baru (modern). Pengertian sosiologi perdesaan kedua versi tersebut dapat diuraikan berdasarkan tokoh yang memperkenalkannya:

1. Sosiologi Klasik, muncul tatkala barat secara umum masih memperlihatkan perbedaan yang jelas dan bahkan

dikotomik antara desa dengan kotanya. Beberapa tokoh mendefinisikan sosiologi perdesaan sebagai berikut:

- a. John Gillette (1922), berpendapat bahwa sosiologi perdesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-komunitas perdesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan.
  - b. NL Sims (1942), sosiologi perdesaan adalah studi asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak tergantung pada pertanian.
  - c. Dwight Sanderson (1942), sosiologi perdesaan adalah studi tentang kehidupan dalam lingkungan perdesaan.
  - d. Lynn Smith & Paul Zopf (1970), sosiologi perdesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasikan yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi masyarakat perdesaan: organisasi & strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosial, dan perubahan-perubahannya.
2. Baru (Kapitalis), muncul setelah era globalisasi, dimana perbedaan antara desa dan kota semakin kabur oleh perkembangan teknologi (khususnya transportasi dan komunikasi). Pemahaman pada masa ini tidak terlepas dari dominasi kapitalis beserta sains-teknologinya yang memiliki kemampuan menembus dan menerobos setiap sudut dunia, seolah tidak ada tembok penghalang setiap sudut di dunia. Salah satu ahli penting versi ini adalah Howard Newby (1978) yang berpendapat bahwa sosiologi perdesaan "baru" harus

banyak belajar dari imbauan Karl Kautsky mengenai pertanyaan agraria (*The Agrarian Question*) dengan melihat perubahan-perubahan yang dialami pertanian di bawah dominasi produksi kapitalis. Secara lebih jelas sosiologi perdesaan yang baru merupakan studi tentang bagaimana masyarakat desa (bukan hanya desa pertanian) menyesuaikan diri terhadap merasuknya sistem kapitalisme modern di tengah kehidupan mereka.

### Latar Belakang Sosiologi Perdesaan

Latar belakang sosiologi di Dunia tidak terlepas dari peranan Amerika Serikat. Amerika Serikat abad 19 terjadi Ketimpangan dalam masyarakat pada masa industri. Sebelum muncul ketimpangan tersebut di Amerika kepemilikan lahan pertanian sangatlah luas dengan tipe masyarakat yang agraris. Namun perkembangan industrialisasi di Amerika menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian, karena mulai tumbuh desa-desa yang berkembang dengan pesat yang menjelama menjadi kota-kota.

Dampak perkembangan tumbuhnya desa-desa di Amerika adalah munculnya interaksi-interaksi baru yang merupakan pertemuan dari masyarakat beberapa wilayah di Amerika Serikat. Interaksi-interaksi baru tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap munculnya norma dan tata kelakuan baru dari masyarakat yang bergabung tersebut yang agak berbeda dengan norma dan tata kelakuan lama yang dibawa oleh masing-masing penduduk. Akibat lain yang ditimbulkan adalah

munculnya depopulasi di daerah perdesaan di Amerika Serikat. Munculnya depopulasi ini menyebabkan munculnya isu kemanusiaan yang menyebabkan keinginan untuk memperbaiki kehidupan di perdesaan mulai meluas sekitar tahun 1900.

Isyu tersebut melahirkan mata kuliah mengenai masalah sosial perdesaan di Universitas Chicago, Michigan dan North Carolina. Lebih lanjut isyu tersebut mengakibatkan Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Roosevelt, membentuk komisi tentang kehidupan desa (*Commision on Rural Life*). Keputusan membentuk komisi ini juga dipengaruhi oleh studi Sir Horace Plunkett di Irlandia mengenai rusaknya kehidupan desa di Irlandia.

Laporan komisi tentang kehidupan desa telah menarik perhatian para sosiolog Amerika Serikat. Dalam pertemuan para sosiolog yang tergabung dalam *American Sociological Society* tahun 1912, kehidupan desa ditampilkan sebagai topik utama. Sebagai akibat berkembangnya masyarakat yang relatif cepat, pada tahun 1937 muncullah kelompok ahli sosiologi yang mengkhususkan diri pada kajian masyarakat perdesaan yang dikenal dengan nama *Rural Sociology Society*. Pembangunan yang begitu pesat di Amerika Serikat sebagai imbas revolusi industri menyebabkan mulai hilangnya desa-desa di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan para sosiolog amerika sulit menemukan obyek kajiannya. Oleh karena itu para sosiolog Amerika mulai melakukan penelitian di Amerika Selatan (Peru, Meksiko, El Salvador, Cuba, Brasil) yang masih memiliki banyak sekali masyarakat perdesaan sebagai obyeknya.

Perkembangan kajian wilayah perdesaan yang semakin meluas ternyata berdampak pada perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri. Pada tahun 1957 muncullah Asosiasi Sosiologi Perdesaan di Eropa (*European Society for Rural Sociology*) dan Jepang yang mengkhususkan kajiannya pada masyarakat perdesaan di Eropa dan Jepang.

Di Indonesia Kajian sosiologi juga berkembang dengan pesat, meskipun para pujangga dan pemimpin Indonesia tidak pernah belajar teori ilmu sosiologi secara formal, namun banyak diantara mereka telah memasukkan unsur-unsur sosiologi ke dalam ajarannya. Ajaran *Wulangreh* yang diajarkan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta antara lain mengajarkan tata hubungan antara anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda (*inter group relations*). Demikian juga halnya dengan Ki Hajar Dewantoro meletakkan dasar-dasar mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia dalam pendidikan di Indonesia yang dipraktekkan dalam organisasi kependidikan Taman Siswa.

Dari penjelasan tersebut semakin jelaslah bahwa sosiologi sebagai praktis telah berkembang dan dikembangkan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan peneliti asing di Indonesia seperti tulisan Snouck Hurgronje, C van Vollenhoven, Ter Haar, Duyvendak dan sebagainya yang mengambil masyarakat Indonesia sebagai pusat perhatiannya. Hanya saja pada saat itu sosiologi belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan.

Sekolah tinggi hukum (*Rechtshogeschool*) di Jakarta satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia sebelum perang

dunia II yang memberikan kuliah sosiologi. Namun tahun 1934/1935 kuliah sosiologi ditiadakan, karena guru besar yang memegang otoritas menyusun daftar kuliah menimbang bahwa kajian-kajian sosiologis tidaklah diperlukan dalam hubungannya dengan proses hukum.

Setelah Perang Dunia II Soenario Kolopaking memberikan kuliah sosiologi pada Akademi politik Yogyakarta (dilebur ke dalam UGM pada fakultas Sosial dan Politik). Kemudian diikuti dengan diterbitkannya buku Sosiologi Indonesia oleh Djody Gondokusumo yang memuat beberapa pengertian elementer dari sosiologi yang teoritis dan bersifat sebagai filsafat. Pada tahun 1950 menyusul diterbitkannya buku sosiologi oleh Bardosono, yang diikuti dengan diterbitkannya buku Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia karangan Hassan Shadily (lulusan Cornell University di Amerika Serikat) yang memuat bahan-bahan sosiologi yang modern. Beberapa tahun kemudian muncullah ahli-ahli sosiologi Indonesia yang banyak menulis karya-karyanya. Salah satu karya yang sampai saat ini masih menjadi acuan adalah buku Sosial change in Yogyakarta yang ditulis oleh Selo Soemardjan tahun 1962. Tahun 1964 Selo Soemardjan bersama Soelean Soemardi juga menulis buku Setangka Bunga Sosiologi yang dijadikan bacaan wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia. Sejak saat itulah mulai bermunculan ahli-ahli sosiologi Indonesia sampai saat ini, seperti Sajogjo, Pujiwati Sajogjo, Tjondronegoro, Herman Soewardi, Astrid Susanto dan sebagainya.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian munculnya latar belakang sosiologi perdesaan adalah keterkaitannya



dengan isu kemanusiaan yang muncul sebagai refleksi dari ketimpangan masyarakat desa sebagai akibat perkembangan industri. Oleh karena itu sebagai salah satu ciri sosiologi perdesaan adalah penekanannya pada aspek praktis, sekalipun masih dalam kategori ilmu murni. Disamping itu sosiologi perdesaan juga dilekati oleh komitmen moral yang kental untuk membangun kehidupan masyarakat desa.

## **Bab II**

# **Karakteristik Dan Tipologi Desa**

Memahami karakter suatu masyarakat di perdesaan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap desa secara fisik. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa budaya material dan immaterial memiliki hubungan dengan tipe desa secara fisik. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman mengenai karakteristik desa.

### **Pemahaman Desa**

Desa merupakan obyek pokok dalam sosiologi perdesaan. Secara umum kita memahami desa merupakan satu cerminan kehidupan yang bersahaja, belum maju, cenderung terbelakang, namun untuk memahami desa tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Pengertian desa mestilah dibedakan antara *rural* dan *village*. *Rural* lebih bermakna sebagai perdesaan dengan ciri khas pada karakteristik masyarakat, sedangkan makna *village* lebih pada desa sebagai suatu unit territorial. Dengan demikian suatu perdesaan (*rural*) dapat mencakup satu desa (*village*) atau sejumlah desa.

Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E Bergel (1955), mendefinisikan

desa sebagai setiap pemukiman para petani (*peasant*). Menurutny ciri pertanian bukanlah ciri yang selalu melekat pada setiap desa, tetapi fungsi desa sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Suatu desa ditandai dengan keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu dan bukannya pada pertanian semata. Dalam konteks sosiologi, masyarakat yang memiliki ikatan kebersamaan dan ikatan terhadap wilayah tertentu disebut sebagai suatu komunitas (*community*).

Pengertian desa menurut Paul Landis (1948) didasarkan pada tujuan analisis, yaitu analisis statistik, sosial-psikologik dan ekonomik. Secara statistik desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan sosial-psikologik suatu desa merupakan lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara warganya. Berdasarkan analisis ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang pendapatan penduduknya tergantung pada pertanian. Dari ketiga ciri tersebut mungkin yang pertama, yaitu berdasarkan analisis statistik kurang tepat dilakukan, karena 1) tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk negara dimana desa tersebut terdapat, dan 2) tidak menampung perubahan-perubahan volume penduduk suatu desa.

Definisi desa yang lain juga dikemukakan oleh ahli sosiologi Indonesia yaitu Koentjaraningrat (1977) yang mendefinisikan desa sebagai tempat menetap komunitas kecil. Namun yang terpenting dari definisi tersebut bahwa desa tidak semata-mata terikat pada pertanian, tetapi

sebagai suatu kumpulan komunitas yang memiliki ikatan warganya terhadap wilayah yang didiaminya.

### Beberapa Konsep Mengenai Desa

Dalam rangka memahami desa perlu dibahas konsep-konsep mengenai *rural*, *urban*, *sub-urban* atau *rurban*, *village*, *town* dan *city*.

*Rural* dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia suntingan S Wojowasito dan WJS Poerwodarminto (1972) diartikan "seperti desa, seperti di desa", sehingga *rural* diterjemahkan menjadi perdesaan, bukanlah desa (*village*). Mungkin masih banyak kota-kota dalam pengertian kita diterjemahkan menjadi perdesaan, bahkan kota Jakarta, masih diterjemahkan sebagai *big village*, karena banyak kelompok masyarakat atau lingkungannya yang masih seperti desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 th 1979, dan Undang-undang no 22 th 1999, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini menempatkan desa berbeda dengan Kelurahan.

Kelurahan berdasarkan Undang-undang tersebut merupakan bentukan pemerintah Pemerintah lewat peraturan-peraturan yang tidak selalu merupakan bentuk asli dari masyarakat lewat proses sejarah yang panjang seperti desa dan diciptakan tanpa terikat pada kesatuan integritas sosial-kultural masyarakatnya. Oleh karena itu

perbedaan tersebut terletak pada kesatuan kesatuan masyarakat hukum dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekalipun dibatasi.

Sementara *urban* diartikan sebagai “dari kota, seperti di kota”, sehingga diterjemahkan menjadi perkotaan, bukanlah kota (*town* atau kota kecil, *city* atau kota besar). Mungkin desa-desa di Inggris atau Amerika dan Eropa umumnya dapat disebut sebagai *urban areas* atau setidaknya komunitasnya sudah bersifat *urban*.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hakekat konsep *rural* dan *urban* lebih menunjuk kepada karakteristik masyarakatnya, sedangkan *village*, *town* dan *city* lebih mengacu pada suatu unit teritorial. *Village*, *town* dan *city* bahkan lebih dipertegas lagi sebagai suatu unit teritorial-administrasi atau berkaitan dengan kekotaprajaan. Dengan kata lain *urban* bukan hanya sebuah kota (*town* atau kota kecil, *city* atau kota besar) dalam arti suatu kotamadya atau kotapraja, melainkan termasuk daerah-daerah di luar batas resmi daerah tersebut yang masyarakatnya memiliki cara hidup kota.

Konsep *sub-urban* atau *rurban* yang sering diartikan sebagai daerah “pinggiran kota”, padahal sebenarnya bermakna sebagai bentuk-antara (*in-between*) antara *rural* dan *urban*. Dilihat sebagai suatu lingkungan daerah *sub urban* merupakan daerah yang terletak diantara atau ditengah-tengah daerah *rural* dan *urban*. Dilihat sebagai suatu bentuk komunitas *sub urban* merupakan kelompok komunitas yang memiliki sifat-sifat tengah-tengah antara *rural* dan *urban*.

Konsep *town* (kota kecil) didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang didominasi dalam lingkungan

perdesaan dalam pelbagai segi. Dalam konteks ini kota kecil bukanlah sekedar desa besar. Sebuah desa hanya melayani orang-orang desa, desa tidak memiliki pengaruh-pengaruh terhadap daerah-daerah sekitarnya, baik politik, ekonomi maupun kultural. Sebaliknya kota kecil memiliki pengaruh-pengaruh tersebut. Kota kecil lebih berfungsi sebagai pasar bagi hasil-hasil pertanian, kerajinan atau industri kecil desa-desa sekitarnya. Hubungan antara kota kecil dan desa merupakan hubungan timbal balik. Tidak hanya desa tergantung pada kota kecil, tetapi kota kecil juga tergantung pada desa-desa di sekitarnya. Beberapa ciri kota kecil antara lain; adanya organisasi sosial yang ketat dan berbagai hubungan bersifat primer sehingga sistem pengawasan kota kecil lebih ketat dibandingkan desa.

Konsep *city* (kota besar) didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi sebuah kawasan (*region*), baik perdesaan maupun perkotaan. Dalam ciri sosial antara kota besar dengan kota kecil tidaklah berbeda, hanya yang membedakannya adalah kompleksitas yang ada di kota besar. Penduduk kota besar terdeferensiasi berdasar atas daerah asal, status, pendidikan, dan pola-pola tingkah laku. Dengan demikian kota besar mengandung deferensiasi tinggi yang berkaitan dengan proses penggandaan fungsi.

### Karakteristik Desa

Penjelasan mengenai karakteristik desa yang ditempatkan sebagai masyarakat yang masih bersahaja, selalu dikaitkan atau dilawankan dengan pemahaman mengenai kota yang maju dan kompleks. Hal ini menyebabkan karakteristik antara desa dan kota cenderung

bersifat kontras satu sama lain. Dalam merumuskan karakteristik yang kontras tersebut sejumlah sosiolog masih mengacu pada pola pemikiran yang bersiat teoritik seperti konsep Ferdinand Tonnies (*Gemeinschaft-Gesellschaft*), Charles Cooley (*Primary-Secondary group*) dan Emile Durkheim (*Solidaritas Mekanik-organik*).

Namun gambaran desa-kota yang mendasarkan pada kondisi empirik juga dilakukan oleh beberapa ahli sosiologi, seperti Roucek & Warren (1962) dan Horton & Hunt (1976). Roucek & Warren (1962) melihat bahwa masyarakat desa dan kota memiliki karakteristik seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik masyarakat Desa dan Kota Menurut Roucek & Warren

No	Desa	Kota
1.	Besarnya peranan kelompok primer	Besarnya peranan kelompok sekunder
2.	Faktor geografik menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi	Anonimitas merupakan ciri kehidupan masyarakat
3.	Hubungan lebih bersifat intim dan awet	Hubungan antara orang satu dengan lainnya lebih didasarkan atas kepentingan daripada kedaerahan
4.	Homogen	Heterogen
5.	Mobilitas sosial rendah	Mobilitas sosial tinggi

Lanjutan Tabel 3.

6.	Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi	Lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan
7.	Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar	Lebih banyak mengubah lingkungan dan tergantung pada spesialisasi

Gambaran perbedaan karakteristik seperti diatas menunjukkan perbedaan karakteristik yang kontras antar desa dan kota. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Horton & Hunt (1976) yang melihat perbedaan desa dan kota dalam masyarakat di Amerika dalam beberapa hal seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik masyarakat Desa dan Kota Menurut Horton & Hunt

No	Desa	Kota
1.	Penduduknya cenderung terisolasi dengan pola pemukimannya cenderung berpencar (meskipun mulai berubah seiring revolusi desa)	Teknologi rasional, yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kota-kota kecil yang terbuka terhadap daerah lain.
2.	Hubungan dan cara pandang terhadap orang lain sebagai pribadi utuh bukan sekedar seseorang yang mempunyai fungsi tertentu	Institusi pemerintah formal yang berdasarkan pada batas wilayah bukannya pada sistem kekeluargaan

Lanjutan Tabel 4.

3.	Adat dan kebiasaan muncul karena kebutuhan sosial	Organisasi sosial yang berdasarkan bidang pekerjaan dan kelas sosial, bukan pada sistem kekerabatan
4.	Homogenitas dalam etnik, budaya dan pekerjaan	Adanya pembagian kerja ke dalam beberapa bidang pekerjaan khusus
5.	Ekonomi keluarga bersifat subsinten (meskipun sudah mulai komersial, yang ditandai dengan munculnya agribisnis atau pertanian berskala besar)	Sistem perdagangan dan dunia usaha

Tabel 4. menunjukkan perbedaan karakteristik yang berbeda secara kontras, baik dalam homogenitas, kependudukan, interaksi dan ekonomi. Namun gambaran desa-kota secara lebih rinci diuraikan oleh Pitirin A. Sorokin dan Carle C Zimmerman (dalam Rahardjo, 1999) mengemukakan faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota. Keduanya membedakan desa dan kota berdasar atas 8 hal, yaitu; mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial. Dalam bentuk sederhana dapat diringkas seperti Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik Desa dan Kota menurut Sorokin dan Zimmerman

No	Penciri	Desa	Kota
1.	mata pencaharian	Pertanian dan usaha kolektif sebagai ciri ekonomi	Usaha jasa dan manufaktur sebagai ciri ekonomi
2.	ukuran komunitas	kecil, karena lahan lebih banyak digunakan untuk pertanian	Besar, karena jasa dan manufaktur tidak memerlukan lahan yang luas
3.	tingkat kepadatan penduduk	Rendah, terkait dgn ukuran komunitas dan luas lahan	Tinggi, terkait dgn ukuran komunitas dan luas lahan
4.	lingkungan	a. Fisik (anorganic); berhadapan langsung dan dipengaruhi b. Biologi (organik); tanah, kekotoran identik dgn hidup mereka c. Sosio-kultural : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Physiososial; bangunan fisik homogen</li> <li>• biososial; komposisi ras homogen</li> <li>• psychososial; sederhana</li> </ul>	a. Fisik (anorganic); tidak berhadapan langsung b. Biologi (organik); tanah identik dengan "bakteri" c. Sosio-kultural: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Physiososial; bangunan fisik yg bervariasi</li> <li>• biososial; komposisi ras beragam</li> <li>• psychososial; lebih kompleks</li> </ul>

Lanjutan Tabel 5.

5.	diferensiasi sosial	Dalam hal jumlah, variasi dan kompleksitasnya rendah, karena penduduknya homogen	Dalam hal jumlah, variasi dan kompleksitasnya tinggi, karena penduduknya heterogen, banyak pendatang
6.	stratifikasi sosial	Sederhana, perbedaan jarak sosial dekat, mengelompok pada lapisan menengah, dasar pembeda cenderung kaku Mobilitas sosial rendah	Kompleks, perbedaan jarak sosial jauh, tersebar merata pada setiap lapisan, dasar pembeda tidak begitu kaku Mobilitas sosial tinggi
7.	interaksi sosial	Kontak sosial cenderung sedikit	Kontak sosial cenderung banyak dan bervariasi
8.	solidaritas sosial	Didasarkan pada kesamaan-kesamaan	Didasarkan pada perbedaan-perbedaan

Selain model pencirian desa dan kota seperti diatas, dalam perspektif evolusionis Kingsley Davis (dalam Rahardjo, 1999) mencirikan masyarakat kota, yang berarti berkebalikan dengan masyarakat desa, berdasarkan 8 faktor, yaitu:

1. Heterogenitas sosial, yaitu heterogenitas masyarakat kota tinggi.
2. Asosiasi sekunder, yakni masyarakat kota dalam kelompok sekunder karena banyaknya penduduk, sehingga yang mendominasi kehidupan masyarakat kota adalah asosiasi sekunder.
3. Toleransi sosial, masyarakat kota memiliki toleransi sosial yang tinggi karena pengawasan sosialnya relatif longgar.
4. Pengawasan sekunder, masyarakat kota dengan toleransi sosial yang tinggi sehingga pengawasan yang efektif adalah pengawasan sekunder.
5. Mobilitas sosial, pada masyarakat kota relatif tinggi dan lebih mementingkan prestasi (*achievement*)
6. Asosiasi sukarela, yakni masyarakat kota lebih memiliki kebebasan untuk memutuskan berbagai hal secara perorangan, sehingga cenderung kepada asosiasi sukarela, yakni asosiasi yang anggotanya bebas keluar dan masuk .
7. Individualis, masyarakat kota cenderung melepaskan diri dari kolektivitas atau cenderung individualis.
8. Segregasi spasial, dalam masyarakat kota berbagai kelompok sosial yang berbeda cenderung memisahkan secara fisik.

Konsep-konsep desa yang dikemukakan diatas belumlah cukup untuk memberikan gambaran desa-desa di Indonesia. Hal ini disebabkan di Indonesia masih terdapat desa yang masih mendekati desa era prakapitalistik (desa sebelum modernisasi). JH Boeke dalam bukunya "*The Interest of the Voiceless Far east, Introduction to Oriental*

*Economics*" tahun 1948, menggambarkan ciri pokok desa prakapitalistik adalah:

1. Penundukan kegiatan ekonomi dibawah kegiatan sosial, artinya kegiatan sosial lebih penting daripada kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan ekonomi dipandang sebagai "kejahatan".
2. keluarga merupakan unit swasembada secara ekonomis sehingga masyarakat desa hakekatnya bukan merupakan unit ekonomi tetapi merupakan unit sosial dengan keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting. Dengan kata lain keterpaduan masyarakat desa bukanlah keterpaduan ekonomi tetapi keterpaduan sosial.
3. Tradisi dapat dipertahankan karena swasembada ekonomi, oleh karena itu masyarakat desa merupakan pengelompokan kecil-kecil yang menyebabkan orang-orang desa saling mengenal dan akrab satu sama lain. Berdasarkan hubungan personal inilah maka tradisi yang ada dapat dipertahankan.
4. Desa cenderung menatap ke belakang tidak kedepan, yang dapat memperkuat kelestarian tradisi setempat.
5. Setiap orang merasa menjadi bagian dari keseluruhan, menerima tradisi dan moral kelompok sebagai pedomannya. Hal ini menyebabkan tingkat kolektivitas yang sangat tinggi, individualisme otomatis tidak dapat diterima.

## **Desa-desa di Indonesia**

Desa-desa dimanapun merupakan fenomena yang bersifat universal, karena memiliki sejumlah ciri-ciri yang sama. Namun juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, regional maupun nasional. Desa-desa di Indonesia selain memiliki ciri yang berbeda dengan desa-desa di negara lain, juga memiliki ciri khas antar desa. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia memiliki kebhinekaan yang kental, sehingga sangatlah sulit membuat generalisasi karakteristik desa di Indonesia yang khas dan membedakannya dengan desa-desa lain.

Sebagian desa-desa di Indonesia telah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, dengan kemandirian desa juga diakui oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah ini misalnya dapat dilihat pada Inpres Nomor 5 tahun 1976, yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Pengertian seperti ini juga terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1979.

Keberagaman desa di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri) sudah ada sejak lama di Indonesia bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu dibuatlah patokan bagi nama-nama desa di Indonesia. Nama-nama kesatuan masyarakat hukum setingkat desa di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6 (Rahardjo, 1999).

Tabel 6. Nama-nama kesatuan masyarakat hukum setingkat desa di Indonesia

No	Propinsi	Nama Desa	Sebutan Kepala Desa
1.	Nangroe Aceh Darussalam	Kampung, Mukim, Gampong	Kepala Kampung
2.	Sumatera Utara	Timur: kampung Tapanuli: Negeri, Ori, Huta	Kepala kampung, Kepala Negeri, Kepala huta
3.	Sumatera Barat	Nagari	Wali Nagari
4.	Riau	Kampung	Kepala Kampung
5.	Sumatera Selatan	Marga	Pasirah/Kepala Marga
6.	Jambi	Marga	Pasirah/Kepala Marga
7.	Bengkulu	Marga	Pasirah/Kepala Marga
8.	Lampung	Marga	Pasirah/Kepala Marga
9.	DKI Jakarta	Kelurahan	Lurah
10.	Jawa Barat	Desa	Kepala Desa/Kuwu
11.	Jawa Tengah	Desa	Kepala Desa
12.	Jawa Timur	Desa	Kepala Desa
13.	DIY	Desa	Kepala Desa
14.	Kalimantan Barat	Kampung	Kepala Kampung

Lanjutan Tabel 6.

15.	Kalimantan Tengah	Kampung	Kepala Kampung
16.	Kalimantan Timur	Kampung	Kepala Kampung
17.	Kalimantan Selatan	Kampung	Kepala Kampung
18.	Sulawesi Utara	Desa/Kampung	Kepala Desa/Kampung
19.	Sulawesi Tengah	Kampung	Kepala Kampung
20.	Sulawesi Tenggara	Desa	Kepala Desa
21.	Sulawesi Selatan	Desa Gaya Baru	Kepala Desa gaya Baru
22.	Bali	Desa/Perbekel	Kepala Desa/Perbekel
23.	Nusa Tenggara Barat	Desa	Kepala Desa
24.	Nusa tenggara Timur	Desa Gaya Baru	Kepala Desa Gaya Baru
25.	Maluku Tengah, Tenggara Maluku Utara	Negeri Kampung	Pemerintah Negeri Kepala Kampung
26.	Papua	Kampung	Kepala Kampung

Patokan nama tersebut yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bukan merupakan patokan final dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi dapat berubah. Di Sumatera



Barat pernah terjadi perubahan melalui Peraturan daerah, bahwa daerah hukum setingkat desa bukan lagi *nagari* tetapi *korong*, yaitu daerah yang semula setingkat dusun.

### Tipologi Desa di Indonesia

Desa-desanya di Indonesia ternyata tidak hanya desa dengan nuansa pertanian, tetapi juga terdapat desa dengan nuansa lain. Oleh karena itu Saparin (dalam Rahardjo, 1999) menyebutkan ada beberapa tipe desa di Indonesia, yaitu:

1. Desa Tambangan, yaitu desa yang memiliki kegiatan utama penyebaran orang atau barang dimana terdapat sungai besar.
2. Desa Nelayan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah usaha perikanan laut.
3. Desa Pelabuhan, desa yang memiliki hubungan dengan mancanegara, antar pulau dan sebagainya.
4. Desa Perdikan, desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan memelihara makam raja atau karena jasa-jasa terhadap raja)
5. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
6. Desa perintis, desa yang terjadinya karena kegiatan transmigrasi.
7. Desa Pariwisata, desa dengan mata pencaharian penduduknya terutama karena adanya obyek pariwisata.

Berdasarkan urutan jumlah terbesar memang desa pertanian sangatlah banyak, mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya

sebagai petani. Setelah desa pertanian, desa nelayan merupakan desa yang sangat penting dari segi jumlahnya. Hal ini juga terkait dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain itu di Indonesia terdapat beberapa tipe desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, antara lain :

1. Desa Nelayan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah usaha perikanan laut, seperti Desa Depok, Desa Samas, Desa Congot, Desa pelabuhan Ratu, dan sebagainya.
2. Desa Persawahan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai petani lahan sawah yang memiliki air pengairan secara baik, sebagian besar desa di Jawa seperti; desa-desa di Delanggu, desa-desa di kerawang dan sebagainya.
3. Desa Perladangan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai petani ladang atau peladang, karena lahan pertaniannya tidak memiliki air pengairan yang baik atau hanya mengandalkan air hujan, seperti sebagian besar petani di Gunung Kidul, Wonogiri, Nusa Tenggara, dan sebagainya.
4. Desa Perkebunan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai pekebun tanaman tahunan, seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi, teh dan sebagainya. Desa semacam ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya.
5. Desa Peternakan, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai peternak, baik ternak besar (kambing, kerbau, sapi dan sebagainya) maupun ternak kecil (ayam, bebek, dan sebagainya).

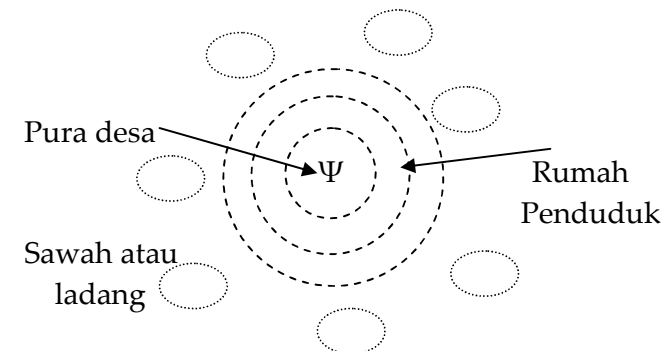
6. Desa Kerajinan/industri kecil, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai pengrajin atau pengusaha kecil seperti; perajin gerabah di Kasongan, perajin bambu di Kecamatan Minggir, pengusaha gula kelapa di Kokap, emping mlinjo di Banguntapan dan sebagainya.
7. Desa Industri sedang dan besar, desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai pengusaha sedang dan besar, seperti desa-desa di Tangerang, Kerawang dan sebagainya.
8. Desa Jasa dan Perdagangan desa dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah sebagai penyedia jasa dan perdagangan.

#### Pola Lokasi & Wilayah Desa

Desa-desa di Indonesia memiliki pola lokasi yang beragam sesuai dengan karakteristik sosial budaya yang dianutnya. Beberapa desa memiliki persamaan dalam pola lokasi, tetapi karakteristik sosial budaya yang berbeda, misalnya; pola lokasi desa di Sumatra dan Kalimantan yang sama-sama memanjang sepanjang jalur jalan utama, yang membedakan adalah Sungai dan Jalan raya dimana desa di Kalimantan memanjang sepanjang sungai, sementara desa-desa di Sumatra memanjang sepanjang jalan raya. Hal ini dapat dimaklumi karena di Kalimantan pusat aktivitas terdapat di sepanjang sungai besar. Beberapa pola lokasi desa-desa di Indonesia antara lain:

1. Pola desa Melingkar, yaitu desa-desa dengan tempat tinggal penduduknya secara melingkar dengan menjadikan pusat kegiatan sosial budaya terletak di

tengah-tengahnya, sementara pesawahan atau ladang tersebar di luar lingkaran utama. Pola lokasi desa seperti ini banyak terdapat di Bali pada masa sebelum modernisasi menyentuh pulau Bali dengan pura desa sebagai pusat tempat tinggal penduduknya. Hal ini terjadi karena pura merupakan pusat segala kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan keagamaan, meskipun di masing-masing rumah sudah memiliki pura keluarga (Gambar 1.)



Gambar 1. Pola Desa Melingkar di Bali sebelum era Modernisasi

Agak berbeda dengan pola desa sebelum modernisasi, pola desa di Bali pada saat ini lebih cenderung mengikuti jalan desa dengan letak pura desa merupakan pintu masuk atau keluar bagi desa. Meskipun demikian pura masih merupakan titik sentral

dalam pola lokasi tempat tinggal penduduk desa di Bali.

2. Pola desa Mendatar, yaitu pola lokasi desa yang meletakkan tempat pemukiman penduduknya sejajar dengan rumah penduduk yang lain. Pola ini masih digunakan pada Suku-suku pedalaman di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara maupun Papua (Gambar 2).



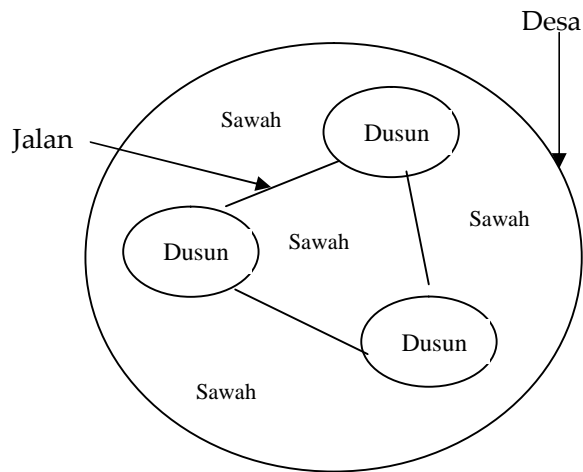
Gambar 2. Pola Lokasi Desa di Nusa Tenggara

Pola desa mendatar saat ini banyak digunakan sebagai pemukiman transmigrasi. Salah satu contoh adalah desa transmigrasi adalah Desa Bugel, Kulon Progo, DIY (Gambar 3).



Gambar 3. Pola Lokasi Desa Transmigrasi di Desa Bugel  
Kabupaten Kulon Progo

3. Pola desa Konsentris, yaitu pola lokasi desa-desa dimana pemukiman penduduk mengumpul di suatu lokasi yang memiliki administratif lebih kecil (misalnya dusun) dan ada lahan pertanian diantara dusun-dusun tersebut (Gambar 4). Antar dusun dihubungkan dengan jalan yang merupakan penghubung bagi penduduk desa setempat. Pola ini banyak dijumpai di Sumatra dan Jawa yang memiliki penduduk dengan karakteristik hampir sama.



Gambar 4. Pola Lokasi Desa Konsentris

Pola lokasi desa konsentris di Jawa dan Sumatera ini memungkinkan penduduk desa yang berdomisili di masing-masing dusun memiliki hubungan yang erat dan akrab. Hal ini dimungkinkan karena sebagai warga desa mereka juga memiliki kewajiban berinteraksi dan melakukan kegiatan di tingkat desa. Tidaklah mengherankan kemudian apabila seorang yang bertempat tinggal berjauhan sangat mengenal orang lain yang sama-sama satu desa.

4. Pola desa Memanjang jalur sungai/jalan, yaitu pola lokasi desa dimana pemukiman penduduknya berada di sekitar sungai atau jalan raya dan dibelakang pemukiman terdapat sawah dan ladang mereka. Pola

lokasi desa seperti ini terdapat di Kalimantan (memanjang sungai) dan Sumatera (memanjang jalan atau tempat yang menjadi pusat kegiatan). Pada Masyarakat padang surau sebagai pusat kegiatan masyarakat menjadikan pola lokasi tempat tinggal yang sejajar atau mendekati surau (Gambar 5) .



Gambar 5. Pola Lokasi desa di Padang (Sumatera Barat) yang berpusat di Surau (masjid)

Sementara di Kalimantan yang memiliki sungai-sungai besar yang berfungsi sebagai jalan raya (dengan menggunakan perahu) banyak dijumpai pola lokasi desa yang sejajar dengan sungai, baik tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi kegiatan masyarakat (Gambar 6). Pola ini memungkinkan karena lahan-lahan yang ada di belakang mereka adalah hutan lebat yang belum memungkinkan untuk digarap sebagai lahan pertanian. Pola ini memiliki ciri mata pencaharian

utama penduduknya sebagai nelayan dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai petani.



Gambar 6. Pasar Lima di Banjarmasin yang terletak Seajar Sungai Mahakam

Selain tipologi yang dimiliki Indonesia, beberapa ahli juga menggolongkan pola lokasi desa-desa menjadi beberapa tipe yang umumnya desa-desa tersebut berada di Amerika Serikat atau Eropa. Landis (1948), menggolongkan tipologi desa ke dalam 4 tipe, yaitu:

1. *Farm Village Type* yang memiliki ciri-ciri tempat tinggal yang mengumpul dengan sawah ladang berada disekitar tempat tinggal. Pada tipe ini memiliki ciri sosiologis tradisi yang kuat, namun proses produksi sudah bersifat komersial. Tipe lokasi ini banyak terdapat pada desa-desa di Asia Tenggara, terutama pulau Jawa.

2. *Nebulous Farm Village Type* yang memiliki ciri-ciri tempat tinggal mengumpul tapi sebagian ada yang menyebar di luar tempat tinggal bersama sawah ladang. Pada tipe ini memiliki ciri sosiologis tradisi kuat dan kolektivitas yang kuat. Tipe lokasi ini banyak terdapat pada desa-desa di Asia Tenggara, terutama Sulawesi, Maluku, Irian, dan Jawa.
3. *Arranged Isolated Farm Type* yang memiliki ciri-ciri tempat tinggal di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan (*Trade Centre*). Pada tipe ini memiliki ciri sosiologis tradisi kurang kuat, mulai muncul individualisme yang menonjol, dan produksi bidang perdagangan. Tipe lokasi ini banyak terdapat pada desa-desa di Eropa dan Amerika.
4. *Pure Isolated Farm Type* yang memiliki ciri-ciri tempat tinggal di luar pusat perdagangan (*Trade Centre*) bersama dengan sawah ladang. Pada tipe ini memiliki ciri sosiologis tradisi kurang kuat, individualisme mulai menonjol, dan lebih banyak produksi bidang perdagangan daripada pertanian. Tipe lokasi ini banyak terdapat pada desa-desa di Eropa dan Amerika.

Selain itu terdapat tipologi Desa Menurut Everett M Rogers & Rabel J Burdge (1972), yang menggolongkan desa menjadi 3 tipe, yaitu:

1. *The Scattered Farmstead Cummunity* yang memiliki ciri sebagian di pusat pelayanan sebagian terpecah bersama sawah ladang.
2. *The Cluster Village*, yang berciri tempat tinggal mengumpul, selebihnya sawah ladang.

3. *The Line Village* yang berciri, tempat tinggal di sekitar jalan-jalan atau aliran sungai

Penggolongan tipe desa juga dilakukan dengan melihat tingkat perkembangan masyarakatnya. Berdasarkan perkembangan masyarakatnya desa-desa di Indonesia dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Desa Tradisionil (pra desa), desa ini banyak dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya (termasuk bercocok tanam, cara memelihara kesehatan, cara memasak makanan dan sebagainya) masih sangat tergantung pada pemberian alam sekeliling mereka, misalnya; suku badui dalam, suku dayak, suku anak dalam dan sebagainya.
2. Desa Swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi relatif statis tradisional dalam arti masyarakatnya sangat tergantung pada ketrampilan dan kemampuan pimpinannya, misalnya; desa badui luar, dan sebagainya.
3. Desa Swakarya (desa peralihan), yaitu desa yang mulai disentuh oleh anasir-anasir dari luar berupa pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat, misalnya; desa-desa di Jawa yang terletak di pelosok.
4. Desa Swasembada, yaitu desa dimana masyarakatnya telah maju yang ditandai dengan sudah mengenal dan menggunakan mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan.

5. Desa Pancasila, yaitu tipe desa ideal yang dicita-citakan bangsa Indonesia dengan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Pemahaman lebih lanjut diperlukan untuk mengenal lebih dalam mengenai tipe desa di Indonesia. Dengan memahami desa secara komprehensif akan menambah wawasan mengenai kondisi masyarakat di Indonesia.

# Bab III

## Masyarakat Dan Kebudayaan Agraris

Masyarakat agraris, seperti Indonesia, memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang nampak menonjol adalah perbedaan budaya tiap masyarakat yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa budaya material dan immaterial memiliki hubungan dengan karakteristik masyarakatnya, baik sebagai masyarakat padi sawah, lahan kering atau masyarakat nelayan. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman mengenai bentuk perbedaan budaya suatu desa.

### Masyarakat

Masyarakat sebagai komunitas (*cummunity*) adalah kelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka. Definisi ini merujuk dari pengertian komunitas yang menurut Horton (1992) adalah suatu kelompok setempat atau local dimana orang melaksanakan segenap kegiatan (aktivitas) kehidupannya.

Secara lebih terinci Hillery, Jonassen dan Wills mendefinisikan komunitas adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki

pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (*interdependent*) dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur. Dengan demikian komunitas dapat diartikan sebagai “masyarakat setempat”, yaitu suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Perasaan masyarakat setempat menurut RM Mac Iver dan Page (Soekanto, 1970) mempunyai 3 unsur, yaitu:

1. sepekerjaan; seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang-orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kita” dan “perasaan kita”.
2. sepenanggungan; setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan bahwa perannya tadi dijalankan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.
3. saling memerlukan; individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasa dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologisnya.

Kehidupan sosial orang dipengaruhi oleh bentuk komunitas dimana ia hidup. Sebuah komunitas yang merupakan suatu kelompok kesatuan hidup manusia (kota, desa) maupun sebagai seperangkat perasaan (rasa keikatan, kesetiaan) akan mempengaruhi kehidupan sosial seseorang.

Masyarakat (sebagai terjemahan *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

### Elemen-elemen dalam Masyarakat

Istilah elemen menyatakan suatu bagian pokok atau dasar dari kesatuan yang lebih besar. Satuan-satuan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat akan membentuk struktur sistem sosial itu sendiri. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian-bagian yang menyatu di dalam sistem sosial. Menurut Alvin L Bertrand (1980) terdapat 10 unsur dari sistem sosial, yaitu:

1. Keyakinan (pengetahuan), setiap sistem sosial mempunyai keyakinan-keyakinan (*belief*) tertentu yang dipeluk dan ditaati oleh para anggotanya. Hal ini terjadi karena orang bertindak laku sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini.
2. Perasaan (sentimen), bagaimana perasaan anggota suatu sistem sosial tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu tanpa memperdulikan cara mereka mempunyai perasaan itu.
3. Tujuan, sasaran atau cita-cita, tujuan atau maksud dari sistem sosial paling jelas bisa dilihat dari fungsi sistem-sistem itu sendiri. Pencapaian sasaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.
4. Norma (*norm*), Norma sosial dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Norma menggambarkan tata tertib atau aturan-aturan permainan. Wujud dari norma dapat berupa:
  - a. *Folksways* atau aturan didalam melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh umum akan tetapi sebetulnya tidak memiliki status paksaan atau keharusan.
  - b. *Mores* atau segala tingkah laku yang menjadi keharusan, dimana setiap orang wajib melakukan.
  - c. Hukum, yang didalamnya menjelaskan dan mewajibkan ditaatinya *mores* dan mengekang tingkah laku yang berada diluar lingkup *mores* tersebut.
5. Kedudukan peranan (status), yaitu sebagai suatu kedudukan di dalam suatu sistem sosial yang tidak tergantung pada para pelaku tersebut. Peranan merupakan suatu bagian dari status yang terdiri dari



sekumpulan norma-norma sosial. Norma-norma tersebut sedikit banyak terintegrasi dalam membentuk suatu peranan. Seorang individu bisa menduduki status tertentu melalui dua macam, yaitu status yang diperoleh secara otomatis (*ascribed statuses*) dan melalui usaha sendiri (*achieved statuses*).

6. Tingkatan atau pangkat (*rank*), sebagai suatu unsur dari sistem sosial dapat dipandang sebagai kepangkatan sosial (*sosial standing*). Pangkat tersebut tergantung pada posisi-posisi status dan hubungan-hubungan peranan.
7. Kekuasaan atau pengaruh (*power*), Kekuasaan seseorang atau sekelompok orang dalam mengawasi orang atau kelompok lain biasanya terlihat seperti berkedudukan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu yang menjadi nilai-nilai bagi orang atau kelompok lain. Kekuasaan seringkali dikelompokkan menjadi *otoritatif* (bersandar pada posisi status) dan *non otoritatif* (pemaksaan dan kemampuan mempengaruhi orang lain).
8. Sanksi, menyatakan tentang sistem ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
9. Sarana atau fasilitas, yaitu semua cara atau jalan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu sendiri.
10. Tekanan dan ketegangan (*stress-strain*), sistem sosial akan mengalami tekanan apabila terjadi perbedaan interpretasi dan perbedaan tersebut berubah menjadi pola-pola tindakan. Konflik, penyimpangan dan ketidakserasian timbal dari adanya tekanan-tekanan dan hal tersebut menyebabkan perpecahan (*disorganization*)

Sebagai suatu sistem sosial, masyarakat juga memiliki elemen-elemen dasar, yaitu:

1. penduduk (orang), terikat secara paternal, hubungan darah, *ascribed status* maupun *achievement status*.
2. wilayah, terdapat masyarakat setempat, ada interaksi antara penduduk dan wilayahnya. Wilayah inilah yang membedakan antara *community* dengan *society*, dimana *society* merupakan penduduk dalam arti luas yang tidak terikat dengan tempat tinggal atau teritori, misal: masyarakat civitas akademika.
3. interaksi
4. kepentingan bersama
5. kebutuhan bersama

Kelima elemen dasar tersebut sekaligus menjadi ciri yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu dalam masyarakat terdapat elemen-elemen sebagai suatu system. Elemen-elemen masyarakat sebagai sistem, antara lain:

1. Tujuan/sasaran, perubahan yang diharapkan atau dikehendaki oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan terus-menerus operasinya.
2. Norma, aturan atau penuntun standar yang menentukan apa yang pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Norma berpengaruh terhadap arti aplikasi dalam hasil yang dicapai tujuan/sasaran masyarakat.
3. Status, peran, posisi dalam struktur dan dimulai dengan tingkah laku dan penampilan individu atau individu-individu dalam masyarakat. Mereka menggabungkan struktur dan fungsi.

4. Sanksi, ini mekanisme kontrol yang menyebabkan kerelaan dengan norma dan tujuan di masyarakat. Mereka memberi-kepuasan (hadiah) atau mencabut-kepuasan (hukuman).
5. Rangking sosial, kedudukan relatif anggota kolektif yang merasa sebagai anggota. Ini akibat dari penilaian semua di masyarakat mengikuti statusnya dalam masyarakat, pelaksanaan status-peran, prestise dan penghargaan, kekuasaan, dan nilai dan sistem nilai
6. fasilitas, berbagai hal yang digunakan dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Fasilitas ini mungkin finansial, fisik, sumber daya manusia dan sosial, kemampuan hubungan manusia, pengetahuan, teknologi dan sumber daya lain yang ada.
7. Kekuasaan, kecakapan atau kemampuan mengendalikan tingkah laku atau sikap yang lain. Kekuasaan memiliki dua sifat: a). wibawa/wewenang yaitu hak untuk mengontrol bagi yang lain sanksi dalam masyarakat dan b). pengaruh, yaitu aspek tidak berwenang dari kekuasaan yang dapat mengakibatkan perubahan sikap atau tingkah laku yang lain. Pengaruh dapat menjadi dasar hubungan manusia atau modal sosial lewat kemurahan pengetahuan superior, beberapa tipe dari kekayaan atau pemerasan sama sekali.
8. Kepercayaan (pengetahuan), persepsi individu dalam hubungan yang ada antara fenomena dalam dunia. Individu-individu dalam masyarakat selalu merasa hubungan-hubungan ada kesamaannya.
9. Perasaan / sentimen, perasaan normatif yang ekspresif dan mewakili perasaan individu tentang fenomena dalam dunia. Ini relatif terbuka untuk mempercayai.

Kepercayaan memperlihatkan 'apa yang kita tahu' sentimen memperlihatkan 'apa yang kita rasakan' tentang dunia.

Secara lebih singkat beberapa ahli sosiologi mendefinisikan masyarakat berdasarkan tinjauan yang berbeda. Beberapa definisi ahli sosiologi tentang masyarakat antara lain:

1. RM Mc Iver & CH Page (1955), masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan golongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia
2. Ralph Linton (1956) mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas
3. ER Babbie (1983), mendefinisikan masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang telah hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan

Berdasarkan definisi diatas maka Soerjono Soekanto (1990), menyebutkan bahwa suatu masyarakat harus memiliki 4 unsur, yaitu :

1. Manusia yang hidup bersama, Mereka
2. bercampur untuk waktu yang lama,
3. Mereka sadar sebagai satu kesatuan dan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Apabila suatu kelompok orang atau sekelompok orang memiliki ciri-ciri tersebut diatas maka dapatlah kelompok masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat.

### Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* diterjemahkan "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Dalam antropologi prinsip kebudayaan adalah merupakan suatu hal yang tidak disadari keberadaannya oleh warga masyarakat, dan baru menjadi bahan renungan ketika seseorang mempelajari kebudayaan masyarakat lain. Keesing (1958), merangkum definisi kebudayaan dari beberapa ahli, antara lain:

1. Tylor (1871), merupakan keseluruhan konsep yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral , hukum, adat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai manusia sebagai anggota masyarakat.
2. Linton (1940), seluruh pengetahuan, sikap dan pola perilaku kebiasaan yang dimiliki bersama dan disebarkan oleh warga suatu masyarakat tertentu.
3. Kluchkon dan Kelly (1945), Pola kehidupan, eksplisit dan implisit, regional dan non-rasional, yang terwujud

setiap saat sebagai pedoman potensiil bagi perilaku manusia.

4. Herskovit (1955), bagian dari lingkungan yang merupakan buatan manusia dan merupakan Sesuatu yang superorganik
5. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964), mendefinisikan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
6. Koentjaraningrat (1979) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara mempelajarinya.
7. EB Taylor (1987), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan yang diperoleh manusia selaku anggota masyarakat

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mencakup semua yang diperoleh atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, meliputi semua pola pikir, merasakan dan bertindak. Oleh karena itu Soekanto (1977) melihat hubungan antara kebudayaan dan masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat bersepakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan tersebut menjadi suatu yang 'super organik' yang bersifat mengatur dalam bentuk nilai budaya.
2. Kebudayaan mengikat hubungan antar manusia, akan berubah bila masyarakat menghendaki karena merupakan 'collective product'.

3. Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa budaya.

### Perkembangan kebudayaan

Sejarah kemanusiaan menurut perspektif arkeologi modern, terbagi menjadi dua jaman, yaitu jaman *food gathering* (memanfaatkan hasil alam secara liar) dan *food producer* (telah mengembangkan budidaya tanaman dan ternak). Menurut Keesing (1985), perubahan terjadi setelah manusia menemukan cara peleburan logam (*'the first technological revolution'* atau *food producing revolution*) yang terjadi 12 ribu – 10 ribu tahun yang lalu di Timur Tengah selatan laut kaspia utara Irak atau Iran kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Secara singkat perkembangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Zaman	Jenis Masyarakat	Mata Pencarian	Pelapisan Sosial
Palaeolitik/ Batu tua	Kelompok kecil sporadis	berburu, meramu	perbedaan biologis
mesolitik/ batu pertengahan	Kelompok mulai membesar	transisi berburu, meramu ke budidaya pertanian sederhana	diferensiasi sosial/ transisi ke arah pelapisan sosial
Neolitik/ batu baru	Kelompok masy menetap/ sedentary	pengenalan alat logam menimbulkan budidaya pertanian yang lebih maju	pelapisan sosial dan kebudayaan (mulai timbul upacara keagamaan)

Selanjutnya perkembangan pertanian menimbulkan surplus, pelapisan sosial makin tegas (buruh, pedagang, bangsawan) dan rumit (pemilik, penggarap, buruh dll). Akumulasi surplus menimbulkan masyarakat perkotaan yang memasukkan masyarakat desa dalam subordinasinya dalam struktur birokrasi pemerintah (merupakan ciri masyarakat modern).

Namun kebudayaan memiliki ciri khasnya yang unik, aneka ragam dan relatif. Sifat Keunikan, Keanekaragaman dan Relativitas Kebudayaan dapat dijelaskan :

1. Kebudayaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, ide dan artifact yang dipelajari, digunakan dan dipelajari bersama.
2. Kebudayaan dapat dipelajari sebagai fenomena sejarah melalui proses inovasi dan difusi
3. Kebudayaan dapat dipelajari sebagai fenomena regional, dapat menyebar ke regional lain melalui akulturasi, asimilasi dan integrasi.
4. Kebudayaan cenderung berpola, terlihat adanya struktur kebudayaan yang relatif stabil membentuk pola kebudayaan / *'pattern of culture'*
5. Elemen kebudayaan memiliki bentuk dan fungsi yang khas.
6. Kebudayaan bersifat mempersatukan karena adanya nilai, norma dan peraturan dan pantangan yang bersifat integratif.
7. Kebudayaan dapat mengalami perubahan sesuai perubahan perilaku manusia, inovasi dan konfigurasi.
8. Kebudayaan bersifat permanen, terpola atau terstruktur (generalis) namun ada sub-sub yang khas.

9. Kebudayaan adalah suatu continuum (kesinambungan proses), disosialisasikan dari generasi ke generasi berikutnya.
10. Kebudayaan bersifat simbolik, merupakan rangkaian makna dari berbagai simbol yang tidak selalu dimengerti oleh orang dari kebudayaan yang berbeda.

Oleh karena itu suatu kebudayaan mengandung berbagai elemen kebudayaan, misal kebudayaan Indonesia terdiri dari pola kebudayaan Jawa, Sunda, Bali dll. Peradaban (*civilization*) merupakan kesatuan kebudayaan sejenis dan mempunyai pusat dan pinggiran (*periphery*). Masing-masing pola kebudayaan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi kebudayaan memiliki elemen yang relative sama atau sering disebut sebagai elemen kebudayaan yang universal. Menurut beberapa ahli elemen-elemen kebudayaan yang universal adalah:

1. Menurut Kluckhohn (7 elemen), yaitu :

- a. perlengkapan hidup,
- b. mata pencaharian/ekonomi,
- c. sistem kemasyarakatan,
- d. bahasa/media komunikasi,
- e. kesenian,
- f. sistem pengetahuan dan
- g. religi.

Oleh Ralph Linton disebut sebagai *cultural universal* yang ada pada setiap kebudayaan, kemudian dirinci lagi menjadi :

- a. *cultural elemen* (misal: mata pencaharian pertanian lahan basah),
- b. *cultural activities* (mengolah tanah sawah),

- c. *traits kompleks* (membajak dengan kerbau),
- d. *traits* (alat bajak) dan
- e. *items* (mata bajak).

2. Menurut Herkovits (4 elemen), yaitu:

- a. alat-alat teknologi,
- b. sistem ekonomi,
- c. keluarga dan
- d. kekuasaan politik.

3. Menurut Bronislaw malinowski (4 elemen), yaitu:

- a. sistem norma dalam bekerjasama menguasai alam,
- b. organisasi ekonomi,
- c. alat/lembaga pendidikan terutama keluarga dan
- d. organisasi kekuatan dan kekuasaan.

4. Van Doorn & Lammers (1959) membagi menjadi 3 elemen, yaitu Norma, harapan, dan nilai-nilai.

Elemen-elemen kebudayaan ini masing-masing terdapat dalam setiap kebudayaan, hanya mungkin bentuknya yang tidak sama. Masing-masing kebudayaan dengan elemennya menjadikan macam-macam kebudayaan yang ada lebih berwarna dan mewarnai dunia.

### Wujud Kebudayaan

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Gagasan (Wujud ideal), yaitu kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk

tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas (tindakan), yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3. Artefak (karya), yaitu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama:

1. Kebudayaan material, yaitu kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup

barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

2. Kebudayaan nonmaterial (*immaterial*), yaitu kebudayaan yang berwujud ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

### **Pola-pola Kebudayaan**

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang khas yang mungkin tidak ditemui pada masyarakat lainnya. Hal ini terjadi karena pada masyarakat dengan kebudayaan memiliki pola kebudayaannya sendiri. Beberapa ahli mengemukakan tentang pola-pola kebudayaan yang merupakan ciri khas dari masyarakat.

Robert Refield (1953), mengungkapkan bahwa dalam masyarakat terdapat 3 pola dalam kebudayaannya, yaitu:

1. Pola bersikap yang mendapat isi dan pengarahannya dari nilai budaya (panutan hidup) dan pola berfikir yang terdapat dalam Jiwa masyarakat yang bersangkutan.
2. Pola bertindak dan kelakuan dalam kegiatan masyarakat yang tercermin dalam Organisasi dalam masyarakat.
3. Pola sarana benda-benda yang tercermin dari teknologi yang dihasilkan masyarakat tersebut

Dalam bentuk lain Koentjaraningrat (1979) membagi pola-pola kebudayaan menjadi:

1. *cultural system* yang meliputi Kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan dsb

2. *sosial system* yang merupakan kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat
3. Kebudayaan fisik yang merupakan benda-benda hasil karya manusia.

Pola-pola kebudayaan yang disebutkan diatas dimiliki setiap budaya dalam masyarakat yang sudah mapan, artinya pola kebudayaan ini tidak akan ditemukan secara utuh atau hanya sebagian saja pada masyarakat yang masih tradisional. Perbedaan pola kebudayaan pada berbagai tingkatan masyarakat akan menyebabkan perbedaan karakteristik suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, terutama masyarakat desa yang merupakan satu masyarakat yang merupakan satu kesatuan hukum.

### **Karakteristik Masyarakat Desa**

Karakteristik masyarakat desa di perdesaan dapat dilihat dari sisi demografi, Ekonomi, Sosial-budaya dan Psikologi masyarakat atau psiko-sosial. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat desa memiliki karakteristik:

1. Hidup adalah persoalan kelangsungan hidup
  - a. karena ekonomi petani terutama produksi yang rendah
  - b. karena '*rural war*' sangat penting dalam melihat dunia luar.
  - c. karena petani tidak memiliki kontrol dalam keputusan sesuatu dalam kehidupan; keputusan dibuat dari pusat kekuasaan, bisnis, industri, dan pengetahuan. Petani selalu tidak mengetahui bagaimana atau mengapa mereka membuat keputusan

- d. karena itu, petani sangat hati-hati banyak langkah yang keliru dibuat yang dapat menimbulkan kesukaran. Oleh karena itu, petani enggan mengambil risiko.

2. Tanah/lahan adalah dasar utama dalam kehidupan
  - a. produktifitas lahan hampir minimal
  - b. pertanian banyak atau sedikit tradisional
  - c. tidak proporsional kepemilikan kekayaan dan pendapatan
  - d. input dalam penggunaan lahan tidak didapat dengan mudah oleh petani, jika pernah, mereka tidak memiliki kontrol setiap saat.
  - e. tapi pertanian mulai berubah; berubah dalam teknologi, kepemilikan lahan, struktur, kemampuan dan skill (kecakapan).
3. Keluarga dalam jumlah besar dan fokus utama kehidupan sosial
  - a. keluarga inti menjadi tipikal pola
  - b. tiap anggota keluarga memiliki peran
  - c. kawin usia muda menjadi keadaan yang biasa
  - d. keluarga-keluarga yang besar, akibatnya; kematian bayi tinggi, pertumbuhan fisik anak-anak sangat lambat, kesehatan ibu menurun dan skore anak-anak signifikan rendah dalam tes IQ
4. Kehidupan desa adalah mengatur masyarakat sekitar
  - a. tetangga mengubah kehidupan keluarga disamping yang lain memberikan dasar saling membantu, kunjungan sosial dan aktifitas bermain anak-anak.
  - b. individu mengenal mereka sendiri dengan masyarakat

- c. dalam masyarakat, kelompok informal menjadi ada untuk berbagai tujuan, seperti menggosip, malas-malasan, minum-minum, main kartu dan aktivitas informal lainnya.
  - d. kelompok formal juga ada, seperti majlis/dewan desa, dan banyak organisasi lain yang diatur kelompok dari luar (biasanya agen pemerintah)
  - e. kepemimpinan yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat desa memiliki ranking individu dan pola kepemimpinan yang memberi persetujuan tentang sistem ranking. Pemimpin diharapkan menunjukkan peran yang tepat dalam sistem.
5. karakteristik antar hubungan dan psikologi
- a. hubungan personal sangat penting. Oleh karena itu, ada nilai tinggi yang halus dalam hubungan antar personal. Banyak transaksi menjadi didasari oleh hubungan personal yang tinggi.
  - b. Rasa saling tak percaya dan selalu dalam keadaan kelambanan. Semangat Bayanihan menahan fenomena ini sungguh ada dalam wilayah desa. Ini menemukan dalam orang-orang kepercayaan bahwa emuanya baik, seperti pada tanah, kekayaan, kesehatan, kekuasaan dan penyelamatan dan lain-lain. Hal ini diberi kuantitas definit dan dapat mengalami kenaikan. Oleh karena itu, jika ada orang mengalami kenaikan dalam bagian ini, ada hubungan penurunan pada yang lain. Konsekuensinya, penduduk desa menentang perubahan, yang dapat digunakan untuk mengurangi bagian 'roti' atau enggan untuk

- mengalami kenaikan bagiannya untuk ketakutan yang tak menyenangkan dari tetangganya.
- c. Agama dan tahayul sikap penting dalam kehidupan desa. Agama menjadikan manusia menyesuaikan diri apa yang tidak diketahuinya dan tidak terkontrol kekuatan di alam semesta. Ini mengatur dia dalam kekuatan dan membangun tingkah laku yang dapat diterima sesama manusia. Ini meliputi kepercayaan dan pemujaan dan pengorbanan untuk memperoleh kepuasan spiritual dan ini meliputi bagian siapa yang berdiri diantara tempat ibadah. Tahayul mendalam dalam budaya manusia desa. Ini mempengaruhi kepercayaannya, sikap dan perbuatan dalam kehidupan di dunia. Sebagai contoh, orang desa Filipina percaya kontrasepsi dan aborsi sudah terdapat secara alami dan ditakdirkan. Oleh karena itu, pemakaian kontrasepsi akan dapat dihukum oleh hukum alam dan spiritual.
6. Waktu sekarang sangat penting dan masyarakat desa biasanya tidak berkemauan untuk kelambatan hadiah. Orang memiliki perhatian terhadap masa yang akan datang dan sangat respek terhadap masa lalu, tapi sangat tidak interes dengan kejadian masa datang dalam perasaan agama atau mistik. Konsep mengenai waktu teliti dan sedikit terstruktur dibandingkan dengan daerah kota. Mungkin karena itu, upah, sangat sering tidak terlambat. Untuk mereka merubah sikap dan tingkah laku mereka, mereka harus melihat dengan segera keuntungan atau upah. Segera setelah melihat upah, ini adalah yang terbaik. Ini mungkin satu alasan



mengapa rencana (dalam penggunaan teknik) tidak segera diterima umum untuk mencapai sasaran dalam masyarakat desa. Sebagai contoh, uji coba varietas tanaman baru, metode perencanaan keluarga atau proyek pembangunan masyarakat seperti bangunan air, upah yang diberikan terlambat. Upah diberikan berangsur-angsur dan menunggu waktu untuk terwujud. Masyarakat desa hampir tidak berkemauan untuk menunggu keuntungan sebab mereka ditekan oleh masalah memberi makan keluarga mereka, uang untuk pakaian, dan membayar untuk jasa kesehatan dan lain-lain.

7. Karakteristik pendidikan dan komunikasi

- a. Sekolah formal terbatas
- b. tingkat DO tinggi. Banyak hal yang menjadi faktor, seperti:
  1. kualitas yang rendah dari lembaga / fasilitas
  2. kurikulum tidak relevan berhadapan dengan keinginan mereka
  3. jarak yang jauh sebelum mencapai sekolah
- c. Akses informasi terbatas. Kelambanan informasi ini menjadikan desa kurang mengetahui alternatif yang terbaik dan membuat mereka terlambat mempraktekannya. Kondisi mereka dilanjutkan apa yang mereka lihat seperti legitimasi, kecocokan dan pantas. Kontibusi ini membuat mereka tak tertarik dan segan untuk menerima atau respon terhadap ide baru dan kebiasaan baru.
- d. Sistem komunikasi desa selalu melalui pertemuan kelompok informal yang tidak teratur tapi frekuensi tempat dalam desa. Diskusi yang dilakukan

tergantungan dari waktu yang mereka miliki. Selain itu orang-orang informal mentransfer informasi melalui radio yang memiliki banyak saluran. Televisi cepat mereka tangkap. Media cetak selalu memiliki keuntungan daerah. Barang cetakan yang sangat terkenal adalah komik.

- e. Media tradisional tetap populer. seperti media drama rakyat, pertunjukan nyanyian, pertunjukan lawak tetap populer dan dapat diterima. Oleh karena itu mereka baik menangkap informasi.

Berdasarkan karakteristik masyarakat desa diatas baik kondisi fisik dan sosial maka kehidupan masyarakat desa juga memiliki ciri-ciri yang khas pula. Oleh karena itu terdapat perbedaan kepribadian dan perilaku antara orang-orang di perdesaan, terlebih-lebih dengan orang-orang di perkotaan. Menurut Edward (Horton, 1992) ciri tradisional kehidupan desa akan mempengaruhi komunitasnya. Lebih lanjut Edward membagi komunitas kedalam 5 tipe, yaitu:

1. Komunitas desa kecil dengan ladang pertanian yang tersebar di sekitar pusat desa.
2. Komunitas desa terbuka yang tidak memiliki pusat desa
3. Komunitas desa yang sejenis tipenya, meliputi desa nelayan, pertambangan dan desa penggilingan
4. desa bergaris lurus dengan rumah-rumah yang berdiri memanjang jalan dengan ladang pertanian yang panjang dan sempit.
5. Komunitas desa perkebunan.

Ada beberapa ciri tertentu yang dimiliki oleh semua tipe komunitas desa, yaitu:

1. Isolasi, orang desa mengelompokkan diri ke dalam desa-desa kecil yang Madang pertaniannya dapat dicapai dengan berjalan kaki. Kelompok setempat bukan saja terpisah dengan kelompok lain, tetapi keluarga yang satupun terpisah dari keluarga lainnya, karena penduduk yang berjumlah kecil hidup dengan menyebar, maka kontak antar individu jarang terjadi.
2. Homogenitas, dalam kelompok pemukiman cenderung homogen dari segi latar belakang etnik dan budayanya.
3. Pertanian, hampir semua penduduk komunitas desa adalah petani.
4. Ekonomi subsistensi, yang dicirikan dengan tanaman yang diproduksi adalah segala sesuatu yang dikonsumsi.

Oleh karena itu masyarakat di perdesaan sebagai masyarakat agraris memiliki ciri:

1. Memiliki hubungan dengan tanah (dan air), dalam kaitannya dengan usahatani (bersifat *sedentary*)
2. Usahatani keluarga merupakan dasar pemilikan produksi dan konsumsi dan kehidupan sosial
3. Kedudukan sosial dan peranan individu dalam masyarakat antara lain ditentukan oleh faktor luasan penguasaan di bidang pertanian. Tradisi yang dimiliki adalah tradisi kecil (*Little Tradition*) yang menuju pada tradisi besar (*Great Tradition*), sehingga masyarakat di perdesaan sering disebut sebagai masyarakat yang terbelah (*Part Societies*), yaitu masyarakat yang menggunakan kebudayaan besar dan kecil dalam waktu yang bersamaan.

### Konsep Pola Adaptif Ekologi

Terbentuknya kebudayaan dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Kebudayaan perahu tidak akan kita temukan pada masyarakat pedalaman, karena jauh dari laut atau tidak memiliki sungai besar yang dapat digunakan untuk menjalankan perahunya. Tetapi kebudayaan perahu akan kita temukan pada masyarakat yang dekat dengan laut atau memiliki sungai untuk menjalankan perahunya.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa terbentuknya kebudayaan berhubungan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Beberapa pola adaptif terhadap lingkungan akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda pula. Konsep pola adaptif ekologi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Determinisme Lingkungan, yang dikemukakan oleh Friedrich Ratzel. Konsep ini berpendapat bahwa pola kebudayaan terbentuk oleh faktor lingkungan alam. Perbedaan lingkungan alam akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda, misalnya; pada masyarakat eskimo yang memiliki lingkungan alam salju abadi memiliki model pakaian yang berlapis-lapis dan tebal, berbeda dengan pakaian pada masyarakat tropis yang cenderung tipis dan hanya satu atau dua lapis saja.
2. Posibilisme Lingkungan, dikemukakan oleh A.L. Kroeber. Menurut Kroeber alam bukan sepenuhnya membentuk pola kebudayaan, alam hanya merupakan penapis (*screen*) bagi budaya terhadap masuknya budaya lain. Masuknya budaya lain dari daerah yang

memiliki lingkungan alam berbeda tidak seluruhnya ditolak, ada sebagian kebudayaan yang kemudian diadaptasi disesuaikan dengan lingkungan alamnya.

3. Ekologi Budaya, dikemukakan oleh Julian Stewart (1957). Pendekatan ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, *pertama*, adanya kecenderungan untuk mulai menerima pendekatan materialistik, *kedua*, adanya ketidakpuasan terhadap paham yang tengah berkembang bahwa gejala-gejala sosial hanya dapat diterangkan dari segi sosial saja.

Pendekatan ekologi budaya pada dasarnya merevisi pendekatan posibilisme lingkungan. Stewart memperjelas hubungan timbal balik antara kebudayaan dan lingkungan melalui penelaahan dari sudut adaptasi. Dinamika organisasi sosial budaya merupakan produk dari proses adaptasi manusia dan lingkungannya. Konsep ini dilandasi oleh hipotesis Stewart bahwa kondisi lingkungan tertentu akan tumbuh beberapa pranata atau institusi yang berpola tertentu, yang dikenal dengan inti kebudayaan (*cultural core*). Inti kebudayaan dapat merupakan pranata sosial, budaya atau ekonomi. Inti kebudayaan tumbuh berkat adanya teknologi eksploitasi sumber daya dan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pengelolaan sumberdaya.

Keadaan ini akan menempatkan manusia sebagai bagian dari sistem sosial budaya dan sebagai komponen biologis dari biosfer. Hal ini menjadikan manusia, sebagai suatu masyarakat, pada kedudukan yang unik di alam. Masyarakat sebagai suatu sistem

terbuka selalu memberikan keluaran yang diperlukan sebagai masukan oleh sistem kehidupan lingkungannya. Namun dalam proses tarik ulur antara masyarakat dengan lingkungannya tampak bahwa patokan ideal dari masyarakat maupun lingkungan bisa digantikan dan ditinggalkan. Saling ketergantungan antara masyarakat dan lingkungan hidupnya, membentuk kesatuan sistem ekologi (ekosistem).

Steward berpandangan bahwa adaptasi ekologis kultural bukan hanya dimungkinkan oleh lingkungan akan tetapi juga membentuk proses-proses kreatif dan juga ada tingkat keharusan (*degree of inevitability*) dalam terjadinya penyesuaian kebudayaan. Implikasinya adalah bahwa asal dari beberapa aspek budaya tertentu dapat diungkapkan melalui studi hubungan antara kebudayaan dan lingkungannya. Stewart menawarkan 3 prosedur dasar dalam ekologi kultural, yaitu:

1. Hubungan antara lingkungan dengan teknologi produktif atau eksploitatif.
2. Pola tingkah laku yang ada dalam proses eksploitasi terhadap area tertentu dengan menggunakan teknologi tertentu
3. Sejauhmana pola tingkah laku yang dibutuhkan dalam mengekploitasi suatu lingkungan mempengaruhi aspek lain dari budaya.

Pola adaptif masyarakat terhadap lingkungannya selain menghasilkan kebudayaan yang khas juga menghasilkan orientasi masyarakat terhadap alam.

Orientasi Nilai Budaya terhadap Alam seperti dikemukakan oleh Kluckhlon, yang kemudian dikenal dengan sintesa Kluckhlon, yaitu:

1. Pasrah, takluk terhadap alam, yaitu orientasi nilai budaya yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang memiliki kekuasaan besar, sehingga pada masyarakat ini alam seolah memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan dirinya. Pada masyarakat ini pemenuhan kebutuhan makanan baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan hanya diambil dari alam, tanpa usaha untuk melakukan domestikasi dengan merubah alam. Orientasi nilai budaya ini ditemukan pada masyarakat pemburu dan meramu.
2. Menaklukkan alam, yaitu orientasi nilai budaya yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang harus dimaksimalkan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat. Orientasi nilai ini cenderung mengeksploitasi alam seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Alam seolah-olah harus diperas karena alam memang disediakan untuk manusia. Orientasi nilai budaya ini ditemukan pada masyarakat modern yang berorientasi kapitalis.
3. Selaras dengan alam, yaitu orientasi nilai budaya yang menempatkan alam sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya, namun diiringi dengan usaha untuk melestarikan alam sehingga kemanfaatannya dapat secara berkelanjutan dan berkesinambungan

### Tipologi Masyarakat Agraris Menurut Pola Adaptasi Ekologi

Masyarakat agraris, baik masyarakat agraris awal maupun modern (masyarakat pemburu peramu, masyarakat peladang berpindah dan masyarakat petani sawah irigasi) memiliki pola adaptasi yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari budidaya tanaman yang dilakukan, pengolahan lahan, pola tempat tinggal, subsistensi, pola pemukiman dan diferensiasi sosial. Dalam bentuk ringkas dapat dilihat pada Matriks dibawah ini.

	<b>Masyarakat Pemburu Peramu</b>	<b>Masyarakat Peladang berpindah</b>	<b>Masyarakat Petani Sawah Irigasi</b>
<b>Budidaya Pertanian</b>	Domestikasi	Heterokultur "tertutup"	Monokultur tanaman pangan terbuka
<b>Pengolahan tanah</b>	Mempertahankan kelestarian ekosistem	Kesuburan tanah dipulihkan dgn rotasi	Kesuburan tanah dipertahankan dgn irigasi
<b>Tempat tinggal</b>	Berpindah ikuti pergerakan satwa & siklus produksi hutan	Berpindah- pindah mengikuti rotasi ladang	Menetap
<b>Subsistensi</b>	Cenderung Subsisten	Cenderung Subsisten	Cenderung komersial
<b>Pemukiman</b>	Tersebar dlm kelompok kecil	Berkelompok dlm satu lokasi	Berkelompok membentuk desa
<b>Diferensiasi sosial</b>	Relatif tidak ada	Mulai tampak	Tinggi

Suatu masyarakat agraris memiliki karakteristik yang khas yang akan memberikan ciri kebudayaan yang khas pula. Masyarakat agraris yang memiliki hubungan dengan tanah dan air secara erat yang juga berkaitan dengan kedudukan sosial, usahatani bersifat subsisten (keluarga) merupakan dasar pemilikan produksi, konsumsi dan kehidupan sosial. Kondisi yang sekilas merupakan kelemahan masyarakat agraris, sebenarnya merupakan suatu kekuatan tersembunyi masyarakat agraris.

## **Bab IV**

### **Aspek Sosial Desa**

Memahami suatu masyarakat sangat diperlukan dalam upaya melakukan interaksi dengan masyarakat tersebut. Salah satu upaya untuk memahami masyarakat dapat dilakukan dengan memahami secara mendalam bentuk-bentuk proses sosial dalam masyarakat, baik dalam konteks masyarakat luas maupun dalam konteks suatu keluarga yang memiliki norma tertentu. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses-proses sosial dalam masyarakat dan keluarga.

Kemampuan memahami suatu masyarakat sangat diperlukan dalam upaya melakukan interaksi dengan masyarakat tersebut. Keberhasilan dalam memahami masyarakat melalui pemahaman bentuk-bentuk proses sosial dalam masyarakat, baik dalam konteks masyarakat luas maupun dalam konteks suatu keluarga. Untuk memahami proses-proses sosial dalam masyarakat dan keluarga sangat diperlukan dalam upaya memahami suatu masyarakat, terutama masyarakat desa yang memiliki proses sosial khas perdesaan.

#### **Proses Sosial & interaksi sosial**

Manusia dalam bermasyarakat berinteraksi dalam bentuk proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara

berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial yang menjadi obyek adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial (dalam konteks struktur sosial).

Terjadinya proses sosial setelah perorangan atau kelompok yang saling bertemu menyebabkan isi pandang dalam proses sosial bersifat obyektif dan subyektif. Obyektif atau subyektif yang terjadi tergantung pada siapa atau kelompok mana yang saling bertemu. Oleh karena itu faktor terjadinya hubungan sosial dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Adanya hubungan menurut status para pelakunya
2. Adanya hubungan menurut peranan para pelakunya
3. Adanya proses sosial yang dinyatakan dalam hubungan tersebut

Pengetahuan tentang proses-proses sosial dalam masyarakat memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau sering disebut sebagai gerak masyarakat. Pembahasan mengenai proses sosial difokuskan pada bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuk yang tampak apabila perseorangan atau kelompok-kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain terutama dengan menengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Dengan demikian akan diketahui aspek dinamis dan statis dari masyarakat.

Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antar

kelompok manusia maupun antara perseorangan dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

Proses sosial yang timbul dalam Masyarakat sebagai akibat adanya interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin ada dua, yaitu proses sosial yang mendekatkan dan proses sosial yang menjauhkan atau mempertentangkan.

1. Proses yang Asosiatif (*Processes of association*, proses sosial yang mendekatkan)
  - a. Kerjasama (*cooperation*), yang timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Motivasi kerjasama menurut Chitambar (1973) antar lain karena kepentingan pribadi, kepentingan umum, *altruistic* (sifat mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri), tuntutan situasi, gotong-royong, tolong-menolong dan musyawarah. Kerja sama dapat dibedakan menjadi:
    - 1) kerja sama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu bersama yang serta merta yang terjadi secara tiba-tiba dan spontan.
    - 2) kerjasama langsung (*directed cooperation*), yaitu kerjasama yang merupakan hasil dari perintah atasan atau penguasa.
    - 3) kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), yaitu kerja sama atas dasar tertentu.
    - 4) kerjasama tradisional (*traditional cooperation*), yaitu kerja sama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Dalam masyarakat Jawa kerjasama seperti ini digambarkan dengan istilah *gugur*

*gunung, sambat sinambat*, yang memiliki unsur-unsur kerukunan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, Thompson dan Mc Ewen (dalam Soekanto, 1982) membagi menjadi 5 bentuk kerjasama, yaitu:

- 1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong.
- 2) Bargaining, yaitu pelaksanaan erjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
- 3) Ko-optasi (*Co-optation*), yaitu suatu proses penerimaan unsure-unsur baru dalam kepemimpinan dalam organisasi sebagai salah satu cara menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan
- 4) Koalisi (*koalition*), yaitu kombinasi antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
- 5) *Join-venture*, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya; pengusahaan perkebunan kelapa sawit, perfilman, hotel dan sebagainya.

#### b. Akomodasi

Istilah akomodasi dapat dipergunakan dalam dua makna, yaitu menunjuk sebagai suatu proses dan hasil interaksi sosial. Akomodasi yang menunjuk sebagai suatu keadaan hasil interaksi sosial menunjuk pada suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan baru setelah pihak yang berkonflik perbaikan kembali Sebagai suatu proses menunjuk

pada usaha orang atau grup untuk meredakan pertentangan, mencapai kestabilan atau kelangsungan hubungan antar grup.

Tujuan akomodasi disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, antara lain:

- 1) untuk mengurangi pertentangan antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antar kedua pendapat tersebut agar menghasilkan suatu pola yang baru.
- 2) Mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu atau temporer.
- 3) Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan seperti pada masyarakat berkasta.
- 4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah melalui perkawinan campuran atau asimilasi.

Menurut Young & Mack (dalam Soekanto, 1992), akomodasi sebagai suatu proses sosial mempunyai beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Koersi (*coercion*), adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lain. Pelaksanaannya dapat secara langsung

- (secara fisik) maupun tidak langsung (secara psikologis).
- 2) Kompromi (*compromise*), adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan. Dalam kondisi ini salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain, begitu pula sebaliknya.
  - 3) Arbitrasi (*arbitration*), merupakan salah satu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak yang bersengketa.
  - 4) Mediasi (*mediation*), hampir sama dengan arbitrasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga yang netral dalam perselisihan yang bertugas mengusahakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.
  - 5) Konsiliasi (*Conciliation*), adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Dalam konsiliasi ini pihak-pihak yang bersengketa dapat mengadakan asimilasi, misalnya;

perselisihan antara buruh dengan perusahaan, maka dibentuklah panitia tetap untuk menyelesaikan perselisihan dimana wakil perusahaan dan wakil buruh duduk bersama dalam panitia tersebut.

- 6) Toleransi (*Toleration atau tolerant-participation*), yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal, yang mungkin timbul tanpa disadari sebagai bentuk dari sikap yang toleran pihak yang satu terhadap pihak lain.
- 7) *Stalemate*, merupakan bentuk akomodasi dimana pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangan, karena kedua pihak tidak mungkin melakukan gerakan maju atau mundur, misalnya; pada hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai senjata nuklir.
- 8) Adjudikasi (*Adjudication*), yaitu suatu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

#### c. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Asimilasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam



hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial. Proses terakhir dari asimilasi adalah akulturasi.

Dalam proses asimilasi unsur kebudayaan baru yang timbul sebagai akibat pergaulan orang-orang dari kelompok yang berlainan. Unsur-unsur kebudayaan baru tersebut berbeda dengan kedua kebudayaan yang bertemu.. Dengan kata lain dalam asimilasi terjadi kebudayaan baru sebagai akibat interaksi sosial.

Dalam Proses asimilasi akan timbul bila:

- 1) ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan,
- 2) anggota kelompok saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama dan
- 3) kebudayaan masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri

Berbeda dengan asimilasi, dalam akulturasi, unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif dan lama.

Terdapat beberapa faktor yang mempermudah terjadinya suatu asimilasi, yaitu:

- 1) toleransi, yang akan mendorong terjadinya komunikasi yang pada akhirnya akan mempercepat asimilasi.
- 2) kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, karena dapat mentralisir perbedaan-perbedaan pada kebudayaan yang berbeda.

- 3) sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, yang dapat mendekatkan masyarakat-masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut.
- 4) sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, sehingga golongan minoritas juga merasa diperhatikan sama dengan golongan mayoritas.
- 5) persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan sehingga kebudayaan yang satu akan merasa lebih didekatkan dengan kebudayaan lainnya.
- 6) perkawinan campuran atau amalgamasi (*amalgamation*), yang dapat menyebabkan kedudukan masyarakat yang berbeda kebudayaan merasa sejajar atau tidak berbeda dengan masyarakat dengan kebudayaan lain.
- 7) adanya musuh bersama dari luar yang dapat menjadikan kelompok yang berselisih melakukan kompromi untuk bersama-sama menghadapi musuh dari luar tersebut.

## 2. Dissosiatif (menjauhkan, mempertentangkan)

Proses-proses dissosiatif sering juga disebut sebagai *oppositional processes* atau proses oposisi dimana proses ini dapat ditemukan pada setiap

masyarakat walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan system sosial masyarakat yang bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu pola-pola oposisi sering juga disebut sebagai perjuangan untuk tetap hidup (*struggle for existence*).

Pengertian ini dipopulerkan oleh Charles Darwin yang menunjuk kepada suatu keadaan dimana manusia yang satu tergantung pada kehidupan manusia yang lainnya, keadaan mana akan menimbulkan kerjasama untuk tetap bertahan hidup. Usaha-usaha ini terlihat dari upaya manusia untuk 1) melindungi dirinya dari kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, dan 2) usaha manusia melindungi dirinya dari binatang buas dan alam yang keras.

Oposisi atau proses disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Persaingan

Persaingan diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum, yaitu persaingan yang bersifat pribadi atau

perseorangan dan persaingan yang bersifat tidak pribadi.

Tipe persaingan yang bersifat pribadi (*rivalry*) secara langsung bersaing antar pribadi, misalnya untuk mendapatkan kedudukan dalam organisasi. Tipe persaingan yang tidak bersifat pribadi yang langsung bersaing adalah kelompok. Kedua tipe ini menghasilkan beberapa membentuk persaingan, yaitu:

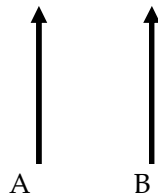
- a. persaingan di bidang ekonomi, yang timbul sebagai akibat terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen. Persaingan bertujuan untuk mengatur produksi dan distribusi agar dapat sebesar-besarnya memberi kemanfaatan pada masyarakat.
- b. persaingan kebudayaan, yang juga menyangkut persaingan di bidang agama, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- c. persaingan mendapatkan kedudukan dan peranan dalam masyarakat, sesuai dengan keinginan perseorangan atau kelompok yang menginginkan dirinya diakui sebagai orang atau kelompok yang memiliki kedudukan serta peranan yang terpendang. Kedudukan dan peranan apa yang dikejar, tergantung dari apa yang paling dihargai oleh masyarakat pada suatu masa tertentu. Sebagai contoh pada masa desa tradisional kedudukan Lurah

sangat dicari masyarakat, namun sekarang sebagai pegawai yang memiliki penghasilan besarlah yang banyak dicari masyarakat desa.

- d. persaingan perbedaan ras, yang sebenarnya persaingan di bidang kebudayaan hanya saja sifat-sifat fisik suatu ras mudah kelihatan dibandingkan dengan ciri-ciri kebudayaan lainnya. Misalnya ketika Afrika Selatan menerapkan politik *Apartheid*, maka orang-orang kulit putih lebih terhormat dibandingkan orang local yang berkulit gelap.

Akibat persaingan dapat bersifat assosiatif maupun dissosiatif. Oleh karena itu Cooley mengindikasikan hasil persaingan terkait dengan 4 faktor, yaitu: kepribadian seseorang, tingkat kemajuan masyarakat, solidaritas kelompok dan disorganisasi dalam masyarakat.

Dalam bentuk sederhana persaingan dapat digambarkan seperti perlombaan lari cepat jarak pendek dimana masing-masing sudah memiliki jalurnya masing-masing.



Persaingan antara A dan B tidak terjadi saling melanggar jalur masing-masing, karena sudah memiliki jalannya masing-masing. Salah satu tanda adanya persaingan adalah dengan tidak adanya kontak antara mereka yang bersaing, tidak adanya kesadaran akan perbedaan kepentingan dan cenderung bersifat pribadi.

- b. Pertentangan atau Konflik (*Conflict*)

Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Akar-akar pertentangan antara lain:

- 1) perbedaan antara individu-individu, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- 3) Perbedaan kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial, terutama yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Sumber konflik dapat berupa penguasaan tanah atau sumber ekonomi, kedudukan atau gengsi sosial politik dan perjodohan-perkawinan.

Pertentangan memiliki beberapa bentuk khusus, yaitu:

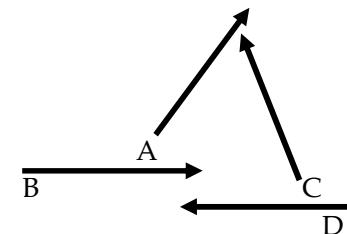
- 1) pertentangan pribadi, yang terjadi antar individu yang saling tidak menyukai.
- 2) pertentangan rasial, yang terjadi antar ras atau suku bangsa yang berbeda.
- 3) pertentangan antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan.
- 4) pertentangan politik yang terjadi antar kelompok dalam satu Negara atau dengan Negara lain yang akan menimbulkan pertentangan yang bersifat internasional.
- 5) pertentangan bersifat internasional yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang merembet kepada kedaulatan Negara.

Pertentangan menyebabkan hal-hal yang buruk, baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan adalah:

- 1) tambahnya solidaritas *in-group*, apabila pertentangan dengan kelompok lain.
- 2) Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok.
- 3) Perubahan kepribadian para individu
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.
- 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Salah satu tanda adanya pertentangan adalah dengan adanya kontak antara mereka yang bertentangan, adanya kesadaran akan perbedaan kepentingan dan cenderung bersifat tidak pribadi.

Dalam bentuk sederhana pertentangan dapat digambarkan seperti orang yang berkampanye dalam politik.



Pertentangan antara A,B, C dan D terjadi saling melanggar jalur masing-masing, karena tidak memiliki jalannya masing-masing.

c. Kontravensi

Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuknya yang murni kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur kebudayaan masyarakat tertentu.

Bentuk kontravensi menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker (1932) adalah:

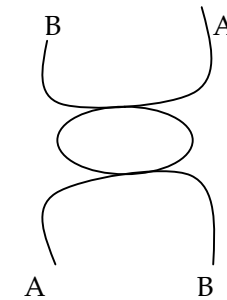
- 1) Umum, yang meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalangi, protes, gangguan, perbuatan kekerasan dan mengacaukan rencana pihak lain.
- 2) Sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat atau selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada pihak lain.
- 3) Intensif, mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus yang mengecewakan pihak lain dan sebagainya.
- 4) Rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat dan sebagainya.

- 5) Taktis, seperti mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain, memaksa pihak lain menyesuaikan diri dengan kekerasan, provokasi, intimidasi dan sebagainya.

Oleh karena letak kontravensi antar persaingan dan pertentangan maka dikenal tipe-tipe kontravensi, yaitu:

- 1) kontravensi antar masyarakat
- 2) antagonisme keagamaan
- 3) kontravensi intelektual dan
- 4) oposisi moral

Salah satu tanda adanya kontravensi adalah sifat agak tertutup atau rahasia dari pihak-pihak yang melakukan kontravensi. Dalam bentuk sederhana kontravensi dapat digambarkan seperti orang yang melakukan perang dingin.



Kontravensi antara A dan B terjadi saling menggunakan metode orang lain dalam

mencapai tujuan sebagai reaksi atas aksi yang dilakukan orang lain.

Pembagian proses-proses sosial kerjasama juga dikemukakan oleh Kimball Young yang membagi bentuk-bentuk proses sosial menjadi:

- 1) oposisi (*oposition*) yang mencakup persaingan (*competition*) dan pertentangan atau konflik (*conflict*)
- 2) kerjasama (*co-operation*) yang menghasilkan akomodasi
- 3) diferensiasi (*differentiation*) yang merupakan suatu proses dimana orang-perorang dalam masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang-orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Diferensiasi tersebut menghasilkan sistem pelapisan dalam masyarakat

Sementara Tamotsu Shibutani membagi beberapa pola interaksi, yaitu:

- 1) Akomodasi dalam situasi-situasi rutin
- 2) Ekspresi pertemuan dan anjuran
- 3) Interaksi strategis dalam pertentangan-pertentangan
- 4) Pengembangan perilaku massa.

Perbedaan fundamental antar apa yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin, Kimball young dan Tamotsu Shibutani tidak ada, kecuali perbedaan-

perbedaan kecil terutama pada daya cakup masing-masing.

Oleh karena itu Analisis Proses sosial dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Van Doorn & Lammers (1959) menegaskan bahwa dalam melakukan analisis sosial perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. satuan analisis: kejadian sosial, interaksi sosial antara 2 orang atau lebih
- b. Dalam interaksi sosial perlu membedakan 3 hal, yaitu: orang-orang yg bertindak (status & peranannya), masyarakat dan pola kebudayaan.
- c. Sejumlah interaksi sosial dapat digolongkan dalam beragam jenis hubungan sosial yang dibina oleh sejumlah orang, pelaku dari 1 atau 2 group
- d. Beragam hubungan sosial tersebut dapat digolongkan dalam beragam proses sosial, yaitu: yang mendekatkan orang (solidaritas) dan menjauhkan orang (antagonistik).

Analisis proses sosial dilakukan untuk mengetahui interaksi yang terjadi dalam masyarakat, sehingga akan diketahui proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Proses-proses sosial tersebut terjadi dalam masyarakat perdesaan di Indonesia. Penyelesaian persoalan dalam interaksi sosial dilakukan dengan melalui dua pendekatan pada masyarakat desa yang berbeda, yaitu:

1. Pada masyarakat desa tradisional yang hanya mengenal hukum adat, dilakukan dengan cara damai mauoun menggunakan hukum adat desa. Sistem penyelesaian dan sanksi dilakukan oleh pemimpin desa adat atau

orang yang dituakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hukum Adat adalah hukum yang menjadi pegangan dalam tindakan-tindakan masyarakat, yang dicirikan dengan jika dilanggar akan dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pada masyarakat desa modern yang telah mengenal hukum positif (hukum negara), Sistem penyelesaian persoalan dilakukan secara hukum desa atau hukum positif, bahkan sampai ke pengadilan.

Baik hukum maupun proses-proses dalam masyarakat keduanya membentuk sebuah kendali sosial (*sosial control*), yang terdiri dari *pengawasan sosial* (yang merupakan sumber hukum normatif yang diacu elit masyarakat yang biasanya berbentuk tekstual/tertulis dan memiliki *asas legalitas* sering disebut juga hukum positif) dan *pengawasan masyarakat* yang merupakan hukum sosiologis yang juga diacu oleh elit masyarakat yang biasanya lebih kontekstual serta memiliki *asas legitimitas* sering disebut juga hukum masyarakat.

### **Keluarga dan Sistem Kekerabatan**

Dalam sosiologi keluarga merupakan suatu sistem sosial yang tertutup, merupakan suatu grup kerabat yang paling kecil yang menggambarkan kesatuan berdasarkan keanggotaan.

Tipe keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga yang bersistem konsanguinal dan konjugal, keluarga orientasi dan prokreasi, serta keluarga batih dan keluarga

luas. Pembedaan tipe-tipe tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan masyarakat setempat.

Keluarga yang bersistem konsanguinal menekankan pada pentingnya ikatan darah, seperti hubungan antara anak dengan orang tuanya. Dalam sistem ini ikatan seseorang dengan orang tuanya dianggap lebih penting daripada ikatan dengan suami atau istrinya, misalnya pada keluarga tradisional Jepang, Cina, Jawa dan sebagainya. Sebaliknya sistem konjugal menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan, dimana ikatan antara suami dan istri lebih kuat daripada ikatan dengan orang tuanya.

Tipe keluarga orientasi (*family of orientation*) menekankan pada keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan. Agak berbeda, tipe keluarga prokreasi (*family of procreation*) merupakan keluarga yang dibentuk dengan jalan menikah dan mempunyai keturunan. Tipe keluarga batih (*nuclear family*) merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Menurut William Goode keluarga batih tidak mengandung hubungan fungsional dengan kerabat dari keluarga orientasi salah satu pihak (ayah atau ibu). Keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga batih. Beberapa tipe keluarga ini diantaranya *joint family*, yang terdiri atas beberapa orang laki-laki kakak beradik beserta anak-anak mereka dan saudara kandung perempuan mereka yang belum menikah. Laki-laki tertua diantara mereka menjadi kepala keluarga manakala ayah mereka meninggal dunia. Clayton (1979) melihat bahwa di India dan Pakistan banyak dijumpai tipe keluarga seperti ini. Selain itu juga terdapat bentuk keluarga luas *virilokal*, yang terdiri atas suatu keluarga batih ditambah keluarga batih para anak-anaknya. Tipe

keluarga seperti ini menurut Danandjaja (1971) banyak dijumpai di Nias.

Keluarga-keluarga di Indonesia juga mengenal aturan-aturan mengenai keturunan yang terdapat dalam Sistem kekerabatan. Dalam penarikan garis keturunan di Indonesia dikenal 4 istilah, yaitu:

1. Patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, seperti; Batak, Bali dan sebagainya
2. Matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak perempuan, seperti Padang Sumatera Barat yang dikenal dengan istilah Ninik Mamak.
3. Bilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki dan perempuan, misalnya; Suku Jawa.
4. Keturunan rangkap, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki secara patrilineal dan dari pihak perempuan secara matrilineal, seperti pada masyarakat dayak di Kalimantan Tengah.

Setelah menikah tempat tinggal yang dipilih oleh pasangan baru tersebut juga mengikuti pola yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Menurut Clayton terdapat 7 adat menetap setelah menikah (dalam Sunarto, 2000) yaitu:

1. Patrilokal, yaitu pasangan yang baru menikah tinggal menetap bersama keluarga pihak laki-laki, seperti di Batak dan Bali.
2. Matri-Patrilokal, yaitu suami mula-mula menetap bersama pihak perempuan tetapi pasangan kemudian menetap dengan pihak laki-laki, seperti kebanyakan desa-desa di Jawa.

3. Matrilokal, yaitu pasangan baru menetap dan tinggal bersama pihak perempuan, seperti di Padang Sumatera Barat.
4. Patri-Matrilokal, yaitu pasangan yang baru menikah mula-mula menetap bersama pihak laki-laki tetapi pasangan tersebut menetap dengan pihak perempuan.
5. Bilokal, yaitu pasangan yang baru menikah dapat memilih tinggal dan menetap di pihak laki-laki atau perempuan.
6. Avunculokal, merupakan pola matrilineal yang didalamnya seorang laki-laki menetap di desa paman dari pihak ibu (kakak laki-laki ibunya).
7. Neolokal, yaitu pasangan suami istri setelah menikah bebas untuk memilih tempat menetap di luar tempat keluarga laki-laki atau perempuan.

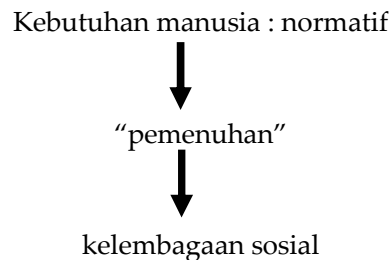
Adanya kelompok kekerabatan di Indonesia mendorong munculnya kolektivitas kekerabatan, baik yang berorganisasi (*clan, marga, trah*, dan sebagainya), maupun yang tidak berorganisasi (*lineage*).

### **Kelembagaan Sosial**

Memahami masyarakat secara utuh tidak dapat dilepaskan dari keharusan untuk memahami Kelembagaan dan Kelompok yang ada di masyarakat. Hal tersebut sangat muthlak diperlukan mengingat dalam suatu masyarakat selalu memiliki kelembagaan dan kelompok sosial. Kelembagaan dan kelompok sosial dalam masyarakat bias jadi lebih kuat dan eksis di masyarakat terutama masyarakat perdesaan daripada kelembagaan dan kelompok formal yang dibentuk atas pihak desa.



Kelembagaan sosial desa timbul sebagai akibat adanya kebutuhan manusia yang bersifat normatif yang harus dipenuhi, seperti; berteman, bekerjasama dan sebagainya. Alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila telah disepakati bersama kemudian dapat dilembagakan dalam suatu lembaga sosial. Secara ringkas dapat digambarkan;



Lembaga Sosial (*Institution*), merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir, meliputi nilai-nilai & tata cara yang dihayati bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Koentjaraningrat (1974), menyamakan makna lembaga sosial tersebut dengan istilah pranata. Sementara itu Mc Iver & Page, melihat adanya *Institution* dalam makna abstrak dan *Assosiation* dalam makna kongkrit.

Dari beberapa pendapat ahli sosiologi dapat disimpulkan bahwa:

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2000)

- b. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada serangkaian aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1974)
- c. Lembaga Sosial adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi maupun sistem sosial lainnya

Perbedaan pendapat ini tidaklah begitu penting dalam memahami kelembagaan, terutama kelembagaan di desa. Menurut Anderson, yang terpenting harus dikaji adalah proses pelembagaannya (*Institutionalization*), yaitu proses terjadinya kelembagaan dalam masyarakat yang mengatur dan membina pola-pola prosedur disertai sanksi-sanksi dalam masyarakat. Proses pelembagaan yang mungkin terjadi mulai dari adanya norma baru sampai norma tersebut dihayati dan akhirnya dilembagakan oleh masyarakat adalah;



Dalam proses pelembagaan yang sudah matang terjadi kristalisasi struktur & kristalisasi pola kebudayaan, sehingga terbentuklah kelembagaan yang mapan dalam masyarakat. Kelembagaan dalam masyarakat terbentuk secara bertahap dalam tingkatan norma, mulai dari tahap sederhana (cara) yang bersifat individu sampai pada adat yang disepakati bersama. Dalam bentuk sederhana tingkatan norma dalam masyarakat serta sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, baik secara moral maupun oleh masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan, dapat digambarkan sebagai berikut;

Tingkatan Norma	Sanksi	
	Moral	Masyarakat
Cara ( <i>usage</i> ), bersifat pribadi	Tidak pantas	Dianggap janggal
Kebiasaan ( <i>folkways</i> ) bersifat umum	Malu	Dicela
Tata Kelakuan ( <i>mores</i> )	Bersalah	Dihukum
Adat ( <i>customs</i> )	Berdosa	Dikeluarkan

Proses penjatuhan sanksi, baik yang bersifat moral maupun sanksi masyarakat juga bertingkat mulai yang paling ringan sampai yang berat. Secara moral sanksi mulai dari dikatakan tidak pantas sampai dianggap berdosa, misalnya, seorang laki-laki yang berambut panjang seperti perempuan dalam masyarakat desa umumnya dianggap sesuatu yang tidak pantas karena berbeda dengan kebanyakan laki-laki desa lainnya, dan sebagainya.

Kasus terjadinya suku Badui dalam dan luar adalah salah satu contoh sanksi yang diberikan oleh suku Badui di Jawa barat terkait dengan pelanggaran terhadap adat masyarakat Badui. Suku Badui luar dikeluarkan dari suku Badui secara adat karena melanggar kesepakatan adat untuk tidak menggunakan barang-barang dari luar suku Badui, seperti; baju, alat masak, alat pertanian dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat Badui yang melanggar adapt dikeluarkan dari suku Badui yang kemudian membentuk apa yang mereka sebut sebagai suku Badui Luar, sedangkan masyarakat badui yang masih asli sering disebut suku Badui Dalam.

Lembaga sosial dalam masyarakat perdesaan memiliki fungsi memberikan pedoman, menjaga keutuhan dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kendali sosial (*sosial control*). Kendali sosial terdiri dari pengawasan sosial dan pengawasan masyarakat. Pengawasan sosial merupakan sumber hukum normatif yang diacu elit masyarakat yang biasanya berbentuk tekstual/tertulis dan memiliki asas legalitas sering disebut juga hukum positif. Pengawasan masyarakat yang merupakan hukum sosiologis yang juga diacu oleh elit masyarakat yang biasanya lebih kontekstual serta memiliki asas legitimitas sering disebut juga hukum masyarakat.

Sesuai dengan fungsinya tersebut maka Gillin & Gillin melihat bahwa Kelembagaan sosial memiliki ciri-ciri :

1. Suatu pengorganisasian
2. Memiliki tingkat kekekalan tertentu
3. Memiliki 1 atau lebih tujuan tertentu
4. Memiliki lambang-lambang

5. Mempunyai alat perlengkapan
6. Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis

Ciri-ciri tersebut menjadikan kelembagaan sosial di perdesaan memiliki tipe yang berbeda-beda berdasarkan sudut penelaahannya, seperti pada gambar berikut:

Sudut penelaahan	Tipe
1. perkembangan	<i>creative institution</i> (tumbuh alami)
	<i>enacted institution</i> (dibuat)
2. Sistem nilai yang diterima masyarakat	<i>basic institution</i> (dasar)
	<i>subsidiary institution</i> (subsider)
3. penerimaan masyarakat	<i>Sosial sanctioned institution</i>
	<i>Sosial unsanctioned institution</i>
4. penyebaran	<i>General institution</i> (umum)
	<i>restricted institution</i> (kelompok ttt)
5. pengendalian	<i>Operative institution</i> (pelaksanaan)
	<i>Regulative institution</i> (mengendalikan)

Selain itu berdasarkan ciri-ciri tersebut maka kelembagaan dalam masyarakat desa dapat digolongkan berdasarkan kebutuhan manusia, yaitu:

Tujuan / Kebutuhan	Lembaga Sosial
Kinship/domestic	Pelamaran, perkawinan, perceraian
Economic	Pertanian, koperasi, industri, perdagangan
Educational	Pengasuhan, pesantren, pendidikan dasar
Scientific	Penelitian, metode ilmiah
Aesthetic & Recreational	Kesenian
Religious	Upacara selamatan masjid, gereja
Political	Pemerintah, partai, demokrasi
Somatic	Kedokteran, olah raga, kecantikan

Desa-desa di Indonesia yang telah tersentuh peraturan desa oleh pemerintah, artinya bukan sebagai desa tradisional tetapi desa modern, pada umumnya memiliki lembaga-lembaga diatas. Beberapa kelembagaan sosial yang penting di Perdesaan:

1. Keluarga batih dan hubungan kerabat (pertalian darah, hubungan perkawinan)
2. Lembaga penguasaan tanah (hak persekutuan, hak perseorangan)
3. Lembaga keagamaan dan sistem kepercayaan
4. Lembaga musyawarah adat
5. Lembaga ekonomi

### Kelompok Sosial

Kelompok sosial merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan manusia berada dalam kelompok sosial. Beberapa ahli sosiologi berusaha megklasifikasi jenis kelompok. Robert Bierstedt (1948), menunjukkan bahwa kelompok sosial harus memiliki 3 kriteria, yaitu:

1. Organisasi
2. Hubungan sosial antar anggota
3. Kesadaran jenis

Berdasarkan kriteria tersebut maka muncullah 4 jenis kelompok, yaitu:

1. Kelompok Asosiasi (*Associational Group*), yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis yang menurut MacIver pada kelompokm ini dijumpai persamaan kepentingan pribadi (*like interest*) maupun

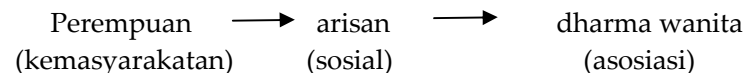
kepentingan bersama (*commond interest*). Selain itu terdapat hubungan sosial antar anggota yang berupa kontak dan komunikasi, contoh; Negara RI, OSIS, Gerakan pramuka, Fakultas, Universitas, Senat Mahasiswa, Partai polotik, Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya.

2. Kelompok sosial (*Sosial Group*), yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan lainnya tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi, contoh; kelompok teman, kerabat, dan sebagainya.
3. Kelompok Kemasyarakatan (*Societal Group*), kelompok yang didalamnya belum ada kontak dan komunikasi dan juga belum ada organisasi. Dalam kelompok ini dijumpai adanya persamaan kepentingan pribadi (*like interest*) tapi bukan kepentingan bersama, contoh; kelompok jenis kelamin (gender).
4. Kelompok statistik (*Statistical Group*), yaitu kelompok yang hanya dalam arti analitis dan merupakan hasil rekaan ilmuan sosial, contoh; pengelompokan poenduduk berdasarkan usia tertentu.

Dalam bentuk sederhana jenis kelompok sosial dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Kelompok	Kriteria		
	organisasi	hubungan sosial	Kesadaran jenis
Statistik	-	-	-
Kemasyarakatan	-	-	✓
Sosial	-	✓	✓
Assosiasi	✓	✓	✓

Seorang individu dapat menjadi anggota beberapa kelompok sosial, missal seorang perempuan yang mengikuti kelompok arisan dan menjadi anggota dharma wanita, maka:



Klasifikasi lain mengenai kelompok sosial dikemukakan oleh Robert K Merton (1965). Merton mendefinisikan kelompok sosial secara sosiologi sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Oleh karena itu suatu kelompok sosial harus memiliki kriteria:

- a. sering terjadi interaksi
- b. orang-orang yang berinteraksi disebut “anggota”
- c. orang-orang yang berinteraksi oleh orang lain disebut sebagai “anggota kelompok”

Berdasarkan kriteria tersebut Merton membedakan antara kelompok sosial dengan kolektivitas. Perbedaan keduanya terletak pada ada tidaknya interaksi.

Perkembangan yang melanda Eropa dan Amerika setelah revolusi industri berpengaruh terhadap perubahan dalam pengelompokkan anggota masyarakat. Beberapa ahli sosiologi melakukan klasifikasi kelompok yang berbeda-beda, antara lain:

1. Emile Durkheim,  
Durkheim membagi kelompok menjadi kelompok yang didasarkan atas solidaritas mekanik dan solidaritas

organik. Solidaritas mekanik menunjukkan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana (masyarakat segmetal). Dalam masyarakat seperti ini kelompok manusia tinggal secara tersebar dan hidup terpisah satu dengan yang lainnya. Masing-masing kelompok dapat memnuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada kelompok lain. Dalam masyarakat yang mengutamakan solidaritas mekanik yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap, perbedaan dalam sikap dan perilaku tidak dibenarkan. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, hati nurani kolektif dan bersifat ekstrem dan memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat represif atau akan dikenai hukuman pidana menurut versi masyarakat.

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesaling-tergantungan antar bagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda. Ikatan utama yang mempersatukan masyarakat adalah kesepakatan yang terjalin diantara kelompok profesi. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat restitutif, namun yang menonjol bukan lagi pidana tetapi perdata. Pelanggar harus membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dilanggarnya.

## 2. Ferdinand Tönnies

Tönnies secara rinci mengulas pengelompokan dalam masyarakat yang dinamakan *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. *Gemeinschaft* digambarkan sebagai

kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif yang merupakan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu ditandai dengan kehidupan organik. Dalam konteks Indonesia sering disebut sebagai masyarakat paguyuban, masyarakat yang guyub atau akrab. Tönnies membedakan *Gemeinschaft* menjadi 3 jenis, yaitu;

- a. *Gemeinschaft by blood*, mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan
- b. *Gemeinschaft of place*, berdasarkan kedekatan letak tempat tinggal serta tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan lebih dekat (intim).
- c. *Gemeinschaft of mind*, yang mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan oleh persamaan keahlian atau pekerjaan serta pandangan.

*Gesellschaft* merupakan suatu nama dan gejala baru, yang dilukiskan sebagai kehidupan publik, sebagai orang yang kebetulan hadir bersama tetapi masing-masing tetap mandiri, sehingga ditandai dengan struktur mekanik. *Gesellschaft* bersifat sementara dan semu. Dalam konteks Indonesia sering disebutkan sebagai masyarakat patembayan, yaitu masyarakat yang dalam interaksi didasarkan pada nilai barang atau uang.

## 3. Charles Horton Cooley

Cooley pada tahun 1909 memperkenalkan konsep *primary group*, yaitu kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerja sama tatap muka yang intim. Runag lingkup yang terpenting kelompok ini adalah keluarga, teman bermain, rukun warga serta komunitas pada orang dewasa. Dalam pandangan kelompok ini pergaulan intim menghasilkan kesatuan dalam banyak

hal, sehingga menjadikan seseorang menjadi hidup dalam tujuan bersama kelompok. Keterpaduan ini oleh Cooley diwujudkan dalam kata “kita”. Kelompok lain yang tidak sama dengan konsep Cooley ini oleh beberapa ahli sosiologi disebut kelompok sekunder (*Sekundary group*).

4. W.G. Summers

Summer berpendapat bahwa masyarakat primitif yang merupakan kelompok kecil tersebar di suatu wilayah muncul diferensiasi antara kelompok kita (*we-group*) atau kelompok dalam (*in-group*) dengan orang lain, kelompok orang lain (*others group*) atau kelompok luar (*Out-group*). Menurut Summers, dikalangan anggota kelompok dijumpai persahabatan, keteraturan dan kedamaian, sedangkan hubungan kelompok diluar kelompok ditandai dengan kebenciandan permusuhan.

5. Robert K Merton

Merton memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa keanggotaan dalam kelompok tidak berarti bahwa seseorang akan menjadikan kelompoknya menjadi acuan bagi cara bersikap, menilai ataupun bertindak. Kadang-kadang perilaku seseorang tidak mengacu pada kelompoknya dimana ia menjadi anggotanya, melainkan pada kelompok lain. Dalam konteks ini dikenal istilah kelompok yang diacu dalam bertindak dan berperilaku (*membership group*) dan kelompok yang diikuti tapi tidak digunakan sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku (*Reference group*).

## Grup Sosial

Secara umum group sosial didefinisikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan diantara mereka terdapat komunikasi 2 arah dan interaksi satu sama lain. Dalam group sosial adanya komunikasi dan interaksi menjadi suatu keharusan untuk membedakannya dengan kolektivitas. Oleh karena itu dalam group sosial memiliki relasi sosial yang berbeda antara group, kolektivitas dan kategori sosial.

Dalam tinjauan relasi group bersifat langsung sehingga terdapat penyebutan “anggota”, pada Kolektivitas relasi bersifat tak langsung sehingga dikenal penyebutan sebagai “warga”, dan pada Kategori sosial relasi group tak ada atau sedikit sehingga tidak terjadi penyebutan sebagai “anggota”. Oleh karena itu menurut Van Dorn & Lammers (1959) group sosial memiliki ciri-ciri :

- 1) keanggotaan yang terbatas,
- 2) norma yang tertentu,
- 3) tujuan tertentu, dan
- 4) latar belakang tertentu.

Berdasarkan cirri dan sifat suatu group sosial tersebut agar suatu grup sosial tetap eksis, maka group sosial tersebut harus memiliki 4 syarat:

- 1) ada kesadaran menjadi bagian dari kelompok
- 2) ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok
- 3) ada satu fakta yang dimiliki bersama oleh sesama anggota kelompok (nasib, kepentingan dll)
- 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku

Berbicara mengenai ciri dan sifat group sosial dapat pula disebutkan proses pembentukan group sosial. Menurut

Koentjaraningrat (1979), terdapat dasar pembentukan grup sosial & prinsip-prinsip hubungan yang mengikat anggota. Dasar-dasar tersebut adalah:

1. Dasar keturunan satu nenek moyang, misalnya; paguyuban trah, marga, clan dan sebagainya.
2. Dasar tempat tinggal bersama/berdekatan, misalnya; rukun tetangga, persatuan warga perumahan dan sebagainya.
3. Dasar kepentingan bersama, misalnya; kelompok dokter, kelompok tani dan sebagainya
4. Dasar program pihak 'atas desa', misalnya, persatuan ibu-ibu PKK, LKMD dan sebagainya.

Dasar keanggotaan group dapat secara terencana seperti; kelompok tani, kelompok arisan dan sebagainya maupun kebetulan, seperti; kelompok narapidana yang kebetulan bersama-sama dalam satu penjara dan sebagainya. Keanggotaan suatu group ini menyebabkan muncullah sifat keanggotaan group yang terbuka & tertutup. Terbuka artinya setiap orang, siapapun, boleh menjadi anggota dan keluar sebagai anggota dan tidak ada persyaratan khusus, misalnya; koperasi serba usaha dan sebagainya. Tertutup berarti tidak semua orang boleh menjadi anggota group, dengan kata lain untuk menjadi anggota group harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya; untuk menjadi anggota kelompok tani harus memiliki lahan yang terletak dalam hamparan yang sama dengan hamparan kelompok tani dan sebagainya.

Dari sisi Kepemimpinan, group sosial dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Kharismatis, tipe kepemimpinan yang cenderung bersifat otoriter atau bertangan besi.
2. Tradisional, cenderung bersikap demokratis, mau menampung dan menerima usulan, saran atau masukan orang lain.
3. Modern, cenderung bersifat pembagian tugas dan fungsional, sehingga lebih bersifat koordinatif atau sebagai koordinator.

Setiap group yang dibentuk mewujudkan komunikasi dan interaksi dalam group dengan memiliki struktur group. Struktur group akan mempengaruhi keeratan hubungan atau interaksi dalam group tersebut atau sering disebut dengan kohesi Grup. Grup memiliki struktur yang menggambarkan hubungan antar pelaku serta proses sosial yang menyertainya. Van Dorn & Lammers (1959) menyebutkan bahwa hubungan status antar pelaku dalam group dapat berupa hubungan dalam tingkatan sosial antar pelaku horisontal atau vertikal? hubungan peran antar pelaku (peranan sosial) : apa peran & keterkaitan peran satu sama lain dan proses sosial yang menyertai, dapat berupa assosiatif atau dissosiatif.

Kohesi grup didefinisikan sebagai keeratan ikatan antar anggota grup. Basis kohesi grup dapat berupa:

- a. Imbalan yang tersedia di dalam dan melalui grup
- b. Kesesuaian tujuan individu & tujuan grup
- c. Ketertarikan antar anggota grup satu sama lain
- d. Arti penting grup sebagai sumber atau dasar identitas individu dan persepsi diri serta internalisasi budaya dan nilai-nilai grup pada individu

Dalam bentuk sederhana hubungan antara kohesi grup dan faktor yang mempengaruhinya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi Kohesi grup	Derajat kohesivitas	
	Tinggi	Rendah
Karakteristik sosial anggota (ciri, norma, latar belakang budaya)	Homogen	Heterogen
Ukuran grup	Kecil (intim)	Besar (kurang intim)
Mobilitas fisik anggota grup (keluar lingkungan grup)	Rendah	Tinggi
Efektifitas komunikasi	Tinggi, penyesuaian diri anggota pada norma perilaku berjalan lancar	Rendah

Dari hubungan derajat kohesivitas group dengan factor yang mempengaruhi dapat dilihat bahwa derajat kohesivitas yang tinggi antar anggota group dapat ditemukan pada ukuran group yang kecil dengan karakteristik anggota yang homogen, sehingga mobilitas fisik anggota menjadi rendah dan komunikasi berlangsung secara efektif, demikian juga sebaliknya untuk group dengan derajat kohesivitas rendah.

### Organisasi Sosial

Organisasi sosial banyak dijumpai di perdesaan yang relatif telah maju. Bereldon & Steiner (1964) mendefinisikan

organisasi sosial merupakan gejala sosial resmi berkaitan dengan seperangkat peraturan-peraturan yang tertulis. Agak berbeda dengan ini, Himes(1967) mendefinisikan organisasi sosial adalah suatu bentuk group yang besarnya maupun cakupan komunikasinya telah melampaui batasan group sosial, sehingga menciptakan bentuk-bentuk hubungan sekunder & formal.

Organisasi sosial memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Sebagai saluran usaha orang dalam memenuhi kebutuhan individu.
- Sebagai saluran kegiatan yang berencana
- Dengan mencapai tujuannya maka suatu organisasi dapat mempengaruhi kepentingan orang banyak dan mendorong pada perubahan sosial
- Sebagai wadah bagi rencana kerja baru yang kemudian dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu Bereldon & Steiner (1964) menyebutkan ciri-ciri Organisasi sosial, yaitu: bersifat formalitas, memiliki Hierarki yang jelas, memiliki Ukuran/ besarnya (*size*) yang tertentu dan memiliki Umur (*duration*) tertentu, tidak selamanya. Oleh karena itu organisasi sosial dapat dibedakan dengan group sosial, yaitu:

Grup Sosial	Organisasi Sosial
Mementingkan kepuasan: Kepuasan moral, Tempat identifikasi diri, kepuasan dalam loyalitas dan berpartisipasi	Mementingkan produktivitas: produktivitas mengatasi masalah, produktivitas menganalisa masalah, meningkatkan output dan efisiensi



Organisasi sosial seperti yang didefinisikan diatas membentuk hubungan sekunder & formal diantara anggotanya. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur hubungan antar anggota organisasi sosial tersebut sebagai suatu sistem Pengendalian dalam organisasi sosial. Amitai Etzioni (1965) menyebutkan bahwa Sistem pengendalian dalam organisasi sosial merupakan sistem integrasi dari organisasi-organisasi modern. Lebih lanjut Etzioni membagi sistem pengendalian organisasi sosial berdasarkan basis otoritasnya dan ciri kepatuhan yang timbul menyertainya menjadi 3, yaitu:

Basis otoritas	Ciri kepatuhan	Contoh
Coercive ( <i>kekuatan memaksa</i> )	Alienatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjara</li> <li>• Kamp konsentrasi</li> <li>• Lembaga Rehabilitasi</li> <li>• Rumah sakit jiwa</li> </ul>
Utilitarian ( <i>kekuatan utiliter</i> )	Kalkulatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan</li> <li>• Serikat buruh</li> <li>• Kantor</li> <li>• Bank</li> </ul>
Normative power ( <i>simbolik</i> ), <i>sosial power</i>	Moral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai politik</li> <li>• Organisasi keagamaan</li> <li>• Universitas</li> <li>• Sekolah</li> </ul>

Sistem pengendalian dalam organisasi sosial diperlukan agar suatu organisasi sosial dapat bertahan selama mungkin. Hal ini disebabkan karena dewasa ini terdapat kecenderungan perubahan dalam organisasi sosial.

Himes (1967) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perubahan dalam organisasi sosial, antara lain:

1. Memudarnya kekerabatan,
2. pertumbuhan spesialisasi,
3. sekularisasi & Rasionalisasi, berkembangnya organisasi massa

Salah satu usaha untuk mengatasi perubahan dalam organisasi sosial orang kemudian merekayasa suatu organisasi yang lebih kompleks, yang dikenal dengan nama birokrasi. Menurut JW Schoorl (1982), terdapat 3 kondisi sosial yang menyebabkan timbulnya birokrasi, yaitu:

1. Proses integrasi (kelompok sosial & kegiatan ekonomi)
2. Pembesaran skala
3. Proses diferensiasi

Max Weber menyebutkan bentuk ideal birokrasi adalah birokrasi *legal-rasional*, yang didalamnya memiliki ciri-ciri:

1. Pembagian kerja dan tanggung jawab yang tegas berdasarkan ketentuan tertulis
2. Prinsip hierarkis dalam pengorganisasian
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh perangkat peraturan yang konsisten
4. Terdapat jenjang karier dan sistem kenaikan pangkat
5. Tugas dijalankan menurut peraturan tanpa pandang bulu
6. Gaji menurut peraturan.

### Politik –Birokrasi sebagai Sistem (Pemerintahan)

Sistem Politik-birokrasi membuat dua sub sistem, sissem politik dan sistem birokrasi. Sistem politik mendapat perhatian utama dengan penentuan kebijaksanaan dan

pembuat kebijaksanaan; sistem birokrasi memberi perhatian pada program pembangunan dan pelaksanaannya. Sistem politik mengubah pejabat yang terpilih, mereka a) Presiden, b) Batasang Pambansa, c) Gubernur dan Sangguniang Panlalawigan; kepala Sangguniang Bayan / Panglunsod; dan pemimpin Barangay dan Dewan Barangay.

Sistem Birokrasi termasuk, a) kementrian/departemen, b) Pegawai negeri yang non departemen, c) pemerintah sendiri dan kerjasama kontrol, d) kantor yang lain, antara nasional dan lokal, dimana posisi menjadi pegangandalam pengangkatan dalam bermacam-macam tingkatan.

Membicarakan birokrasi tidak lepas dari ketertarikan Weber terhadap birokrasi. Weber melihat bahwa birokrasi melambangkan tahapan lain proses rasionalisasi, yaitu suatu proses yang menurut Weber menandai masyarakat modern yang berbeda dengan bentuk-bentuk masyarakat yang 'tradisional'. Penataan ekonomi secara rasional selalu akan membawa serta penataan hubungan sosial secara rasional.

Birokrasi, pada hakekatnya, mengatasimalahkan melepaskan diri manusia dari ketergantungan atas cara-cara kekuasaan tradisional. Untuk memahami perlu ditelaah tentang konsepsi Weber mengenai hakikat kekuasaan dalam bentuk tradisionalnya dan dalam bentuk birokratisnya.

kekuasaan didefinisikan sebagai kemungkinan ditaatinya perintah oleh orang lain pada saat orang lain itu menjadi pihak 'lawan', dapat didekati dengan dua cara. *Pertama*, kekuasaan dipandang terletak dalam individu, segi-segi tertentu telah memberi seseorang suatu

'penampilan berkuasa' dan menyebabkan orang lain menerima perintahnya sebagai sesuatu yang harus diikuti. Oleh Weber ini disebut dengan kekuasaan karisma. Individu tersebut diyakini mendapat bimbingan wahyu, memiliki kualitas yang sakral, jauh dari orang-orang kebanyakan. Menurut Weber rutinitas karisma dapat dipecahkan dengan berbagai cara, yaitu:

1. upaya pencarian orang-orang yang memiliki tanda atau isyarat karisma yang serupa dengan tanda atau isyarat pemimpin yang berkarisma
2. dapat dicari melalui keputusan nubuat, wahyu, nujum atau suratan nasib. Proses seleksi diberi legitimasi dan orang yang terpilih dianugerahi kualitas karisma.
3. menyerahkan keputusan kepada pemimpin berkarisma untuk memilih pengganti.
4. ditetapkan oleh badan atau dewan yang diberi hak menetapkan pemimpin berkarisma, menganugerahi kualitas pemimpin dengan menggunakan upacara khusus.
5. melalui asumsi logis, bahwa secara biologis atau turun temurun karisma dapat diwariskan.
6. melalui pewarisan upacara ritualitas, dengan penobatan.

*Kedua*, kekuasaan yang terletak dalam jabatan atau status yang dipegang oleh individu. 'Orang kuat' tidak harus punya mata yang bersiar-sinar atau suara yang memekakkan telinga, ia hanya memerlukan mandat yang diperlukan untuk suatu kedudukan otoritas tertentu.

Menurut Weber<sup>1</sup>, birokrasi mengandung gagasan-gagasan yang memiliki saling ketergantungan sebagai berikut:

1. suatu norma legal tertentu dapat ditetapkan melalui kesepakatan atau pemaksaan atas dasar alasan kepatutan atau nilai-nilai rasional atau keduanya, disertai dengan tuntutan ketaatan setidak-tidaknya pada sebagian dari anggota kelompok korporasi.
2. Dalam birokrasi, pelaksanaan hukum dianggap terlatak pada penerapan aturan-aturan pada kasus-kasus. Proses administratif merupakan upaya pemenuhan secara rasional kepentingan-kepentingan yang dispesifikasikan dalam tatanan yang mengatur kelompok korporasi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh aturan-aturan hukum yang sah.
3. Dalam birokrasi, orang yang punya otoritas menduduki suatu jabatan. dalam tindakan yang berhubungan dengan statusnya, termasuk perintah-perintah yang dikeluarkannya kepada orang lain, dia tunduk kepada suatu tatanan yang menjadi kiblat bagi semua tindakannya.
4. Orang yang mentaati otoritas berbuat hanya dalam batas kapasitas dia sebagai seorang anggota kelompok korporasi dan apa yang ditaatinya tak lain adalah hukum.
5. Para anggota kelompok korporasi sepanjang mereka taat pada seseorang yang sedang berkuasa, tidak

---

<sup>1</sup> penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada buku karangan Cuzzort and King, alih bahasa oleh Mulyadi Guntur Wasesa, "Kekuasaan, Birokrasi, Harta dan Agama".

menunjukkan ketaatan itu ditujukan kepada pribadi perseorangan tetapi pada tatanan yang impersonal.

6. Dalam suatu birokrasi, organisasi jabatan mengikuti prinsip hirarki, artinya jabatan rendah berada dibawah kontrol dan pengawasan jabatan atasnya.
7. Hanya orang yang memiliki pendidikan teknis yang memadai yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota staf administrasi suatu kelompok yang terorganisasikan secara birokratis, dan oleh karenanya hanya orang-orang seperti itulah yang dapat dipilih untuk menduduki jabatan.
8. Dalam jenis birokrasi yang rasional, ada suatu prinsip yang harus dijadikan pegangan, yaitu bahwa para anggota staf administrasi harus benar-benar terjauhkan dari pemilik alat-alat produksi atau administrasi. Pada dasarnya ada pemisahan sepenuhnya, kekayaan milik organisasi yang dibatasi di lingkungan kantor atau jabatan saja, dan kekayaan pribadi individu yang digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Ada pengaturan pemisahan tempat dimana fungsi-fungsi kepejabatannya dilaksanakan, 'pejabat' dalam artian premise, dengan tempat tinggal para pejabat yang bersangkutan.
9. Tindakan, keputusan dan aturan-aturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis, bahkan dalam kasus-kasus dimana pembicaraan lisan sudah menjadi aturan atau perintah. Ini berlaku setidak-tidaknya untuk diskusi-diskusi pendahuluan dan usulan-usulan, untuk keputusan akhir, dan untuk semua jenis perintah, aturan dan tatanan. Perpaduan antara dokumen-dokumen tertulis dan pengorganisasian fungsi pejabat

secara terus-menerus itulah yang mewujudkan menjadi jabatan, yang merupakan titik pusat perhatian semua jenis tindakan korporasi modern.

Konsep tentang birokrasi menurut Weber<sup>2</sup>, terlihat dari ciri-ciri pokok struktur birokrasi dalam tipe ideal, yaitu:

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terdistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi, melalui pembagian tugas secara tegas.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis; yaitu bahwa unit yang lebih rendah berada dibawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh sistem peraturan yang abstrak dan konsisten dan mencakup penerapan aturan tersebut dalam kasus tertentu.
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas berdasarkan semangat formal dan tidak bersifat pribadi (*sine ira et studio*), tanpa perasaan dendam atau nafsu oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan secara sepihak.
6. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan tipe organisasi administratif yang murni berciri birokrasi. Dilihat dari sudut pandang yang semata-mata teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.

---

<sup>2</sup> penjelasan lebih lanjut terdapat pada buku karangan Peter M Blau dan Marshall W Meyer, "Birokrasi dalam Masyarakat Modern"

Dalam masyarakat modern birokrasi berperan paradoksial, yaitu:

1. Birokrasi menggaris bawahi kenyataan-kenyataan yang tak dapat dihindari bahwa dalam pencapaian sejumlah besar sasaran (produk barang, penyediaan jasa, perlindungan lingkungan dan sebagainya) membutuhkan organisasi.
2. Organisasi forma (birokrasi) ditandai dengan kekakuan dan kemandegan struktural (*Structural statis*), tata cara yang berlebihan dan penyimpangan dari sasaran, sifat yang tak pribadi dan pengabaian serta otomatis dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat.

Dari hal tersebut seolah-oleh birokrasi bermuka dua, yaitu:

1. ancaman terhadap kebebasan, spontanitas dan kemajuan sosial
2. membawa keuntungan baik yang telah dicapai maupun potensial) bagi individu dan masyarakat.

Sementara itu Birokrasi dalam tiga aras yang berbeda, dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Pada aras global, yakni negara-negara atau lembaga-lembaga (biasanya terdapat di negara maju) yang biasanya berperan sebagai pemberi dana bagi proyek-proyek pembangunan di negara dunia ketiga. Bantuan-bantuan yang diberikan, baik secara terbuka maupun tersembunyi melayani kepentingan tertentu dari si pemberi. Bantuan itu tidak hanya untuk dunia ketiga

---

<sup>3</sup> penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada pengantar oleh Arif Budiman dari buku karangan Ph. Quarles Van Ufford, "Krisis Tersembunyi dalam Pembangunan: Birokrasi-birokrasi Pembangunan".

- saja (seperti yang nyaring diteriakkan), tetapi untuk kepentingan birokrasi yang mengelola bantuan tersebut.
2. Pada aras nasional, bantuan-bantuan pembangunan yang datang dari lembaga-lembaga internasional harus melewati birokrasi nasional sebelum mencapai pengelola pembangunan di tingkat lokal. Disinipun muncul kepentingan birokrasi dalam mengelola proyek pembangunan, baik kepentingan ekonomi maupun politik.
  3. Pada pengelola-pengelola proyek pembangunan pada aras paling bawah yang langsung berhadapan dengan konsumen atau target group dari proyek-proyek yang dikelola. Pengelola harus berhati-hati dalam menghadapi birokrat-birokrat lokal yang mengelilinginya. Pengelola seakan terjepit antara kepentingan konsumen yang dilayaninya dengan birokrat lokal.

Dari penjelasan tersebut nampaklah bahwa birokrasi bukan merupakan instrumen yang netral tapi *'beraneka warna'*, yaitu keinginan untuk menyelesaikan tugas seefektif dan seefisien mungkin dalam *'aneka warna'*, setiap warna mewakili kepentingan dari unit-unit birokrasi secara horisontal dan vertikal.

Oleh karena itu Sistem Politik-Birokrasi memiliki karakteristik-karakteristik yang khas, yaitu:

1. Kredibilitas sistem menyuramkan sebab keanehan yang ada dan masa depan, suap dan korupsi dan penyalahgunaan oleh pejabat.
2. *Red Tape* (birokrasi) yang merajalela
3. Menteri berfungsi mengatur
4. Pelaksanaan program tidak sektoral
5. Program/proyek pembangunan pelaksanaannya sangat terpusat
6. Kemampuan teknik individu perseorangan tinggi, tetapi kompetisi profesional & kecemburuan merajalela dan kemampuan manajerial untuk manajemen pembangunan mengalami kelambanan atau tertinggal.
7. Koordinasi dan integrasi jasa sulit tercapai terutama dalam tingkat lapang.
8. Administrator level menengah memberi perhatian prestasi pada masa yang pendek daripada membuat program untuk hasil produksi dalam masyarakat perdesaan.
9. Tekanan program sangat dekat daripada membangun kemampuan masyarakat desa untuk melanjutkan usaha pembangunan.
10. Adanya sindrom bagian prestasi (*quota-of-accomplishment-syndrome*)
11. Tiap pemerintah menjadikan agen organisasi sebagai daerah langganan dalam memberi bantuan tetapi berlawanan antar masyarakat desa.
12. Alokasi bantuan dan proses pembiayaan dilakukan terpusat, dan mempengaruhi dalam sektor program dan dasar proyek. Hasil bantuan untuk proyek/program pembangunan sangat sulit dicapai.
13. Jangkauan jasa pengiriman untuk masyarakat desa terbatas.
14. Sikap personil kondusif untuk kreasi keterbelakangan terbiasa dan/atau berlawanan untuk membangun kemampuan manusia.

## Stratifikasi Sosial

Perkembangan masyarakat yang semakin maju ternyata berimbas munculnya kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang hierarkhis atau berjenjang. Kondisi ini dimulai dengan sistem dalam masyarakat yang mulai mengadakan pembagian kerja. Direrensiasi adalah pembagian dan pembedaan atas berbagai peranan dan fungsi-fungsi berdasarkan pembedaan perorangan karena faktor “dasar” (biologis) dan faktor “ajar” dalam masyarakat. Status seseorang menggambarkan kedudukan seseorang dalam kelompok sosial dihubungkan dengan orang lain dalam kelompok Sosial itu, sedangkan peranan didefinisikan sebagai aspek dinamis dari status. Orang yang memiliki status berbeda akan memiliki peranan yang berbeda pula dalam masyarakat.

Adanya diferensiasi dalam masyarakat menyebabkan munculnya pelapisan-pelapisan dalam masyarakat atau sering disebut sebagai stratifikasi. Stratifikasi adalah suatu tipe diferensiasi yang menunjukkan sistem hierarki sistematis dalam penilaian atas beragam tingkatan pada sejumlah posisi. Beberapa ahli sosiologi barat membuat kriteria Perbedaan stratifikasi / pelapisan masyarakat, antara lain:

1. Karl Marx, membagi pelapisan dalam masyarakat berdasarkan atas penguasaan faktor-faktor produksi (ekonomi), masyarakat dibagi menjadi kelompok *Borjuis* (pemilik faktor produksi) dan *Proletar* (buruh).
2. Max Weber, membagi pelapisan dalam masyarakat berdasarkan ukuran privilese ekonomi, prestise atau kehormatan kekuasaan.

3. Pitirin Sorokin (1959), membagi pelapisan masyarakat berdasarkan Kekayaan, Kekuasaan, kehormatan, Ilmu Pengetahuan.

Pembagian kelompok masyarakat berdasarkan kriteria tersebut mungkin tidak cocok dengan kondisi desa yang memiliki karakteristik khas. Smith & Zopf (1970), mengemukakan adanya dua tipe desa, yaitu:

1. Desa tipe satu kelas (*one-class system*), yaitu tipe desa yang pemilikan lahan warganya rata-rata sama, walaupun ada perbedaan tidak bersifat senjang. Desa tipe ini terdapat dua macam desa yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu:
  - a. Desa tipe satu kelas yang pemilikan lahan warganya rata-rata luas dengan petaninya merupakan petani-petani kelas menengah, pemilik sekaligus penggarap dengan pertanian ukuran keluarga (*family-sized farm*). Tipe desa seperti inibanyak terdapat di Eropa barat laut, Amerika Serikat dan Kanada.
  - b. Desa tipe satu kelas yang pemilikan lahan warganya rata-rata sempit, namun merupakan petani bebas. Secara umum petani-petani kelompok ini merupakan petani kelas bawah, seperti petani yang ada di Haiti.

Pada tipe desa ini akan menciptakan stratifikasi sosial yang tidak tajam, tidak menciptakan struktur sosial yang setegas kasta, mobilitas vertikal merupakan gejala yang biasa , dengan hubungan antar anggota masyarakat

bersifat egaliter, standar hidup yang tinggi dan masyarakat responsif terhadap kemajuan.

2. Desa tipe dua kelas (*two-class system*), yaitu tipe desa dimana sebagian kecil terdapat warganya yang memiliki lahan luas dan selebihnya dalam jumlah besar merupakan warga yang tidak memiliki lahan. Dalam bentuk sederhana dalam tipe desa ini terdapat "*tuan tanah-tuan tanah*". Tipe ini banyak terdapat di Timur Jauh, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Pada tipe desa ini akan menciptakan stratifikasi sosial yang tajam, menciptakan struktur sosial yang sekaku sistem kasta, tidak memberi peluang mobilitas vertikal, terciptanya orang-orang dengan "kepribadian mudah diperintah", standar hidup yang rendah dan masyarakat tidak responsif terhadap kemajuan.

Desa-desanya di Indonesia sebagai masyarakat yang masih bersifat *sedentar* (sangat terikat dengan tanah) dapat mengikuti konsep yang dilakukan oleh Smith & Zopf, namun perlu memperhitungkan beberapa faktor, antara lain :

1. banyak desa yang pemilikan tanahnya bersifat kolektif, menjadi milik desa atau adat (terutama di luar Jawa). Pada desa seperti ini kepemilikan lahan bukanlah merupakan faktor determinan dalam stratifikasi masyarakat.
2. Masih banyak desa-desanya yang penduduknya sangat jarang (Sulawesi, Papua, Sumatera, Kalimantan dan lainnya). Pada desa ini tanah tidak memiliki nilai yang cukup tinggi untuk menciptakan piramida sosial pada masyarakatnya.

Pada masyarakat desa di Jawa, dimana tanah masih merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan pengelompokan masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Menurut Jaspian (dalam Rahardjo, 1999) terdapat 4 pelapisan dalam masyarakat desa di sekitar Yogyakarta, yaitu:

1. *kuli kenceng*, yaitu mereka yang memiliki tanah pekarangan dan sawah.
2. *kuli gundul*, yaitu mereka yang hanya memiliki sawah.
3. *kuli karangkopek*, yaitu mereka yang memiliki pekarangan saja.
4. *indung tlosor*, yaitu mereka yang memiliki rumah saja diatas tanah orang lain.

Pembagian lain dilakukan oleh Ter Haar (1960), yang membagi masyarakat desa menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan pribumi pemilik tanah (*sikep, kuli, baku atau gogol*).
2. Golongan yang hanya memiliki rumah dan pekarangan saja atau tanah pertanian saja (*indung atau lindung*).
3. Golongan yang hanya memiliki rumah saja diatas tanah orang lain dan mencari nafkah sendiri (*num pang*).

Koentjaraningrat (1964), membagi masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Keturunan cikal bakal desa dan pemilik tanah (*kentol*)
2. Pemilik tanah diluar golongan *kentol* (*kuli*).
3. Tidak memiliki tanah.

Namun pada saat ini pembagian golongan tersebut muali berubah. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di

Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2000, masyarakat setempat mengelompokkan anggota masyarakat berdasarkan kepemilikan lahan berdasarkan kepemilikan lahan kering atau tegalan menjadi;

1. *kuli kenceng*, mereka yang memiliki lahan kering lebih dari 1 hektar.
2. *kuli kendho*, mereka yang memiliki lahan kering kurang dari 1 hektar.
3. *kuli*, mereka yang tidak memiliki lahan kering untuk digarap.

Dengan menggunakan istilah struktur sosial, Soekanto (1983), memberikan pengertian sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial dikonsepsikan secara lebih terperinci dengan menjabarkan tentang manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya. Pengertian hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan lebih dikenal dengan pendekatan struktural-fungsional.

Stratifikasi sosial yang membagi manusia kedalam golongan-golongan tertentu memiliki beberapa fungsi. Menurut Kinsley Davis & Wilbert fungsi stratifikasi sosial, adalah:

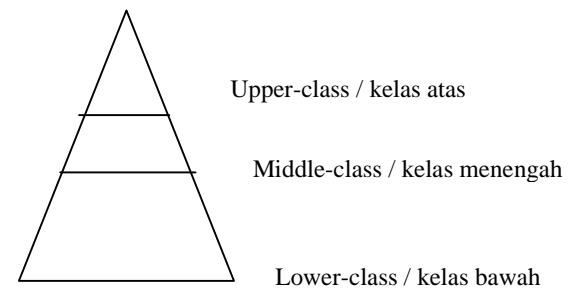
1. Menjelaskan kedudukan seseorang
2. Menunjukkan pada siapa dan antara siapa interaksi sosial harus berlangsung
3. Menegaskan prestasi dan imbalan prestasi bagi tiap strata.

Terkait dengan fungsi stratifikasi sosial diatas yang menggambarkan adanya status dan peranan seseorang dalam masyarakat pasti menimbulkan adanya interaksi dan komunikasi dalam hubungan antar anggota masyarakat maka stratifikasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Stratifikasi terbuka, dimana ada kemungkinan anggota berpindah ke kelompok lain atau ke strata diatas atau dibawahnya.
2. Stratifikasi tertutup, tidak ada kemungkinan anggota berpindah ke kelompok lain.

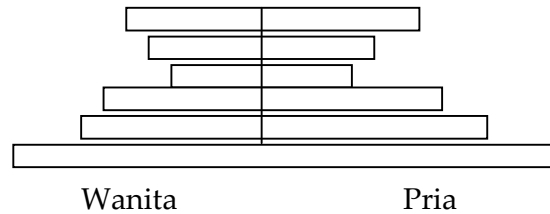
Macam-macam stratifikasi diatas memberikan bentuk stratifikasi yang berbeda-beda. Bentuk stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Stratifikasi sosial secara umum

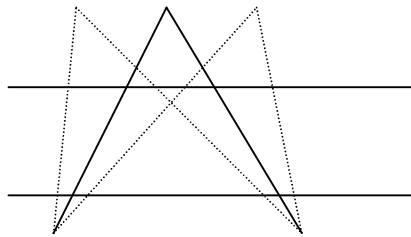




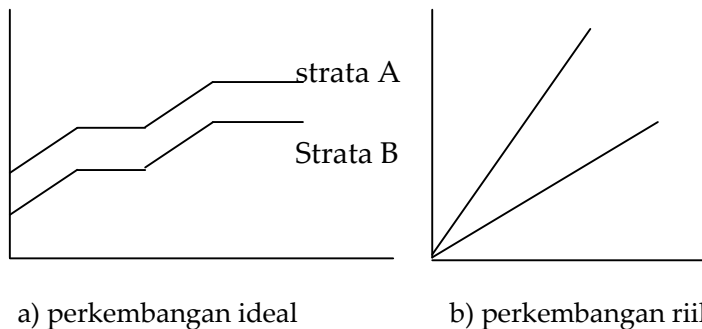
## 2. Stratifikasi demografis (tingkat usia)



## 3. Stratifikasi dalam pergeseran sosial



## 4. Stratifikasi perkembangan masyarakat



Macam-macam stratifikasi sosial diatas akan memberikan ciri-ciri interaksi dan komunikasi yang berbeda pada tiap macam. Untuk melihat sistem pelapisan sosial di desa perlu dilakukan analisis Pelapisan Sosial. Van Dorn & Lammers (1959) , menyebutkan ciri-ciri interaksi & komunikasi dapat ditunjukkan dimensi struktural, yaitu:

1. Jarak soisial, kemungkinan relasi & seberapa jauh dapat “bertemu”
2. integrasi sosial, besar kecilnya keselarasan dalam proses sosial
3. tingkatan sosial:
  - a. arah sepihak dalam interaksi sosial
  - b. pendapat dalam membedakan siapa lebih tinggi/rendah kedudukannya
  - c. perasaan terhadap yang lain sipa yang kurang/lebih
  - d. kemauan untuk berinisiatif atau mengikuti inisiatif orang lain

Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat akan membentuk beberapa tipe Pelapisan. Beberapa tipe pelapisan yang ada di Indonesia adalah tipe kasta, oligarkhis dan demokratis. Tipe pelapisan apabila dikaitkan dengan ciri penentu status individu, mobilitas vertikal dan penguasa tunggal dapat digambarkan sebagai berikut:

Ciri	Tipe-tipe Pelapisan		
	Kasta	Oligarkhis	demokratis
Penentu Status individu	Ascribed status	Ascribed status	Achieved status
Mobilitas vertikal	Tidak terjadi	Terbatas	Mudah terjadi
Penguasa tunggal	ada	Ada	Tidak ada

Dalam berbagai tipe pelapisan sosial dimungkinkan atau tidak dimungkinkan seseorang melakukan mobilitas sosial. Mobilitas Sosial menunjukan pada gejala naik turunnya seseorang, keluarga atau suatu lapisan dalam hierarkhi lapisan, status dan kekuasaan (struktur sosial), baik secara vertikal (berpindah ke yang lebih tinggi atau lebih rendah) atau horisontal (berpindah ke lapisan yang sama). Pendorong atau penahan terjadinya mobilitas menurut Sajogjo (1994) dapat disebabkan oleh sukses atau kejatuhan ekonomi, menang atau kalah dalam konflik, pendidikan, perkawinan, memperoleh tanah garapan dan lain-lain.

Dalam masyarakat agraris beberapa ahli memiliki pendapat yang agak berbeda dalam struktur sosial. Shanin (1975) berpendapat bahwa struktur sosial desa merupakan keadaan khusus bagi daerah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut Shanin menjelaskan bahwa tidak ada konsep lapisan sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan secara tepat kenyataan sosial kelompok petani tertentu, sehingga upaya untuk mengungkapkan struktur kelas masyarakat merupakan masalah yang sulit.

Kesulitan ini ditemukan oleh Beteille (1979) ketika mencoba merumuskan definisi formal tentang kelas dengan cara membandingkan antara berbagai model penafsiran struktur kelas yang ada dengan kenyataan sosial yang ditemukan dalam masyarakat agraris di India. Beteille tidak menemukan satupun definisi formal tentang kelas yang sepenuhnya memuaskan dilihat dari kemampuan untuk menjelaskan gejala sosial tidak hanya secara logis dan konsisten tetapi juga sekaligus menunjukkan secara tajam arti sosiologis kategori-kategori kelas yang dihasilkan oleh definisi-definisi tersebut.

Lebih lanjut Beteille menjelaskan bahwa pembagian kelas dalam masyarakat pada lazimnya mengikuti dua macam pendekatan formal, yaitu pendekatan dikotomi dan pendekatan gradasi. Pendekatan dikotomi mengandalkan adanya hubungan ketergantungan antara dua kategori kelas dalam kaitannya dengan pemilikan, pengendalian, dan penggunaan tanah, seperti hubungan antara pemilik tanah dengan buruh tani. Pendekatan dikotomi memiliki keunggulan dalam hal menunjukkan arti sosiologis dari hubungan-hubungan antara berbagai kategori kelas yang ditampilkan, namun memiliki kelemahan dalam hal menjelaskan konsistensi hubungan antara berbagai kategori tersebut. Sebagai contoh hubungan ketergantungan antara dua kategori kelas dalam kaitannya dengan pemilikan dan penggunaan tanah, seperti hubungan antara pemilik tanah dengan buruh tani. Model pembagian ini tidak mampu menjelaskan bagaimana sifat hubungan antara kategori tersebut bila dihadapkan pada gejala banyaknya pemilik tanah sempit yang relatif terbebas dari ketergantungan

pada pemilik tanah luas dan tidak mempekerjakan atau mengupah buruh tani.

Arti pemilik tanah dalam batas tertentu akan menjadi kabur bila jumlah penyewa tanah tersebar secara meluas. Dalam keadaan seperti ini, penyewa tanah biasanya ditempatkan sebagai kelas menengah yang menjembatani antara pemilik tanah dan buruh tani. Konsep seperti ini ternyata tidak dapat diterapkan secara konsisten dalam kenyataan sosial yang terjadi. Beteille (1979) mencontohkan kenyataan sosial yang berbeda di Uttar Pradesh dan Benggala Utara, dimana kaum *sirdars* (petani penyewa di Uttar Pradesh) menikmati hak-hak yang hanya sedikit lebih rendah daripada hak-hak yang dinikmati kaum pemilik tanah. Sementara kaum *adhiyar* (petani penyewa di Benggala Utara) menikmati hak-hak yang hanya sedikit lebih tinggi daripada hak-hak yang dinikmati kaum buruh tani.

Sementara pendekatan gradasi memiliki keunggulan dalam hal menjelaskan konsistensi hubungan antara berbagai kategori-kategori, namun kategori-kategori yang dihasilkan adalah kategori statistik dan ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga hanya mampu menunjukkan arti sosiologi secara samar-samar. Sebagai contoh dalam gradasi sederhana, bila yang digunakan kriteria adalah luas pemilikan tanah, maka akan diperoleh kategori-kategori kelas yang memudahkan untuk mengungkapkan konsistensi antara kategori-kategori dengan bantuan statistik. Sedangkan arti sosiologis dari kategori-kategori tersebut terlihat samar-samar. Kelompok pemilik tanah 0,5 – 1,0 hektar, misalnya, tidaklah menggambarkan suatu kelompok sosial melainkan kelompok yang ditentukan

sendiri oleh peneliti, selain itu pemilikan tanah dengan luas yang sama akan memiliki arti yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Menghadapi kelemahan model pendekatan formal tersebut, Beteille (1979) mengajukan pendekatan alternatif yakni dengan mensintesis pendekatan yang bertolak dari konsep formal dengan kategori-kategori yang berlaku dengan kenyataan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini bertolak dari kategori-kategori sebagaimana yang dipersepsikan oleh masyarakat bersangkutan. Hubungan antara kategori-kategori dipahami dengan mensintesis antara penafsiran yang diberikan oleh masyarakat bersangkutan dengan konsep-konsep formal pada masyarakat.

Dalam konsep formal masyarakat Jawa, menurut Surjomihardjo (2000) stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat di Yogyakarta sangat bertalian dengan kedudukan kraton dalam struktur sosial di Jawa. Jika digambarkan dalam bentuk kerucut, yang di atas sekali dari sistem pelapisan masyarakat ialah sultan, di bawahnya adalah kerabat kraton (*sentana dalem*), kemudian abdi dalem (*priyayi*) yang bekerja pada administrasi kesultanan maupun pemerintahan dan lapisan terbawah adalah *wong cilik* (rakyat jelata), yaitu pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil (pembersih jalan, pengrajin, tukang delman, tukang bangunan, pegawai rendah, polisi dan sebagainya) atau penduduk yang terletak jauh dari pusat kraton.

Sementara Koentjaraningkat (1964: 363) menyebutkan bahwa di perdesaan Jawa pelapisan sosial dalam masyarakat didasarkan atas pemilikan tanah,

sehingga dibedakan *wong sugih* dan *wong cilik*. Namun perlu dikemukakan pendapat Horton dan Hunt (1990) bahwa selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka sesuatu yang dihargai tersebut akan menjadi benih yang menumbuhkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, sesuatu yang dihargai dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis (kekayaan) seperti tanah, kendaraan, dan mungkin juga keturunan dan keluarga yang terhormat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka untuk menggambarkan struktur sosial pada masyarakat perdesaan didasari atas ukuran privilese ekonomi, ukuran prestise atau kehormatan dan ukuran kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mensintesis pendekatan yang bertolak dari konsep formal dengan kategori-kategori yang berlaku dalam kenyataan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antara kategori-kategori dipahami dengan mensintesis antara penafsiran yang diberikan oleh masyarakat bersangkutan dengan konsep-konsep formal pada masyarakat Jawa.

## **Bab V**

### **Aspek Ekonomi Desa**

Masyarakat desa yang masih kental memiliki budaya sosial, ternyata juga memiliki budaya ekonomi yang khas pula. Kondisi masyarakat dengan karakteristik sosialnya menjadikan masyarakat di perdesaan memiliki sumber pendapatan terutama dari hasil pertaniannya. Hanya saja sebagian besar masyarakat desa masih cenderung mementingkan usaha yang bersifat subsistensi. Semboyan *safety first* (utamakan selamat) ternyata masih menjadi pegangan masyarakat di Perdesaan.

#### **Resiprositas**

Sebagian besar penduduk yang tinggal di perdesaan adalah petani (terjemahan dari *peasant*), yaitu orang yang tidak melakukan usaha di bidang pertanian dalam arti ekonomi. Ciri-ciri ekonomi dan sosial petani di perdesaan mendekati ciri ekonomi orang primitif, yaitu:

1. hasil untuk sendiri atau kerabat
2. tidak ada ketergantungan atau pertuanan
3. kecenderungan membatasi produksi, karena tidak ada rangsangan adanya pertukaran

Ciri pertukaran merupakan kondisi sebelum masyarakat mencapai tradisional dan perdesaan dengan sistem perekonomian subsisten. Dalam antropologi

ekonomi, berbagai pertukaran yang terdapat dalam masyarakat tradisional dan pedesaan yang tidak menggunakan mekanisme uang sering disebut resiprositas atau redistribusi. Namun menurut Polanyi (1968), resiprositas berbeda dengan redistribusi. Meskipun demikian Dalton (1961), melihat pertukaran sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekedar berdimensi ekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik dan organisasi sosial.

Sistem pertukaran mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, kesejahteraan hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem produksi yang dipakai dan sistem perkawinan yang berlaku. Namun beberapa ahli (Polanyi, Dalton, Cook dan Swartz & Jordan) membedakan pertukaran berdasarkan pada harapan-harapan atau motif yang ingin dicapai oleh partisipan dalam melakukan transaksi menjadi 3 pola, yaitu:

1. Resiprositas, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi kebutuhan ekonomi yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
2. Redistribusi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi kebutuhan ekonomi yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
3. Pertukaran pasar, yaitu usaha mendapatkan keuntungan komersial, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar-menawar.

Lebih lanjut dikatakan bahwa resiprositas menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat sederhana dan petani

tradisional, sedangkan redistribusi menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat feodal.

Resiprositas dapat diartikan sebagai pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. Namun Polanyi menambahkan bahwa resiprositas haruslah ada hubungan yang simetri antar pelaku dan adanya hubungan personal diantara mereka. Hubungan simetri adalah hubungan sosial dengan masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung. Sebagai contoh seorang warga desa yang mengundang penduduk lain untuk melakukan kenduri. Pada waktu lain kepala desa juga mengundang warga lain untuk kenduri. Dalam konteks tersebut antara warga dan kepala desa yang sama-sama mengundang kenduri sejajar sebagai kelompok keagamaan, meskipun sebagai warga mereka berbeda dalam derajat kekayaan dan prestise sosial yang berbeda.

Keberadaan resiprositas didukung oleh struktur masyarakat yang *egaliter*, yaitu suatu masyarakat yang ditandai rendahnya tingkat stratifikasi sosial dan kekuatan politik relatif terdistribusi merata di kalangan warganya (Halperin & Dow, 1978). Struktur *egaliter* memudahkan warga masyarakat menempatkan diri dalam kategori sosial yang sama ketika mengadakan resiprositas.

Menurut Sahlins (1974) ada tiga macam resiprositas berdasarkan pola-pola organisasi sosial, ukuran kekayaan dan tipe barang yang dipertukarkan, yaitu:

1. Resiprositas umum, yaitu resiprositas yang terjadi pada individu atau kelompok yang memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Dalam

resiprositas ini masing-masing pihak bahwa mereka akan saling memberi dan percaya bahwa barang atau jasa yang diberikan akan dibalas entah kapan.

Pemberian tidak disertai dengan pamrih, tetapi kedua belah pihak telah dibekali suatu moral bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan tidak harus langsung kepada orang yang memberi kebaikan. Kebaikan antar tetangga dewasa, suatu saat mungkin akan berbalas kebaikan pada anak-anak mereka.

Dalam resiprotas ini tidak ada sanksi hukum yang dengan ketat mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran mungkin akan dinilai sebagai perbuatan dosa, durhaka, tidak jujur, tidak bermoral dan sebagainya. Pelanggaran mungkin akan menerima tekanan moral dari kelompoknya seperti; umpatan, peringatan lisan atau gunjingan yang dapat menurunkan martabat dalam pergaulan dengan kelompoknya.

Sistem resiprositas umum biasanya berlaku pada masyarakat yang memiliki proses-proses sosial-kultural erat diantara anggotanya.

Resiprositas umum terdapat pada :

- a. Dalam masyarakat sederhana, resiprositas umum cenderung memusat di kalangan orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat.
- b. Dalam masyarakat desa agraris resiprositas dijumpai di kalangan kerabat dekat, karena terikat

oleh harta warisan yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

- c. Dalam golongan masyarakat miskin, golongan masyarakat yang memperoleh nafkah tidak tetap, untuk mengatasi kondisi tersebut, misalnya melalui gotong-royong, *sambatan* (desa Jawa).

2. Resiprositas sebanding, yaitu pertukaran yang dilakukan oleh individu dua atau lebih dan kelompok dua atau lebih yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan memiliki nilai sebanding dan disertai dengan kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, kapan menerima dan mengembalikan.

Resiprositas sebanding memiliki fungsi untuk membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi risiko kehilangan barang atau jasa yang dipertukarkan. Namun fungsi sosial tersebut dapat rusak apabila salah satu pihak tidak konsekuen dalam mengembalikan.

Dalam pertukaran ini masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnernya, namun masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan apa yang diterimanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang melakukan transaksi bukan sebagai satu unit sosial dalam satuan sosial melainkan sebagai unit-unit sosial yang otonom. Inilah yang membedakan dengan resiprositas umum, dimana individu atau kelompok merupakan satu unit sosial yang utuh.

Ciri lain resiprositas ini ditunjukkan adanya norma atau aturan atau sanksi sosial untuk mengontrol individu dalam melakukan transaksi (bila melanggar akan mendapat tekanan moral atau hukuman dari masyarakat), dan keputusan untuk melakukan resiprositas berada ditangan masing-masing individu.

Sistem resiprositas sebanding biasanya berlaku pada masyarakat yang memiliki proses-proses sosial-kultural terutama solidaritas personal yang erat diantara anggotanya. Resiprositas sebanding terdapat pada :

- a. Dalam masyarakat tribal, resiprositas sebanding cenderung terjadi pada tingkat komunitas, sementara pada tingkat individu kurang memegang peran.
- b. Dalam masyarakat petani, desa agraris resiprositas dijumpai untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor produksi.

Penelitian White tahun 1976 menunjukkan bahwa proporsi penghasilan penduduk desa di Jawa yang dipakai untuk seremonial sosial relatif cukup tinggi (Kartodirdjo, 1987). Hal ini juga ditemukan penulis dalam penelitiannya di Gunung Kidul mengenai sumbangan atau tradisi *nyumbang*. Tradisi *nyumbang* bagi masyarakat di Gunung Kidul merupakan salah satu cermin kuatnya ikatan solidaritas warga. Sumbangan dari orang lain sangat dibutuhkan, mengingat kondisi geografis Gunung Kidul yang berbukit-bukit dan kering, sehingga merupakan daerah minus, baik minus air maupun minus sumber pangan,

sehingga untuk melakukan suatu hajat, pernikahan, sunatan ataupun yang lainnya, dibutuhkan suatu usaha yang memerlukan waktu lama.

Berdasarkan kondisi seperti diatas maka dapat dimengerti kalau bentuk sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pangan dan air. Bahan-bahan pangan yang dijadikan sumbangan-pun berbeda-beda tergantung jenis hajat. Sumbangan untuk pernikahan berbeda dengan untuk sunatan, meskipun perbedaannya tidak begitu besar. Bahan pangan 'wajib' yang dijadikan sumbangan adalah beras, beras ketan dan jadah , gula pasir, gula merah, kelapa, mie, pisang, daun pisang atau daun jati, bumbu dapur dan tempe atau tahu atau bahan mentah lainnya yang diperlukan bagi kegiatan tersebut. Jumlah sumbangan yang diberikan menunjukkan kedekatan berdasarkan kekerabatan dari pemilik hajat dan status sosialnya.

Sumbangan yang diberikan dicatat oleh orang yang ditunjuk tuan rumah. Hal ini dilakukan untuk pada hari itu juga akan dikembalikan dalam bentuk *ulih-ulih*<sup>4</sup> dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi lengkap kepada penyumbang. Sementara di kesempatan lain apabila penyumbang memiliki hajat

---

<sup>4</sup> Ulih ulih adalah balasan secara langsung dari pemilik hajat pada hari yang sama diberikan kepada penyumbang. Kewajiban memberi ulih-ulih disebabkan karena ibu rumah tangga yang biasanya masak untuk keluarganya sehari-hari penuh ada ditempat orang yang punya hajat untuk *rewang* atau membantu, sehingga tidak sempat memikirkan makan keluarganya. Oleh karena itu agar keluarga orang yang *rewang* tidak terlantar maka keluarga orang yang *rewang* dikirim makanan dalam bentuk yang sudah matang (sudah dimasak).

maka orang yang memiliki hajat akan menyumbang dengan barang dan jumlah yang sama. Orang yang ditunjuk oleh *bekel* ini merupakan orang kepercayaan *bekel* untuk mengontrol terjadinya arus sumbangan dan menjadi acuan bagi tuan rumah untuk bertindak apabila dikemudian hari terjadi gunjingan-gunjingan oleh masyarakat sehubungan dengan sumbangan.

3. resiprositas negatif (pertukaran pasar atau jual beli), yaitu pertukaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat secara ekonomi pasar yang bersifat komersial. Sistem ini muncul setelah sistem ekonomi terintervensi oleh sistem ekonomi barat.

Proses intervensi perekonomian barat menyebabkan hilangnya bentuk-bentuk pertukaran tradisional yang diganti dengan pertukaran modern dan munculnya dualisme pertukaran. Penelitian penulis di Gunung Kidul mengenai tradisi *nyumbang* dengan desa yang sudah mengalami perubahan akibat migrasi tahun 1999 yang dilakukan memberikan gambaran resiprositas tersebut.

Tradisi *nyumbang* bagi masyarakat di Gunung Kidul karena kondisi geografisnya biasanya bentuk sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pangan dan air. Namun di Desa Mulusan dan Sodo, dimana di kedua desa tersebut sumbangan yang diberikan tidak dalam bentuk barang tetapi sudah berganti dalam bentuk uang. Besarnya sumbangan bervariasi, tergantung bentuk hajatan dan kedekatan secara kerabat dari pemilik hajat dan status sosialnya. Besarnya sumbangan berkisar antara Rp 2.500,- sampai

Rp 10.000,-. Meskipun demikian sumbangan dalam bentuk uang ini juga dicatat oleh orang yang diberi kuasa oleh pemilik hajat.

### **Redistribusi**

Redistribusi agak berbeda dengan pertukaran, terutama dalam hal hubungan dalam masyarakat. Pada redistribusi terdapat hubungan asimetris yaitu hubungan yang ditandai adanya individu-individu tertentu yang tampil sebagai pengorganisir pengumpulan barang atau jasa dari anggota-anggota kelompoknya. Setelah terkumpul barang dan jasa tersebut didistribusikan kembali ke dalam kelompok tersebut dalam bentuk barang atau jasa yang sama atau berbeda.

Redistribusi merupakan salah satu bentuk kerjasama individu-individu anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki dan kuasai. Kerjasama tersebut berkaitan dengan masalah-masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kelompok dan sekaligus upaya individu tertentu untuk berperan dalam kelompok.

Dengan demikian redistribusi memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan politik yang khas. Dalam dimensi sosial, hubungan yang terjadi adalah hubungan antar individu sebagai anggota kelompok. Mereka berperilaku bukan mewakili dirinya sebagai pribadi, tetapi mewakili sebagai anggota kelompok. Dalam dimensi ekonomi, redistribusi merupakan pertukaran yang tidak dilandasi motif komersial tetapi sosial sebagai citra dari integritas masyarakat yang terintegrasi secara sentralis. Dalam dimensi politik, individu-individu yang melakukan



aktivitas redistribusi menurut aturan-aturan atau norma yang mengarah pada tindakan untuk kepentingan kolektif dengan cara memusatkan wewenang pada pihak tertentu.

Demikian juga halnya dengan fungsi redistribusi yang kompleks, meliputi fungsi sosial, ekonomi dan politik. Secara sosial redistribusi adalah mengenai kesenjangan dan kecemburuan sosial serta meningkatkan kesejahteraan. Fungsi ini memperlihatkan bahwa redistribusi berpihak pada yang miskin dan masyarakat secara lebih luas. Fungsi politik redistribusi adalah sebagai mekanisme uang untuk memobilisasi kekuatan guna kepentingan-kepentingan politik dan mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat sebagai satu kesatuan

Fungsi ekonomi redistribusi meliputi kerjasama ekonomi yang bersifat simbiosis saling menguntungkan, kerjasama ekonomi yang bersifat eksploitatif, menyelamatkan atau melindungi hasil produksi dari kerusakan yang sia-sia, melindungi anggota masyarakat yang ekonominya lemah, menjamin konsumsi warga masyarakat yang tidak dapat menghasilkan barang, menjamin meningkatkan efektifitas usaha produksi, sebagai sarana untuk menabung dan sebagai mobilitas pertukaran.

### Subsistensi

Setelah suatu desa melalui pertukaran dan redistribusi maka akan mencapai kondisi tradisionil dengan sistem perekonomian subsisten. Pengertian subsisten menurut Wharton (dalam Sairin dkk, 2002), ada dua, yaitu:

1. sebagai tingkat hidup, yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang berfungsi sekedar untuk bertahan hidup.

2. sebagai suatu bentuk perekonomian, yang merupakan suatu system produksi yang hasilnya untuk kebutuhan sendiri, tidak dipasarkan, sedangkan kalau ada produksi yang dipasarkan tidak dimaksudkan untuk mencapai keuntungan komersial.

Ciri-ciri subsistensi masyarakat di perdesaan terlihat dari sumber-sumber pendapatan masyarakat desa, yaitu:

1. Dominan berasal dari hasil pertanian primer
2. Sangat sedikit yang berasal dari bidang luar pertanian, walaupun ada dalam skala rumah tangga.



a) petani dengan lahan garapannya



b) usaha industri emping mlinjo skala rumah tangga

### Dana-dana yang harus dikeluarkan petani

Masyarakat desa yang masih kental memiliki budaya sosial dengan karakteristik sosialnya menjadikan masyarakat di perdesaan berhubungan dan hidup berdampingan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kegiatan-kegiatan sosial yang lebih banyak daripada kegiatan

ekonomi membawa konsekuensi banyaknya presentase pendapatan yang digunakan untuk sosial. Dengan kata lain biaya sosial (*social cost*) akan lebih banyak daripada biaya yang digunakan untuk kegiatan lainnya.

Beberapa dana yang harus dikeluarkan petani di perdesaan antara lain:

1. *Replacement fund*, dana penggantian yaitu jumlah yang diperlukan untuk mengganti peralatan minimumnya. Selain dana untuk keperluan minimum kalori dan surplusnya (untuk benih tahun berikutnya)
2. *Ceremonial fund*, dana seremonial, yaitu dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam hubungan sosial kemasyarakatan.
3. Dana sewa tanah, yaitu dana yang dikeluarkan untuk beban atas kerjanya yang tinggi di ladang. Produksi dana sewa tanah inilah yang membedakan petani perdesaan (*peasant*) dan pencocok tanam (*cultivator*) yang primitif.

Dana-dana yang harus dikeluarkan petani diatas erat kaitannya dengan kedudukan atau tempat kaum tani dalam masyarakat. Eric Wolf menempatkan kedudukan kaum tani yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda, yaitu:

1. Masyarakat primitif, petani sebagai produsen utama kekayaan sosial, dan masyarakat hanya menduduki posisi sekunder.
2. Masyarakat revolusi industri, petani menduduki posisi sekunder, posisi primer digantikan oleh pekerja-pekerja industri.

3. Masyarakat perusahaan pertanian, petani hanya sebagai buruh.

Oleh karena itu petani mengalami dilema dalam berusahatani, yaitu apakah memperbesar produksi atau mengurangi konsumsi? Strategi memperbesar produksi dilakukan pada saat:

1. saat beban tradisional atas dana sewa tanah berkurang
2. saat dapat mengelakkan dari tuntutan-tuntutan yang dikenakan untuk seremonial

Strategi tersebut dilakukan petani dengan tujuan utama adalah untuk menyelamatkan diri dari kondisi yang tidak menguntungkan, baik secara sosial maupun secara ekonomi.

Secara ekonomi dilema tersebut mungkin merupakan suatu akibat dari sistem ekonomi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Sistem ekonomi masyarakat di perdesaan yang tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai petani yang melakukan kerjasama dengan alam. Dalam kontes ini kemudian dikenal istilah ekotipe. Ekotipe adalah sistem pengalihan energi dari lingkungan kepada manusia. Ekotipe memiliki beberapa macam, yaitu:

1. **paleoteknik**, ditandai penggunaan tenaga kerja manusia dan hewan :
  - a. *Long term following system / Swidden*, yaitu sistem dimana tanah yang sudah tandus dibiarkan menganggur untuk jangka waktu tertentu, yang dikaitkan dengan pembakaran hutan untuk membuka tanah dan bercocok tanam dengan menggunakan bajak.

- b. *Sectorial following system*, yaitu sistem tanam sebagian, dimana tanah yang akan ditanami dibagi dua atau lebih, ditanami selama dua-tiga tahun lalu dibiarkan kosong selama 3-4 tahun.
- c. *Shortterm following system*, yaitu sistem tanam bergilir dengan siklus singkat, dimana lahan ditanami selama 1-2 tahun lalu dibiarkan kosong selama 1 tahun
- d. *Permanent cultivation*, yaitu sistem tanam permanen, yang berkaitan dengan teknik-teknik yang menjamin adanya penyediaan air yang permanen bagi tanaman yang sedang tumbuh (sistem hidroulik) misla pada : mediterania dan transalpine
- e. *Permanent cultivation of favored plots*, yaitu penanaman permanen lahan-lahan pilihan, dengan satu jalur tanah di daerah belakang yang dimanfaatkan secara sporadis.

Point **a,b dan c** mempunyai arti penting dalam perkembangan evolusi budaya.

2. **neoteknik**, ditandai besarnya ketergantungan kepada energi yang berasal dari bahan bakar dan kepada ketrampilan-ketrampilan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan. Pertanian ekotipe ini dipengaruhi oleh kemajuan revolusi pertanian kedua yang ditandai oleh :
  - a. pengolahan lahan pertanian sepanjang tahun dibantu oleh pengembangan rotasi tanaman dan penggunaan pupuk buatan,
  - b. perbaikan mutu tanaman dan ternak,

- c. didatangkannya tanaman baru dan kecenderungan spesialisasi regional untuk tanaman tertentu dan
- d. digunakan mesin baru.

Bentuk utama ekotip neoteknik adalah :

- a. *Specialized Horticulture*, hortikultura yang dispesialisasikan, yang bercirikan produksi kebun atau hasil kebun anggur diatas lahan yang depelihara secara permanen.
- b. *Dairy farm*, perusahaan susu, dengan bajak dan siklus rotasi lahan yang pendek.
- c. *Mixed farming*, pertanian campuran, dimana petani memelihara ternak dan bercocok tanam untuk tujuan komersial.
- d. *Crops of the tropic*, hasil perkebunan daerah tropis, seperti kopi, tebu atau coklat.

Bagian lain yang menghubungkan produsen dan konsumen adalah adanya penyedia barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa komplementer, dilakukan oleh :

1. *Sectional markets*, pasar sektional, pasar yang terdiri dari kelompok-kelompok yang terdapat di luar pasar, tapi dalam satu jaringan pertukaran menjadi satu bagian, dan tindakan pertukaran menghubungkan bagian satu dengan bagian lain.
2. *Network markets*, pasar jaringan, jenis pasar yang tidak tergantung kepada interaksi tradisional antara monopoli-monopoli berdasarkan kebiasaan dalam suatu sistem regional yang tertutup.

Penyediaan barang dan jasa tidak dapat dilepaskan dari adanya hak atas tanah atau *domain*. *Domain* adalah hak milik tanah pada tingkat terakhir atau pengawasan atas penggunaan suatu daerah tertentu. Terbagi dalam :

1. *Patrimonial* (feodal), hak yang diturunkan karena warisan
2. *Prebendal* (administratif), hak yang diberikan kepada pejabat yang megutip upeti dari petani dalam kedudukannya sebagai abdi negara
3. *Mencantile*, tanah milik pribadi dan dapat diperjual belikan dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya.

Sistem ekonomi di perdesaan ternyata masih mengandalkan produksi pertanian sebagai sumber utama dengan sektor industri kecil sebagai penambahnya. Memahami sistem ekonomi di Perdesaan memberikan gambaran pada kita bahwa sistem ekonomi yang terjadi masih dipengaruhi oleh budaya sosial masyarakatnya. Tetapi justru hal inilah yang menjadikan masyarakat perdesaan memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan alam dan manusia lainnya

## **Bab VI**

# **Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Desa**

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat memiliki dampak yang beragam pada setiap masyarakat. Efek pembangunan dapat bernilai positif maupun negatif. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan adanya pembangunan muncullah suatu proses percepatan dalam pengembangan masyarakat yang mampu menjadikan suatu masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun kecepatan yang berorientasi paad modernisasi justru membawa nampak yang kompleks bagi masyarakat itu sendiri.

### **Pembangunan dan Modernisasi**

Konsep pembangunan dewasa ini banyak mengalami pergeseran makna dan implikasi. Pembangunan seolah identik dengan modernisasi. SC Dube mencoba melakukan pemikiran kembali atas konsep pembangunan, dimana pembangunan yang difokuskan pada terjadinya ketidakmenentuan, ketidaktetapan dan kontradiksi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang dibuat.

Lebih lanjut Dube melihat bahwa konsep modernisasi dan pembangunan bersamaan arti dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Keduanya menunjuk pada suatu tingkat dari masyarakat, sebab teori modernisasi membedakan antara masyarakat tradisional, transisional dan modern; sementara teori pembangunan membedakan masyarakat sebagai masyarakat terbelakang, sedang membangun dan maju.
2. Keduanya mengartikulasikan seperangkat tujuan tertentu, pada sisi bahwa ide-ide dari modernisasi dan pembangunan keduanya menyajikan sebuah agenda kerja.
3. Kedua konsep tsb menunjuk pada sebuah proses gerakan dari kondisi tradisional menuju modernitas atau dari kondisi terbelakang menuju maju.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan pembangunan dan modernisasi sebagai suatu perubahan. Beberapa ahli yang mendefinisikan pembangunan antara lain:

1. SM Katz (1987) Perubahan kemasyarakatan yang besar dari satu tingkat kesejahteraan ke tingkat berikutnya yang dihargai lebih tinggi.
2. SP Siagian (1997) suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)

Dalam konteks definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke depan atau kearah kemajuan.

Modernisasi juga didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya:

1. Koentjaraningrat (1975), modernisasi merupakan proses mengembangkan sikap mental berorientasi ke masa depan, berhasrat mengeksploitasi lingkungan, menilai tinggi karya manusia dan sikap lain yang sejenis
2. Schoorl, J.W. (1980) mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya.

Dalam konteks definisi diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi bermakna westernisasi.

Tjondronegoro (1978), secara lebih rinci membedakan antara pembangunan dan modernisasi. Modernisasi menurutnya adalah suatu proses merubah tradisi dan condong kepada pembaharuan kebudayaan materiil dahulu (perubahan sikap dan sistem nilai) mengikuti kemudian. Namun Tjondronegoro mendefinisikan modernisasi dalam makna pembangunan dan westernisasi, yaitu:

1. Modernisasi yang bermakna westernisasi, yaitu mengutamakan teknologi dari barat, Nilai-nilai asing diterima seiring dengan kedatangan teknologi itu.
2. Modernisasi yang bermakna pembangunan, yaitu unsur teknologi masih diutamakan dan sedikit banyak diasumsikan bahwa kebaikan-kebaikan teknologi yang didatangkan akan tersalur atau "menetes ke bawah" *invisible hand* (Adam Smith)

Berdasarkan pengertian diatas pembangunan diartikan sebagai perubahan susunan dan pola masyarakat. Dalam konteks ini yang didahulukan bukan teknologi,

melainkan susunan masyarakat dahulu. Perubahan dalam susunan tersebut yang akan merangsang lapisan-lapisan masyarakat berproduksi. Dengan perubahan itu juga sarana pembagian dalam masyarakat akan berubah, pemerataan hasil pembangunan dimantapkan, teknologi akan menyusul perubahan ini. Juga diduga pertumbuhan ekonomi akan lebih pesat akibat produsen utama yang memiliki tenaga kerja mendapat kejutan dan rangsangan baru.

Ciri-ciri perubahan terlihat dari tradisi, dari sikap dan jalan pikiran menghadapi hari depan, dan perubahan dalam arti pembaharuan (ciri dari dari perubahan). Oleh karena itu menurut Tjondronegoro pembangunan bermakna menyusun pola masyarakat baru dahulu (teknologi akan menyusul dengan mudah). Sedangkan modernisasi bermakna tanpa diawali merubah masyarakat, tetapi mengutamakan teknologi.

Samuel Huntington (1976) mengidentifikasi 9 karakteristik proses modernisasi yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses pembangunan, yaitu :

1. Modernisasi dan pembangunan merupakan proses yang revolusioner, sebab secara konsekuensi teknologis maupun kulturalnya sama pentingnya sebagaimana revolusi *neolithic* yang telah membalik masa berburu dan mengumpulkan makanan menjadi pertanian menetap. Yang mengubah kebudayaan agraris menjadi kebudayaan industri kota (menurut Alvin Toffler : dari gelombang pertama menuju gelombang kedua).

2. Proses keduanya sangat rumit dan bersifat multidimensi, menyangkut seperangkat kognitif, perilaku dan modifikasi dan restrukturisasi institusi.
3. Keduanya merupakan proses yang sistematis, variasi pada suatu dimensi akan berdampak kovariasi pada dimensi-dimensi lainnya.
4. Keduanya merupakan proses global, sebab ide-ide dan tehnik diserap dari pusat perubahan menuju bagian lain di dunia.
5. Keduanya merupakan proses jangka panjang. Waktu merupakan unsur penting bagi keduanya, karena tidak ada metode yang diketahui dapat menciptakan keduanya secara seketika.
6. Keduanya merupakan proses yang memiliki fase-fase, pengalaman sejarah mengindikasikan bahwa gerakan mencapai tujuan modernisasi dan pembangunan mengambil tempat melalui fase-fase dan sub-fase-sub fase yang dapat diidentifikasi.
7. Keduanya merupakan proses menuju penyeragaman , yaitu sampai pada titik dimana berbagai tipe masyarakat menjadi semakin seragam sampai dapat membentuk sebuah masyarakat dunia.
8. Keduanya merupakan proses yang tidak dapat balik, karena tidak dapat mundur lagi, yang mungkin hanyalah terjadinya beberapa penurunan yang bersifat temporal.
9. Keduanya merupakan proses yang progresif, karena pada jangka panjang keduanya akan membentuk kehidupan manusia yang beradab baik secara material maupun kultural.

Sebagai kebalikannya ada 3 ciri lain modernisasi dan pembangunan yang dapat diidentifikasi dan ditambahkan yaitu :

10. Keduanya merupakan proses yang menyakitkan, karena menciptakan eksploitasi dari berbagai segmen di masyarakat dan menciptakan pada taraf tertentu ketidakbergunaan.
11. Keduanya merupakan proses yang multilinear, karena berbagai negara ternyata tidak harus melalui jalan yang sama, melainkan berbagai alternatif dapat ditempuh.
12. Keduanya juga tidak dapat dikatakan sebagai berlangsung terus dan tidak pernah berakhir, sebab sangat dikondisikan oleh batas-batas baik dari dalam maupun dari luar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang terkait dengan dilema-dilema pembangunan terutama yang terjadi di negara-negara sedang berkembang sebagai berikut ;

1. *Membangun atau tidak membangun.* Dampak-dampak negatif pembangunan menjadikan beberapa pemikir terutama di dunia ke-3 menganggap pembangunan sebagai musuh nomor 1 dari kehidupan manusia.
2. Pembangunan *endogenous* atau *exogenous*. Faktor pembangunan sangat ditentukan oleh etnis, agama, kebudayaan dan bahasa (*endogenous*) tetapi juga dipengaruhi oleh difusi ide-ide baru, inovasi-inovasi, teknologi dari luar (*eksogenous*).
3. *Menggantungkan pd diri sendiri* atau *saling ketergantungan*. Yang maksudnya apakah pembangunan tersebut akan berdasarkan sudut pandang sendiri atau berdasarkan

sudut pandang orang luar. Cina dan India merupakan contoh untuk kasus pertama.

4. *Pertumbuhan atau pemerataan.* Apakah akan berfokus pada GNP, atau pada kebutuhan dasar, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan jasa-jasa sosial .
5. *Perencanaan terpusat atau bekerjanya kekuatan pasar.* Apakah perlu ada lembaga perencana pusat atau diserahkan pada mekanisme pasar yang bekerja.
6. *Sentralisasi atau desentralisasi.* Yang juga sangat terkait dengan pertanyaan apakah dengan *partisipasi masyarakat* atau dengan *profesionalisme*
7. *Industrialisasi atau kelestarian lingkungan.* Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh negara yang membangun lebih besar dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh negara terbelakang.
8. Hal lainnya adalah seperti pengutamaan pada *industri* atau *pertanian*; *substitusi impor* atau *promosi ekspor*; *bantuan luar negeri* atau *perdagangan*; *perdagangan bebas internasional* atau *integrasi regional plus proteksi* dan sebagainya.
9. Juga apakah berdasarkan *investasi fisik* atau *investasi pada modal manusia*; apakah akan menggunakan *teknologi maju* atau *teknologi tepat guna*; apakah akan bersifat *evolusioner* ataukah *revolusioner*; apakah akan 1 jenis pembangunan atau beberapa pembangunan.

Berdasarkan hal ini maka muncul paradigma modernisasi didasarkan pada 3 asumsi yang merupakan konsep dasar dari modernisasi, yaitu ;

1. Kekuatan sumberdaya alam harus selalu ditingkatkan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kehidupan manusia dan mencapai standar kehidupan yang layak.
2. Menuju hal tersebut harus melalui usaha-usaha baik secara individual maupun bersama-sama, dimana usaha bersama tersebut akan dapat mencapai modernisasi yang lebih tinggi.
3. Untuk menciptakan dan menjalankan organisasi yang rumit butuh kepribadian yang diubah secara radikal, demikian juga struktur sosial dan nilai-nilai budayanya.

Melihat asumsi diatas bagi negara-negara di dunia, terutama bagi Negara sedang berkembang terdapat kendala-kendala menuju modernisasi dalam Negara itu sendiri (faktor internal), yaitu:

1. Kendala-kendala idiologis : Ide-ide modernisasi seperti demokrasi, sekularisme, kapitalisme dan sosialisme sering mendapatkan tantangan.
2. Kendala-kendala motivasi : Hal-hal seperti sikap mental yang tidak mendukung, pencapaian yang rendah, kurangnya disiplin mengakibatkan menyimpangnya modernisasi dari tujuannya semula.
3. Kendala-kendal institusional : Seperti askripsi, partikularisme, aspek afektif yang tidak mendukung terhadap modernisasi.
4. Kendala-kendala organisasi : Pencapaian administrasi sangat terbatas, lemahnya perencanaan dan komunikasi, lemahnya faktor kepemimpinan yang ideal rasional, dsb.

Hal-hal lain yang dikemukakan oleh Dube adalah berbagai kelemahan dalam pendekatan modernisasi terutama bagi pembangunan di negara yang sedang berkembang, seperti :

1. *Kemenduaan* modernisasi seperti bahwa sebenarnya siapakah yang diuntungkan oleh modernisasi, apakah negara maju atau negara berkembang, apakah kelompok kaya atau miskin, dan sebagainya;
2. *Dampak-dampak lingkungan* seperti polusi lingkungan, ketidakseimbangan ekologi, obat-obat pencuci hama, pestisida, eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran, kerusakan lahan dan air, atmosfer, efek rumah-kaca, efek pendinginan dan sebagainya;
3. *Konteks global* ketidakseimbangan konsumsi sumberdaya dunia; Amerika yang hanya 6% penduduk dunia mengkonsumsi 35% sumberdaya dunia. Negara-negara maju yang hanya  $\frac{1}{3}$  dari penduduk dunia mengkonsumsi  $\frac{2}{3}$  sumberdaya alam, sementara negara berkembang dan terbelakang yang  $\frac{2}{3}$  penduduk dunia mengkonsumsi  $\frac{1}{3}$  saja. Untuk melestarikan kepentingannya negara-negara maju tersebut menciptakan hubungan patron-klien (*superordinasi* dan *subordinasi*) baru baik secara militer maupun perdagangan.

Untuk mengatasi hal tersebut Dube menyarankan dibuatnya paradigma baru tentang pembangunan negara ketiga. Paradigma baru tersebut antara-lain ;

1. Perlu adanya penjelasan ekonomis, karena pendekatan-pendekatan ekonomi Barat (model Keynes, Rostow, dan sebagainya) memiliki kelemahan-kelemahan:



- (1) Penjelasan pembangunan ekonomi bersifat parsial, karena tidak memasukkan kolonialisme sebagai sebab yang mengantarkan Barat dalam kondisi ekonomi yang maju saat ini;
  - (2) Tidak menjelaskan latar belakang keterbelakangan negara-negara lain yang sebagian besar disebabkan oleh imperialisme Barat;
  - (3) Hanya mengangkat aturan-aturan yang terbatas tentang tingkat-tingkat pertumbuhan;
  - (4) Tidak cukup sensitif terhadap kemiskinan dan peninjauan kembali atas distribusi ekonomi.
2. Adanya suara-suara ketidaksepakatan terhadap pendekatan tersebut. Mahbub al-Haq (1976) menjelaskan bahwa ;
- (1) Pertumbuhan yang diukur dengan GNP tidak disaring lagi, tentang apa yang dibutuhkan yaitu serangan langsung thd kemiskinan masyarakat banyak,
  - (2) Mekanisme pasar terdistorsi oleh distribusi yang terjadi dari pendapatan dan kesejahteraan, sehingga secara umum tidak realistis untuk digunakan dalam menata tujuan nasional,
  - (3) Perbaikan kelembagaan umumnya terlalu menentukan dibanding tingkat biaya yang sesuai bagi sebuah strategi pembangunan yang relevan,
  - (4) Strategi pembangunan baru harus didasarkan atas pemuasan kebutuhan dasar manusia dibanding permintaan pasar,
  - (5) Gaya pembangunan harus untuk pembangunan yang melayani masyarakat bukan masyarakat yang melayani pembangunan,

- (6) Distribusi dan kebijakan ketenagakerjaan harus merupakan bagian yang integral dari rencana produksi yang mustahil diarahkan untuk memproduksi tanpa mendistribusikan-nya,
  - (7) Unsur penting dalam kebijakan distribusi harus demi peningkatan produktifitas orang miskin melalui perubahan radikal arah investasi menuju kelompok termiskin di masyarakat,
  - (8) Restrukturisasi drastis hubungan kekuasaan ekonomi dan politik harus diarahkan bagi pembangunan mayoritas penduduk.
3. Model internasional strukturalis dapat digambarkan disini untuk melengkapi pandangan tentang perubahan konsep modernisasi, sebagai berikut ;
- (1) Bahwa kondisi keterbelakangan merupakan sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang murni dalam suatu proses evolusi (Dos Santos, 1969).
  - (2) Pembangunan tidak mulus mengalir dari pusat menuju periferi, kadang-kadang malah keterbelakangan muncul disebabkan pembangunan di pusat (Paul Baran, 1962).
  - (3) Pembangunan kapitalis menciptakan dualisme baik pada skala nasional maupun internasional, hubungan yang bersifat superior dan inferior menjadi gejala yang kronis dan *gap* antara keduanya semakin melebar.
  - (4) Dualisme dalam negeri dinegara-negara ketiga membentuk pusat-pusat kecil kemewahan dan kekuasaan yang dikelilingi oleh kemiskinan dan keterbelakangan.

- (5) Bantuan internasional hanyalah cuci-mata belaka, karena tidak akan pernah meningkatkan negara ketiga dari keterbelakangan tetapi mengakibatkan bertambahnya hutang.
- (6) Ketergantungan berakibat juga pada kolonialisme intelektual, sistem pendidikan yang tidak relevan, pertunjukan standar hidup tinggi negara maju menimbulkan pembangunan yang salah kaprah dinegara ketiga.

### Perubahan & Bentuk Perubahan

Perubahan dalam masyarakat merupakan salah satu ciri dinamisasi dalam masyarakat tersebut. Perubahan secara fisik relatif lebih mudah dipahami dan dilihat secara nyata, namun tidak demikian halnya dengan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan dalam sistem sosial yang ada dalam masyarakat.

Sistem sosial dalam masyarakat senantiasa akan berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu perubahan sosial memiliki 2 dimensi, yaitu perubahan dalam :

1. pola budaya ; yang meliputi cara berfikir, nilai, norma, pengetahuan, kesenian, sarana benda-benda dan sebagainya
2. struktur sosial ; yang meliputi organisasi sosial, sistem pelapisan, pembagian kekuasaan, sistem hubungan antar warga masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mana yang menjadi sebab? Mana yang menjadi akibat? Untuk membahas hal tersebut perlu kiranya kita perbandingkan

pendapat para ahli diantaranya Selo Soemardjan dan Lance Castles.

Selo Soemardjan dalam tulisannya *“Perubahan Sosial di Yogyakarta”* (1981), menyebutkan bahwa di Yogyakarta terjadi perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan tulisan lain yang berjudul *“Bureaucracy in Changing Culture”* (1995) yang mengacu pada aspek-aspek yang berubah pada sistem sosial masyarakat, faktor non ekonomi seperti status sosial dan tingkatan.

Sementara Lance Castles dalam bukunya *“Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia”* (1986) menyebutkan bahwa perubahan sosial mengacu pada aspek-aspek yang berubah pada sistem sosial masyarakat, terutama pada struktur masyarakat.

Membaca ketiga tulisan tersebut kita dapat melihat bahwa perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan ideologi politik. Dengan tulisan Selo Soemardjan dalam *“Perubahan Sosial di Yogyakarta”* terlihat lebih luas dalam konsep mengenai perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Secara umum dapat dilihat bahwa konsep mengenai birokrasi dalam ketiga tulisan tersebut mengacu pada Weber, sehingga kita dapat melihat bahwa ketiga tulisan tersebut bernuansa *Weberian*.

Konsep perubahan sosial dan kebudayaan yang dipergunakan dalam ketiga tulisan tersebut pada dasarnya tidaklah berbeda, hanya penekanan yang digunakan

ketiganya agak berbeda. Konsep perubahan sosial yang digunakan Selo Soemardjan dalam “Perubahan Sosial di Yogyakarta” mencakup bermacam perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat, sementara dalam “*Bureaucracy in Changing Culture*” mengacu pada aspek-aspek yang berubah pada sistem sosial masyarakat, faktor non ekonomi seperti status sosial dan tingkatan dan Lance Castles dalam “Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia” mengacu pada aspek-aspek yang berubah pada sistem sosial masyarakat, terutama pada struktur masyarakat.

Konsep perubahan kebudayaan yang dipergunakan dalam ketiga tulisan tersebut pada dasarnya tidak berbeda. Konsep perubahan kebudayaan yang digunakan Selo Soemardjan dalam “Perubahan Sosial di Yogyakarta” terlihat lebih luas karena mencakup tiap perubahan pada salah satu bagian dari keseluruhan kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan tiap kemampuan serta kebiasaan lainnya yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat., sementara dalam “*Bureaucracy in Changing Culture*” perubahan kebudayaan hanya mengacu pada nilai-nilai budaya terutama aspek-aspek hukum dan pemberdayaannya dalam pemerintahan di Indonesia dan Lance Castles dalam “Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia” mengacu pada aspek-aspek yang berubah pada budaya masyarakat, terutama pada pola kebudayaannya.

Selain itu ketiga tulisan memandang birokrasi menjadi pelopor perubahan atau sebagai “*agents of change*” dan perubahan yang terjadi menurut Selo Soemardjan dalam “Perubahan Sosial di Yogyakarta” menyebabkan penyesuaian kelembagaan dan penyesuaian perorangan, sementara dalam “*Bureaucracy in Changing Culture*” berpengaruh pada pelaksanaan hukum dan peraturan negara lainnya dan Lance Castles dalam “Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia” berpengaruh sebagai pusat dalam kegiatan pembangunan dan dalam pengendalian masyarakat.

Posisi birokrasi dalam perubahan sosial dan kebudayaan menurut ketiga tulisan tersebut sedikit berbeda. Menurut Selo Soemardjan dalam “Perubahan Sosial di Yogyakarta” sebagai pelopor perubahan dan juga terpengaruh oleh tekanan-tekanan sosial yang menyertai proses perubahan awal dan lebih sering menimbulkan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Tekanan-tekanan yang muncul yang menyertai proses perubahan awal menjadi penentu dalam tindakan dan posisi mana yang akan ditempati oleh birokrasi, sehingga birokrasi tetap menemukan eksistensi dirinya dan tidak terkena dampak yang fatal dalam kedudukannya sebagai birokrat. Sementara dalam “*Bureaucracy in Changing Culture*” Selo Soemardjan memandang birokrasi sebagai pendorong pelaksanaan hukum yang sangat berpengaruh pada perubahan sosial yang berhubungan dengan penerapan birokrasi di Indonesia. Sehingga terkesan pihak birokrasi ‘menciptakan’ hukum untuk kepentingan dirinya, meskipun hukum yang diciptakannya ‘diberi label’ dengan nuansa berpihak pada hukum itu sendiri (hukum sebagai

superioritas). Sementara menurut Lance Castles dalam “Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia” birokrasi mendorong perubahan-perubahan pada struktur masyarakat dan pola kebudayaannya, dimana birokrasi di Indonesia sangat berpengaruh pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini ditekankan faktor legitimasi atau pengesahan warga masyarakat sebagai unsur utama dalam pembentukan tertib sosial, sehingga pembangunan dapat menarik partisipasi masyarakat.

Ketiga tulisan diatas melihat bahwa terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, baik dalam dimensi struktural maupun kultural. Himes (1967), menyebutkan ada 5 dimensi struktural dalam perubahan sosial, yaitu:

1. bertambah/berkurangnya isi peranan (dalam aspek perilaku & wewenang)
2. bertambah/berkurangnya sejumlah peranan atau kategori peranan
3. pergeseran lokasi peranan atau kategori peranan
4. Modifikasi saluran komunikasi antara peranan atau kategori peranan
5. Perubahan jenis dan fungsi yang dilakukan oleh strukturnya.

Perubahan Struktural ini bagi masyarakat desa akan menyebabkan perubahan struktur desa yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan:

1. struktur fisik desa (pola pemukiman): cenderung mengelompok, sebagai suatu unit kesatuan komunitas kecil.

2. Desa menjadi menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi yang lebih besar.
3. Struktur biososial: perimbangan kedudukan wanita & laki-laki
4. Struktur sosial: terjadi polarisasi sosial.

Sementara dimensi kultural dalam perubahan sosial ada 3, yaitu:

1. Inovasi kultural, melalui *invention* (penemuan, kombinasi baru atau cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada), *tentation*, *borrowing* (meminjam kebudayaan lain untuk digunakan dalam budayanya sendiri).
2. Diffusi, dengan *conscious diffusion* dan *cultural drift*
3. Integrasi dengan menolak bentuk baru, menduplikasi bentuk lama dan baru dalam pola variabel tertentu dan menempatkan bentuk lama ke dalam bentuk baru.

Perubahan Kultural dalam konteks ini merupakan perubahan dari kebudayaan pola tradisional ke modern. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya perubahan ;

1. desa dengan derajat isolasi tinggi akan memiliki resistensi tinggi terhadap kebudayaan modern.
2. desa dengan derajat isolasi rendah (terbuka) akan lebih mudah mengalami perubahan oleh kebudayaan modern.

Namun perubahan yang akan terjadi dapat mengalami hambatan atau bahkan kegagalan dalam perubahan. Soekanto (1982), menyebutkan ada 9 faktor yang menghalangi terjadinya perubahan, yaitu:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
3. Sikap masyarakat yang sangat teradisionil

4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat.
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan akan integrasi kebudayaan.
6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup.
7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
8. Adat atau kebiasaan
9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

### Modernisasi Hubungan-hubungan Sosial

Smelser (1966) dalam *The Modernization of Sosial Relation* melihat bahwa Persoalan pembangunan ekonomi menjadi pemikiran para pemimpin negara-negara baru dan dipersoalkan oleh para pembentuk garis kebijaksanaan di negara-negara yang telah maju; dan juga sangat menarik para ahli ilmu-ilmu sosial, yang mencoba menemukan faktor-faktor yang menimbulkan perubahan yang tengah merevolusikan dunia masa kini.

Ide pembangunan ekonomi telah menjadi sangat biasa dalam pandangan pertengahan abad kedupuluh, maka dianggap sebagai suatu proses yang sederhana dan utuh. Tetapi pembangunan ekonomi tidaklah sederhana dan utuh. Apabila kita memakai istilah ini maka sekurang-kurangnya ada empat proses yang berbeda tetapi saling berhubungan yaitu:

- (1) Dalam bidang teknologi, suatu masyarakat yang sedang berkembang sedang mengalami perubahan

dari penggunaan tehnik-tehnik yang sederhana dan tradisional ke arah penggunaan pengetahuan ilmiah.

- (2) Dalam bidang pertanian, masyarakat yang berkembang itu sedang beralih dari pertanian sederhana ke arahh produksi hasil pertanian untuk pasaran.
- (3) Dalam bidang industri, masyarakat sedang mengalami suatu peralihan dari penggunaan tenaga manusia dan binatang ke industrialisasi yang sebenarnya atau orang-orang yang bekerja untuk upah pada mesin-mesin yang digerakkan oleh sumber tenaga.
- (4) Dalam susunan ekologi perkembangan masyarakat bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan-pemusatan di kota.

Keempat proses ini tidak selalu --walaupun sering-- bekerja serentak selama proses pembangunan. Hasil pertanian dapat diperdagangkan tanpa adanya suatu perubahan yang berarti dalam bidang industri seperti halnya di daerah-daerah jajahan dahulu tatkala para penjajah berusaha meningkatkan produksi bahan mentah, Industrialisasi dapat terjadi di daerah perdesaan seperti halnya pada masa awal industrialisasi di Inggris dan di beberapa tempat di Asia.

Dan kota-kota dapat saja meluas sekalipun tidak terdapat industrialisasi yang berarti, seperti yang terjadi di beberapa bagian di Asia dan Afrika. Pelajaran yang dapat kita tarik dari tinjauan di atas ialah bahwa sebab-sebab, arah dan akibat-akibat dari pembangunan ekonomi itu akan Sangat berbeda-beda di negara yang satu dan di negara yang lain.

Selain itu pembangunan ekonomi adalah satu aspek saja dari serangkaian perubahan masyarakat yang dialami oleh negara-negara baru. Istilah "modernisasi" - suatu konsep yang sekulera dengan istilah 'pembangunan ekonomi' tetapi lebih luas jangkauannya - menunjukkan bahwa perubahan-perubahan teknik, ekonomi dan ekologi berlangsung dalam keseluruhan jaringan sosial dan kebudayaan. Dalam suatu negara yang baru timbul tentu ada perubahan-perubahan yang besar dalam beberapa hal, yaitu;

- (1) dalam bidang politik sewaktu sistem-sistem kewibawaan suku dan desa yang sederhana itu digantikan dengan sistem-sistem pemilihan umum, kepartaian, perwakilan dan birokrasi pegawai negeri
- (2) Dalam bidang pendidikan, sewaktu masyarakat berusaha mengurangi kebutuhurufan dan meningkatkan ketrampilan-ketrampilan yang membawa hasil-hasil ekonomi:
- (3) Dalam bidang religi, sewaktu sistem-sistem kepercayaan sekuler mulai menggantikan agama-agama tradisionilistis.
- (4) Dalam lingkungan keluarga ketika unit-unit hubungan kekeluargaan yang meluas menghilan dan
- (5) Dalam lingkungan stratifikasi. Ketika mobilitas geografis dan sosial cenderung merenggangkan sistem hierarki yang sudah pasti dan turun temurun. Selain itu perubahan ini mulai pada waktu yang berbeda dan berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda pula di setiap negara. Jadi. dalam suatu negara yang sedang mengalami modernisasi terdapat keragaman dalam perubahan-perubahan kelembagaannya; dan betapa

baikpun direncanakannya suatu perubahan masyarakat, beberapa perubahan kelembagaan tertentu akan mendahului perubahan kelembagaan lainnya.

Kenyataannya di dunia ini terdapat hubungan-hubungan kerja yang sedang berubah. Dalam masyarakat pra-industri, secara tipikal produksi terdapat dalam unit-unit kekerabatan. Pertanian sederhana adalah yang paling utama; industri-industri lainnya, seperti kerajinan tangan, bersifat melengkapi pertanian tetapi masih terikat pada kekerabatan dan desa. Dalam beberapa masyarakat tertentu, kedudukan pekerjaan ditentukan oleh suatu kelompok. Yang luas, seperti kasta umpamanya Hubungan pertukaran barang juga digariskan oleh sistem-sistem kekerabatan yang tradisionil dan oleh kewajiban-kewajiban komuniti. Pendeknya, kegiatan ekonomi relatif tidak didiferensiasikan dari lingkungan kekeluargaan-komuniti tradisionil.

Dalam sektor pertanian, pengenalan dengan barang-barang yang bernilai uang berarti bahwa sebagai suatu contoh perubahan dasar dari sistem pertanian sederhana. Apabila manufaktur dan pabrik-pabrik muncul, maka seorang pekeja tidak saja dipisahkan dari pengendalian modalnya tetapi juga dari anggota-anggota keluargayang lain, karena ditempatkan bersama-sama dengan pekerja-pekerja lainnya yang diperoleh dalam pasaran tenaga kerja. Dengan demikian modernisasi memisahkan kegiatan-kegiatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan kekeluargaan dan komuniti.

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini, hubungan antara si pekerja dengan kehidupan ekonomi sangat berubah. Hal ini berarti bahwa si pekerja dalam pasaran yang sedang mengalami proses modernisasi berhadapan dengan beberapa persoalan-persoalan penyesuaian diri, yaitu:

- a. *Pertama*, seseorang menyadari bahwa ia dihadapkan pada suatu cara membuat perhitungan yang baru.
- b. *Kedua*, ia menyadari bahwa pengertian mengenai jaminan hidup ekonominya telah sangat berubah.
- c. *Ketiga*, dalam hal konsumsi, seorang pekerja dalam pasaran yang sedang menjadi modern dihadapkan pada patokan-patokan yang selalu berubah.
- d. *Keempat*, untuk menyesuaikan diri yang dipaksakan dalam sektor tradisionil. Banyak pekerja-pekerja kota-industri berkunjung atau berpindah kembali ke daerah perdesaan.

Apabila hal ini terjadi maka kemungkinannya adalah pengrusakan cara hidup tradisionil, terutama bila keadaan dipertanian tidak begitu baik, dan mempertajam pertentangan antara kota dan perdesaan serta antara pemuda yang meninggalkan desa dan orang tua yang tinggal.

Beberapa hubungan yang berubah dapat disebutkan, antara lain:

#### 1. Hubungan kekeluargaan yang berubah

Salah satu akibat dipisahkannya kegiatan-kegiatan ekonomi dari lingkungan keluarga-komuniti adalah bahwa suatu keluarga kehilangan beberapa fungsi dan memperoleh suatu peranan yang khusus, Karena keluarga tidak lagi merupakan suatu unit produksi, maka satu atau

lebih dari anggotanya meninggalkannya untuk mencapai pekerjaan dalam pasaran tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan keluarga makin lebih terpusat pada kesenangan-kesenangan emosional dan sosialisasi.

Implikasi sosial dari perubahan struktur yang dilukiskadengan cara sederhana itu sangatlah besar. Implikasi yang fundamental adalah terjadinya proses individual dan isolasi keluarga batih (*nuclear family*). Bila keluarga harus mondar-mandir dalam pasaran tenaga kerja maka tidaklah mungkin untuk membawa seluruh anggota keluarga, malah tidak mungkin untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang erat dan yang bercabang-cabang itu dengan para misan.

Suatu persoalan sosial yang timbul akibat perubahan dalam keluarga ini adalah tempat dari orang-orang yang telah tua sekali. Karena tidak lagi ditampung oleh unit kekerabatan yang melindungi mereka, maka orang-orang yang sangat tua ke dalam pengawasan komuniti atau negara sebagai "titipan" yang jumlahnya makin besar dari yang sudah-sudah. Karena tersisihkannya dari masyarakat maka timbullah lembaga baru seperti pensiun dan jaminan sosial.

Secara serentak hubungan antara orangtua dan anak-anak juga mengalami perubahan. Sang ayah, yang sekarang harus meninggalkan rumah-tangganya untuk bekerja di tempat yang lain, dengan sendirinya kehilangan banyak fungsinya untuk memberi latihan ekonomi yang sebelumnya diberikannya pada anak-anaknya. Sang ibu peranannya dalam sosialisasi menjadi lebih penting, karena ia memiliki hampir semua tanggung jawab untuk

membina kehidupan emosional yang pertama dari anak-anak.

Suatu percabangan dari hubungan orangtua -- anak yang berubah-ubah ini adalah "jurang masa remaja", yaitu (1) ketika para remaja terlepas dari hubungan yang erat dengan orang tua semasa usia muda, tetapi belum mendapat pekerjaan atau peranan-peranan dalam rumah tangga atau masyarakat dan (2) mengenai pembentukan keluarga-keluarga baru.

Pendeknya, modernisasi cenderung untuk menimbulkan perkembangan unit keluarga yang dibentuk oleh daya tarik emosional dan yang dibangun atas dasar-dasar seksual, emosional yang terbatas. Keluarga dengan demikian telah tersisihkan dari bidang-bidang Sosial lain yang penting, kecuali hubungan-hubungan keluar dari masing-masing anggotanya. Akhirnya, dalam lingkungan keluarga, fungsi yang serba beragam dan kompleks dari hubungan-hubungan antar anggota keluarga yang satu dengan anggota yang lainnya cenderung untuk menjadi hubungan-hubungan emosional saja.

## *2. Perubahan-perubahan dalam kehidupan komunitas dan perkumpulan-perkumpulan*

Dari contoh masyarakat tradisional yang disederhanakan, nampak bahwa kehidupan komunitas dan perkumpulan-perkumpulan sangat erat terjalin dengan dasar-dasar pembawaan kelompok-kelompok sosial, kekerabatan, klan, hubungan-hubungan suku dan kasta. Organisasi-organisasi formal seperti perserikatan perburuan, klub sosial, perkumpulan-perkumpulan sukarela dan kelompok kepentingan atau interest group

jarang sekali timbul. Sebagian besar dari kehidupan sosial dan persoalan-persoalannya disalurkan melalui kelompok-kelompok pembawaan yang berfungsi ragam itu sendiri.

Dasar-dasar tradisional bagi kehidupan komunitas dan perkumpulan ini banyak yang tetap bertahan, malah juga ketika kompleks kota-industri mulai timbul. Bila industrialisasi timbul di desa-desa; umpamanya, atau bila desa-desa dibangun di sekitar perusahaan industri keluarga, maka kebanyakan dari hubungan-hubungan komunitas dan keluarga dapat bertahan dalam keadaan industri itu.

## *3. Diskontinuitas dalam modernisasi dan timbulnya kerusuhan sosial.*

Pelbagai perubahan ekonomi dan sosial yang dilukiskan diatas dapat berbahaya bagi ketenteraman sosial karena beberapa sebab.

*Pertama*, perubahan sosial tidaklah merata dalam proses modernisasi. Dalam masyarakat-masyarakat kolonial, umpamanya, kekuasaan-kekuasaan Eropa sering menimbulkan perubahan besar dalam kerangka ekonomi dan politik dengan cara mengeksploitir kekayaan ekonomi dan membangun administrasi kolonial, tetapi bersamaan dengan itu menggalakkan atau memaksakan suatu konservatisme dalam agama-agama tradisional kelas-kelas tradisional dan sistem-sistem kekerabatan. Dalam suatu masyarakat yang mengalami modernisasi setelah masa kolonial, muncullah diskontinuitas-diskontinuitas yang serupa.

*Kedua*, perkembangan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang baru menimbulkan pertentangan-



pertentangan dalam cara hidup yang tradisional Contohnya; apabila pabrik-pabrik mulai menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang besar, yang bersaing dengan barang-barang yang sama jenisnya yang dihasilkan di daerah perdesaan, maka pasaran dibanjiri dengan barang-barang yang murahan, yang mematikan sumber penghasilan orang-orang desa tersebut. Secara teori hal ini seharusnya mendorong orang-orang desa tersebut untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan upahan yang sejenis. Tetapi kenyataannya, sangat sulit dan lambat untuk mengalihkan orang-orang desa tersebut ke dalam kerja upahan, dan sering memerlukan beberapa generasi untuk merampungkannya.

*Ketiga*, usaha-usaha pihak pemerintah negara-negara baru untuk membendung dan mengatasi kerusakan-kerusakan sosial itu sering malah menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih jauh. Sebagian besar dari usaha-usaha yang berhasil untuk mengintegrasikan dan mengembangkan masyarakat datangnya dari pemerintah pusat.

Pelajaran yang dapat ditarik dari paradoks-paradoks diatas adalah bahwa negara-negara yang sedang berkembang menghadapi suatu bahaya:

- a. apabila negara-negara tersebut menganggap suatu hal yang mungkin saja terjadi-perkembangan ekonomk sebagai semata-mata prkembangan yang secepat mungkin memusatkan perhatian secara tidak semestinya pada ukuran ini agaknya akan menimbulkan beban-beban sosial yang akhimya akan menghancurkan usaha pembangunan itu sendiri.

- b. Apabila kcepatanlah yang menjadi acuan, maka Pembangunan suatu negara dapat terlampaui cepat menghancurkan bentuk-bentuk integrasi tradisional dan melahirkan tingkat-tingkat kerusakan yang berbahaya dan dapat menimbulkan suatu pola perkembangan yang tidak seimbang dalam masyarakat, yang juga merupakan sumber kerusakan.

Persoalan utama bagi suatu pembangunan yang berhasil adalah dengan tidak mengutamakan satu ukuran saja tetapi dengan cara mengimbangi dan mengukur setiap pembangunan dengan bermacam-macam ukuran ekonomi dan sosial yang berbeda-beda.

Pembangunan dengan tidak memperhatikan masyarakat yang akan dikenai pembangunan justru akan menimbulkan keagetan dan ketidaksiapan masyarakat. Hal ini justru akan menimbulkan efek pembangunan yang bernilai negatif. Untuk itu penyusunan program pembangunan alangkah baiknya dimulai dari masyarakat. Meminjam istilah Gertz, mulailah pembangunan dari belakang, pembangunan yang dimulai dari masyarakat itu sendiri

## Bab VII

# Mobilitas Dan Proses Perubahan Masyarakat Desa

Semenjak revolusi industri bergulir di Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, fenomena migrasi manusia dimulai. Sejalan dengan perubahan pola dalam migrasi manusia ternyata hal ini membawa pengaruh dan perubahan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Secara keseluruhan fenomena migrasi membawa implikasi bagi perkembangan masyarakat secara luas.

### Mobilitas (Gerak) Penduduk

Istilah umum gerak penduduk dalam demografi adalah *population mobility*, *Territorial mobility*. Hal ini memberi makna bahwa gerak penduduk tersebut merupakan gerak yang bersifat sosial, melibatkan fisik dan melampaui geografis atau wilayah tertentu. Oleh karena itu gerak penduduk atau mobilitas mengandung arti sebagai pindah tempat (permanen atau tidak permanen) dengan menempuh jarak minimal tertentu atau pindah dari suatu unit geografis ke satu unit geografis lainnya.

Definisi ini secara tidak langsung melibatkan tempat tinggal orang yang melakukan mobilitas atau gerak

penduduk (migran). Artinya, orang yang melakukan gerak penduduk akan dapat diketahui dari berpindah atau tidaknya tempat tinggalnya. Kartomo Wirosohadjo (1981) memberi definisi migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian negara. Oleh karena itu dikenal beberapa tipe mobilitas atau gerak penduduk:

1. Permanen, yaitu apabila pindah tempat tinggal secara tetap atau menetap di tempat baru. Tipe ini sering disebut dengan istilah migrasi saja. Tipe permanen dibagi menjadi 2, yaitu:
  - 1) Internal, yaitu gerak penduduk yang terjadi dalam satu Negara, yang dibagi menjadi:
    - a. Urbanisasi, yaitu gerak penduduk dari desa ke kota.
    - b. Transmigrasi, yaitu gerak penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya, dimana daerah tujuan merupakan daerah baru yang sedang dibuka.
  - 2) Internasional, yaitu gerak penduduk yang terjadi antar Negara, atau antara Negara yang satu ke Negara lainnya. Dibagi menjadi:
    - a. Emigrasi, yaitu gerak penduduk dari Negara kita keluar ke Negara lain.
    - b. Imigrasi, yaitu gerak penduduk dari satu Negara masuk ke Negara kita.
2. Non Permanen, yaitu pindah tempat tinggal secara sementara atau tidak menetap di tempat baru
  - 1) Sirkulasi atau gerak berselang dalam jangka pendek, *repetitive* (berulang kali) dalam periode tertentu.

- 2) Komutasi atau gerak harian, yaitu gerak penduduk yang terjadi secara rutin setiap hari.

Dewasa ini salah satu bentuk gerak penduduk yang cenderung banyak terjadi adalah migrasi sirkulasi (pelakunya disebut migran sirkuler). Kartomo (1981), mengatakan bahwa apabila seseorang tidak bermaksud menetap di daerah yang didatangi dan telah tinggal di daerah itu kurang dari tiga bulan, maka orang tersebut dapat digolongkan dalam migran sirkuler. Sementara menurut Hadisupadmo (1991), mobilitas sirkuler adalah penduduk yang bekerja di luar wilayah desanya dan pulang kembali setelah minimal dua hari dan maksimal enam bulan baik secara teratur maupun tidak. Batas waktu minimal dua hari untuk membedakan dengan mobilitas ulang-alik dan batas waktu maksimal enam bulan untuk membedakan dengan migran menetap. Mantra (1988), menyatakan bahwa batasan tempat dan waktu tersebut lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Lebih lanjut Hadisupadmo (1991) mengatakan bahwa ciri utama migran sirkuler adalah masih tercatat sebagai penduduk daerah asal secara resmi, bukan sebagai penduduk daerah tujuan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Chapman (1977) bahwa yang menjadi fokus dalam studi sirkulasi penduduk diantaranya adalah tidak adanya perubahan tempat tinggal secara permanen, seperti yang dinyatakan sebagai:

*"The study of circulation focuses upon all those form of movement that involve no changes in permanent places of residence, and which*

*therefore are usually repetitive, cyclic and oscillatory"*

Mantra (1978) dalam penelitiannya tentang mobilitas yang mendalam di dua dukuh membedakan sirkulasi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) kunjungan (*visiting*), (2) sekolah (*school*), (3) buruh (*wage work*), (4) keterkaitan dengan sosial budaya (*sosial-cultural commitment*), (5) melaksanakan suatu tugas (*business*) dan (6) berdagang (*trading*). Dalam penelitian ini hanya ditekankan pada migran yang bekerja saja, baik sebagai buruh, berdagang maupun melaksanakan suatu tugas. Yang dimaksud dengan bekerja adalah melaksanakan suatu kegiatan atau membantu melaksanakan suatu kegiatan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa dalam waktu enam bulan terakhir. Menurut Mantra (1978), migran sirkuler dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai *beboro* atau *boro*.

Sementara itu Prawiraatmadja (Wariso, 1989), menjelaskan *boro* sebagai mencari untung, dimana *boro* mengandung unsur-unsur: (1) pergi ke daerah lain untuk sementara; (2) atas kemauan sendiri; (3) memiliki tujuan ke daerah tertentu atau berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain; (4) tujuan mencari nafkah; dan (5) penghasilan yang diperoleh di daerah lain dibawa pulang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Lebih lanjut Prawiraatmadja menjelaskan bahwa dengan menggunakan istilah *boro*, maka sebenarnya motif ekonomi yang berada di balik migrasi sirkuler, karena dengan melakukan migrasi sirkuler keluarga migran sirkuler memiliki sumber nafkah ganda, di desa dan di kota. Sumber nafkah ganda

disamping bermanfaat untuk menambah penghasilan juga mempertinggi ketahanan subsistensi keluarga.

Orang yang melakukan migrasi atau migran pada dasarnya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Revenstein dengan hukum-hukum migrasinya menyebutkan bahwa migrasi dipengaruhi oleh jarak, gender dengan motivasi ekonomi sebagai motivasi yang dominan. Berbeda dengan itu C Jansen dalam teori kesempatan antara (*Intervening opportunities Theory*) yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang pergi ke suatu jarak tertentu berbanding langsung dengan jumlah kesempatan pada jarak tersebut, dan berbanding terbalik dengan jumlah kesempatan antara.

Berbeda dengan keduanya, Everett Lee (1966) mengemukakan teori dorong-tarik (*Push-Pull Theory*), dimana seorang yang melakukan migrasi dipengaruhi oleh faktor daerah asal, daerah tujuan, pribadi dan rintangan-rintangan antara. Lebih lanjut Lee mengatakan bahwa tiap-tiap daerah memiliki:

- a. Faktor minus (kekuatan sentrifugal): mengikat orang dalam suatu daerah atau memikat orang terhadap daerah tersebut
- b. Faktor plus (kekuatan sentripetal): faktor yang cenderung menolak mereka
- c. Faktor indifferen, netral, tak punya pengaruh menolak atau menerima.

Sebagai daerah asal migran desa memiliki faktor pendorong yang menyebabkan seseorang tertarik untuk keluar desanya yang berupa terbatasnya fasilitas, terbatas pekerjaan hanya sektor A (*Agriculture*, pertanian) dan upah yang rendah. Namun daerah asal memiliki faktor penahan yang membuat orang mau bertahan untuk tetap tinggal di

desa, yaitu; adanya sifat kekeluargaan, sifat gotong royong, guyub atau penuh kerukunan, biaya hidup murah, dan dapat bercocok tanam.

Sementara kota sebagai daerah tujuan memiliki faktor penarik yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pergi ke kota, yaitu tersedia pekerjaan disektor S & M (*Service & Manufacture*, jasa dan pabrikasi), Sarpras transportasi tersedia, Keberadaan kawan atau saudara. Namun kota juga memiliki faktor penolak yang menyebabkan orang enggan untuk tinggal di kota, yaitu: kriminalitas yang tinggi dan biaya hidup tinggi.

### **Migrasi, pembangunan dan perubahan**

Migrasi sebagai suatu kenyataan sosial tidak dapat dipungkiri telah menyumbang dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi, baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Bahkan Goldscheider (1985) mengatakan bahwa migrasi berhubungan dengan proses sosial, baik sebagai sebab maupun akibat. Lebih jauh Goldscheider menggambarkan adanya variasi tipe-tipe migrasi yang kompleks dalam struktur sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat tidak hanya mengubah pola-pola migrasi, tetapi perubahan migrasi secara perlahan-lahan bisa mengubah struktur sosial masyarakat di suatu komunitas atau kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Hal senada juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Simmons, Mantra dan Hadisupadmo. Simmons (1984), berpendapat bahwa migrasi merupakan bagian yang integral dari perubahan sosial ekonomi suatu daerah. Lebih lanjut Siimons mengatakan bahwa terdapat

hubungan yang saling mempengaruhi antara migrasi dengan perubahan sosial ekonomi yang tampak secara nyata pada migran yang telah berhasil dalam kehidupannya.

Mantra (1988), berpendapat bahwa migrasi berpengaruh positif terhadap daerah asal karena membawa uang, barang-barang dan gagasan untuk pembangunan. Para migran dapat memperoleh ide-ide, pengetahuan, dan pengalaman baru di kota yang sangat berguna untuk memajukan masyarakat desa asal dan mendorong bagi perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi antara lain adalah perubahan gaya hidup yang meliputi gaya bangunan rumah, pemilikan barang-barang simbol status, gaya pakaian dan perubahan gaya bahasa yang digunakan.

Senada dengan itu Hadisupadmo (1991), berpendapat bahwa migrasi berpengaruh positif terhadap pembangunan desa terutama dalam pengelolaan lahan pertanian dan perbaikan lingkungan desa serta secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga migran sirkuler.

Ketiganya berpendapat bahwa pengaruh migran terhadap pembangunan dan perubahan desa karena para migran membawa sesuatu dari daerah tujuan yang disebut dengan remitan. Pada awalnya pengertian remitan adalah pengiriman uang atau barang (Caldwell, 1969). Dalam penelitian di Ghana itu Caldwell menyatakan bahwa arus balik yang berupa uang dan barang merupakan aspek yang paling penting dengan adanya arus migrasi keluar dilihat dari segi ekonomi. Caldwell (1969), menyatakan:

*"..... flows of wealth are undoubtedly important, not only to the villagers but also to the migrants".*

Selain itu Caldwell menyatakan bahwa 56 persen migran mengirim uang ke desa secara teratur, 27 persen mengirim kalau ada persediaan dan 17 persen mengirim kalau diminta. Kalau dilihat dari kondisi daerah asal, maka terdapat perbedaan keteraturan remitan antara desa yang miskin dengan desa yang relatif lebih baik kondisi lahannya. Desa miskin lebih menggantungkan kehidupan ekonominya pada remitan daripada desa yang kondisi lahannya lebih baik. Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Hull (197) di Jawa yang menyatakan bahwa makin miskin suatu keluarga makin bergantung kepada bantuan ekonomi dari anak. Sementara Hugo (1975), dari hasil penelitian di Jawa Barat, menyimpulkan bahwa remitan merupakan faktor yang amat penting untuk membina hubungan dengan daerah asal. Keluarga batih merupakan satu kesatuan sosial ekonomi, maka bagi migran bujukan remitan diberikan kepada orang tuanya, sedangkan bagi yang telah kawin diberikan kepada istrinya.

Connell *et al.* (1976), berpendapat bahwa remitan adalah pengiriman uang atau barang antara migran dan anggota keluarga di desa. Berdasarkan ini maka Connell *et al.* membedakan remitan menjadi dua macam, yaitu *inremittance* dan *outremittance*. *Inremittance* adalah pengiriman atau pemberian uang atau barang-barang dari migran ke daerah asal, sedangkan *outremittance* adalah sebaliknya, yaitu pengiriman atau pemberian barang-barang dari daerah asal kepada migran.

Demikian juga pengertian remitan dalam United States Department of Commerce (1977) yaitu *"the flow of funds back into the village"* atau aliran uang ke desa. Tetapi oleh Curson (1981) pengertian remitan tidak hanya terbatas pada pengiriman uang ke desa dalam segala bentuknya, tetapi juga pengiriman barang-barang, yang dinyatakan sebagai:

*"..... involve a bewildering array of transfer, debt repayment, gifts, donations, transfers of goods, and services to the distribution of profits and commercial payment".*

Selain remitan berupa uang dan barang Mantra (1988), menyebutkan bahwa remitan dapat juga berupa gagasan atau ide-ide, pengetahuan, dan pengalaman baru yang diperoleh selama bekerja di kota.

Namun demikian proses migrasi juga memberikan dampak tersembunyi bagi pelaku migrasi, yaitu gegar budaya (*cultural lag*). Gegar budaya merupakan suatu kondisi dimana kebudayaan materiil lebih cepat daripada kebudayaan immateriilnya atau adanya kesenjangan budaya antara suatu masyarakat terhadap budaya masyarakat lainnya.

Untuk mengetahui pengaruh gerak penduduk baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan dapat dilakukan dengan melakukan analisa gerak penduduk. Analisa gerak penduduk dapat dilakukan dalam 3 tingkat, yaitu

1. Tingkat Makro; menurut RJ Pryor yaitu sebab-sebab gerak penduduk disimpulkan dengan melihat ciri-ciri

yang diperkirakan obyektif dari daerah asal dan tujuan, disamping mungkin ciri-ciri struktural dari arus gerak penduduk itu. Minat utama analisis ini adalah untuk mengetahui volume arah-arrah dan migrasi netto di berbagai daerah atau antar daerah

2. Tingkat Mikro; menurut Germani dibagi menjadi :

- a. Tingkat obyektif; yaitu menganalisa semua faktor "pendorong-penarik" dan berbagai kondisi komunikasi, aksesibiliti dan kontrak antara daerah asal dan tujuan. Kondisi obyektif tidak bekerja pada suasana vakum, melainkan bekerja dalam suatu konteks norma dan psiko sosial.
- b. Tingkat Normatif; yaitu menganalisa dalam norma, kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai masyarakat asal tak hanya ditemukan kriteria apa yang harus dipandang sebagai kondisi baik dan buruk tetapi juga pola sikap dan perilaku yang mengatur migrasi.
- c. Tingkat Psiko Sosial; yaitu analisa terhadap sikap dan harapan-harapan dari tiap individu secara kongkrit.

### **Prinsip Resiprositas pada Masyarakat Agraris yang Sedang Berubah**

Pada masyarakat *sedentary* (masyarakat yang terikat pada tanah) kekuatan hukum adat dalam kehidupannya terasa lebih kuat daripada hukum negara dan agama. Hal ini terjadi karena ikatan antara masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan dengan masyarakat dalam lingkungannya begitu erat. Kekuatan hukum adat semakin terlihat apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka masyarakat akan lebih cenderung menggunakan

hukum adat sebagai pemecahannya daripada hukum negara ataupun hukum agama.

Keeratan hubungan antara masyarakat dengan hukum adatnya dapat dipahami, karena masyarakat itu sendirilah yang '*menciptakan*' hukum adat dan masyarakat pulalah yang dikenai hukum adat tersebut. Sementara dengan hukum negara dan agama masyarakat merasa bahwa kedua hukum itu bukan '*ciptaannya*', oleh karena itu tidak merasa bahwa hukum itu dapat dikenakan pada mereka. Sehingga hukum adat lebih efektif dalam masyarakat bila dibandingkan dengan hukum negara dan agama.

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan mulai dapat dirasakan hasilnya. Dalam masyarakat mulai timbul perubahan-perubahan, baik mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan pada bidang tertentu akan mempengaruhi perubahan pada bidang lainnya.

Perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lain dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin sebaliknya yang terjadi. Dengan demikian hukum adat dalam suatu masyarakat akan mengalami singgungan oleh perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Meskipun demikian, hukum adat lebih dapat bertahan dari perubahan sosial, selama perubahan sosial tersebut lebih pada perubahan yang

disebabkan oleh kebudayaan materiil (misalnya; teknologi) dan bukannya kebudayaan immateriil (misalnya; sistem nilai).

Perilaku orang dalam suatu cara disebabkan apa yang tetangga, teman, anggota kelompok lakukan. Perilaku dapat disebabkan karena ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan dan dengan penguasa. Malinowski berpendapat bahwa intisari hukum terjalin dalam prinsip resiprositas, tetapi tidak berarti bahwa semua yang merupakan hukum dapat digolongkan pada asas resiprositas.

Asas resiprositas muncul dalam masyarakat sebagai akibat adanya persamaan nasib karena hidup dalam lingkungan yang sama, lingkungan yang memberi batasan dalam gerak penduduknya. Batasan-batasan gerak tersebut disebabkan karena jarak antar mereka yang jauh dan ketiadaan sarana dan prasarana transportasi, selain keterikatan masyarakat dengan tanah kelahiran atau sedentary dan terhadap kekerabatan menjadi sangat kuat<sup>5</sup>.

Menurut Scott<sup>6</sup>, prinsip resiprositas berdasarkan gagasan yang sederhana saja, yakni bahwa orang harus

---

<sup>5</sup> Hal ini disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai Konsep Nusantara Dalam Falsafah Jawa Kaitannya dengan Transmigrasi dalam Seminar Nasional Membangkitkan Budaya Kepeloporan dlm Mobilitas Penduduk di Jakarta 19-20 April 1994.

<sup>6</sup> James C Scott. 1976. *The Moral Economy of The Peasant*. Diterjemahkan oleh Hasan Basri dengan Judul *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Mengutip pendapat Gouldner dalam *The Norm of reciprocity*. P. 171. Sebenarnya terjemahan dari judul diatas kurang tepat, mengingat ekonomi yang disajikan dalam tulisan ini adalah moralnya petani, sehingga mungkin yang tepat adalah ekonomi petani yang bermoral.

membantu mereka yang pernah membantunya atau setidak-tidaknya jangan merugikannya. Lebih khusus lagi, prinsip ini mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari. Malinowski dan Mauss, menemukan bahwa prinsip resiprositas berfungsi sebagai landasan bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakat-masyarakat tradisional<sup>7</sup>.

Dalam masyarakat asas resiprositas terlihat dari beberapa kegiatan yang sudah mendarah daging dilakukan dan senantiasa mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat, yaitu antara lain; gotong royong membangun rumah (*sambatan*), kerja bakti (*gugur gunung*)<sup>8</sup>, bantuan tenaga maupun materi bagi orang lain yang sedang memiliki hajat seperti; pernikahan, sunatan, dan hajatan lainnya (*nyumbang*) dan secara ritual dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Malinowski .*Crime and Custom in savage Society*. 1962 dan Marcel Mauss. *The Gift: Form and Function of Exchange in Archaic*. 1954. Mauss dalam hal ini berpendapat bahwa sebagian besar dari analisisnya mengenai "prestation" serta kaitan-kaitan sosial yang diciptakannya juga diterapkan kepada masyarakat-masyarakat non tradisional.

<sup>8</sup> Gugur gunung dalam masyarakat di Gunung Kidul berbeda dengan kerja bakti yang dilakukan bersama-sama untuk membersihkan jalan, membuat selokan dan sebagainya. Tetapi merupakan 'pemotongan gunung' disekitar rumah penduduk. Pemotongan ini dilakukan karena keadaan geografis Gunung Kidul yang berbukit-bukit, sehingga hampir semua rumah penduduk tanahnya diperoleh dari memotong bukit kecil di sekitar rumah. Kegiatan ini mengandung asas resiprositas karena suatu saat setiap orang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan 'pemotongan gunung'

*selamatan*<sup>9</sup>. Prinsip yang sama seringkali mengatur pertukaran sumber-sumber pangan dalam lingkungan desa. Satu keluarga yang sedang dalam kesulitan akan mengharapkan bantuan dari orang-orang lain yang keadaannya lebih baik, dan mengharapkan akan dapat membalas apabila situasinya terbalik.

Dalam masyarakat tradisional jelaslah bahwa resiprositas terkait dengan siklus pertanian dan seremonial. Hal ini pada umumnya berlaku di dalam lingkungan pemukiman desa dimana tekanan-tekanan sosial dalam komunitas memperkuat perasaan-perasaan hutang budi. Suatu hal yang penting disini adalah bahwa pertukaran itu menyangkut nilai-nilai yang dapat diperbandingkan.

Sebagai perbandingan dalam melihat asas resiprositas dalam kontrol sosial di perdesaan akan dipaparkan dari tiga daerah yang secara empirik telah dilakukan penelitian yaitu Desa Mulusan, Sodo<sup>10</sup> dan Desa Nglegi<sup>11</sup>, dalam *sambatan*, *gugur gunung*, *nyumbang*, dan *selamatan*.

---

<sup>9</sup> Selamatan merupakan suatu acara makan bersama yang dihadiri oleh tetangga, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan rumah tangga petani seperti membangun rumah, kematian salah satu anggota keluarga, kelahiran anak, panen yang berhasil dan sebagainya.

<sup>10</sup> Kedua desa diteliti oleh I.B. Mantra tahun 1988 dan Sunarto Hadisupadmo tahun 1991. Meskipun kedua peneliti lebih menekankan telaah dari sisi kependudukan, terutama mengenai Migran, tetapi dalam karya tulis keduanya ditemukan kajian-kajian yang bersifat ilmu sosial.

<sup>11</sup> Desa Nglegi pernah diteliti penulis tahun 1991 dan 1999.



### ***Sambatan***

Pada ketiga desa seorang warga akan menyempatkan diri untuk datang, meskipun bekerja dan mondok di luar daerah, terutama apabila dapat dengan mudah dijangkau dari desanya, misalnya Yogya yang hanya berjarak lebih kurang 25 kilometer. Seandainya tidak bisa, warga desa Mulusan dan Sodo akan pamit pada kesempatan sebelum dimulai sambatan dengan membawa bantuan uang sekedar untuk '*membeli paku*'. Tidak berbeda jauh dengan di Desa Nglegi, hanya seseorang di rantau yang dekat (Yogyakarta) akan menyempatkan diri untuk pulang, meskipun harus libur sementara untuk tidak mencari nafkah (biasanya berdagang atau menjadi buruh). Meskipun tidak ada '*uang*' untuk mengganti ketidak hadirannya, masyarakat di Desa Nglegi percaya bahwa yang di rantau akan datang. Hal ini dilakukan karena apabila ia tidak dapat ikut sambatan tanpa ada keterangan, maka bekel pada kesempatan lain akan menanyakan pada yang bersangkutan. Keterangan bekel inilah seolah-olah yang melegitimasi sanksi dari masyarakat, meskipun sebelumnya masyarakat sudah memberikan sanksi '*dibicarakan*'. Sanksi berikutnya akan dihentikan atau lebih berat (sanksi paling berat adalah tidak di'*sambati*' atau tidak akan datang para tetangga apabila yang bersangkutan mengadakan sambatan di masa yang akan datang tergantung dari '*legitimasi*' bekel.

### ***Gugur gunung***

Gugur gunung bagi masyarakat di Gunung Kidul menjadi pekerjaan rutin yang dimiliki oleh seseorang yang

akan membangun rumah pada tempat yang baru. Dapat dikatakan bahwa tidak seorangpun di Gunung Kidul yang membangun rumah tanpa melakukan Gugur gunung. Seperti *sambatan*, seorang warga desa akan menyempatkan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam gugur gunung warga lain, meskipun bekerja dan mondok di luar daerah, terutama apabila dapat dengan mudah dijangkau dari desanya, misalnya Yogya, meskipun harus libur sementara untuk tidak mencari nafkah (berdagang atau menjadi buruh) Seandainya tidak bisa, warga desa Mulusan dan Sodo akan pamit pada kesempatan sebelum dimulai sambatan dengan memberikan harapan, mudah-mudahan dapat pulang dan ikut gugur gunung meskipun hanya '*matun*' atau menyabut rumput. Tidak berbeda dengan di Desa Nglegi, seseorang di rantau yang dekat (Yogyakarta) akan menyempatkan diri untuk pulang, meskipun harus libur sementara untuk tidak mencari nafkah (biasanya berdagang atau menjadi buruh atau bekerja yang tidak terikat waktu atau bekerja yang dapat mengatur dirinya untuk kapan bekerja dan kapan libur). Sesuatu yang istimewa dalam gugur gunung ini adalah tidak dikenalnya bantuan yang berupa uang, semuanya dalam bentuk tenaga. Hal ini dilakukan karena apabila ia tidak dapat ikut gugur gunung tanpa ada keterangan, maka bekel pada kesempatan lain akan menanyakan pada yang bersangkutan. Keterangan bekel inilah seolah-olah yang melegitimasi sanksi dari masyarakat, meskipun sebelumnya masyarakat sudah memberikan sanksi '*dibicarakan*' atau dipergunjingkan dalam masyarakat. Sanksi berikutnya akan dihentikan atau lebih berat di masa yang akan datang tergantung dari '*legitimasi*' bekel,

masyarakat dengan sendirinya akan menjatuhkan sanksi yang sama.

### *Nyumbang*

Tradisi *nyumbang* bagi masyarakat di Gunung Kidul, terutama pada ketiga desa diatas, merupakan salah satu cermin kuatnya ikatan solidaritas warga. Sumbangan dari orang lain sangat dibutuhkan, mengingat kondisi geografis Gunung Kidul yang berbukit-bukit dan kering, sehingga merupakan daerah minus, baik minus air maupun minus sumber pangan. Sehingga untuk melakukan suatu hajat, pernikahan, sunatan ataupun yang lainnya, dibutuhkan suatu usaha yang memerlukan waktu lama.

Berdasarkan kondisi seperti diatas maka dapat dimengerti kalau bentuk sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pangan dan air. Bahan-bahan pangan yang dijadikan sumbanganpun berbeda-beda tergantung jenis hajat. Sumbangan untuk pernikahan berbeda dengan untuk sunatan atau khitanan, meskipun perbedaannya tidak begitu besar. Bahan pangan 'wajib' yang dijadikan sumbangan adalah beras, gula pasir, gula merah, kelapa, mie, beras ketan dan jadah<sup>12</sup>, pisang, daun pisang atau daun jati, bumbu dapur dan tempe atau tahu. Jumlah sumbangan yang diberikan menunjukkan kedekatan secara kerabat dari pemilik hajat dan status sosialnya.

---

<sup>12</sup> Jadah merupakan makanan yang harus ada dalam sumbangan, terbuat dari ketan yang dimasak dengan cara khusus, dan setelah masak kemudian dilekatkan dengan cara ditumbuk baru kemudian didiamkan selama sehari semalam.

Sumbangan yang diberikan dicatat oleh orang yang ditunjuk *bekel* dan tuan rumah. Hal ini dilakukan untuk pada hari itu juga akan dikembalikan dalam bentuk *ulih-ulih* dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi lengkap kepada penyumbang.

Sementara di kesempatan lain apabila penyumbang memiliki hajat maka orang yang memiliki hajat akan menyumbang dengan barang dan jumlah yang sama. Orang yang ditunjuk oleh *bekel* ini merupakan orang kepercayaan *bekel* untuk mengontrol terjadinya arus sumbangan dan menjadi acuan bagi *bekel* untuk bertindak apabila dikemudian hari terjadi gunjingan-gunjingan oleh masyarakat sehubungan dengan sumbangan.

Kondisi ini sangat dijaga oleh masyarakat di Desa Nglegi, karena mereka beranggapan bahwa dengan memberikan bantuan dalam bentuk bahan pangan lebih berharga, sehingga tuan rumah yang punya hajat tidak kebingungan untuk berbelanja ke pasar, mengingat pasar desa tidak mencukupi untuk pengadaan bahan pangan dalam jumlah cukup besar. Selain itu jumlah sumbangan yang diberikan juga berarti bahwa pemberi '*sedang memproklamirkan-diri*' status sosialnya.

Keadaan ini secara fisik berbeda dengan di Desa Mulusan dan Sodo, dimana di kedua desa tersebut sumbangan yang diberikan tidak dalam bentuk barang tetapi sudah berganti dalam bentuk uang. Besarnya sumbangan bervariasi, tergantung bentuk hajatan dan kedekatan secara kerabat dari pemilik hajat dan status sosialnya. Besarnya sumbangan berkisar antara Rp 2.500,- sampai Rp 10.000,-. Meskipun demikian sumbangan dalam bentuk uang ini juga dicatat oleh orang

yang diberi kuasa oleh *bekel* dan pemilik hajat. Hanya saja hal ini tidak mempengaruhi bentuk *ulih-ulih* yang diberikan kepada penyumbang dari si empunya hajat, tetapi untuk masa yang akan datang akan berpengaruh apabila si penyumbang memiliki hajat yang sama.

*Bekel atau penewu* dalam menegakkan hukum adat bersumber pada orang kepercayaan yang bertugas mencatat arus sumbangan. Apabila terjadi pelanggaran proses yang terjadi tidak seperti pada sambutan dan gugur gunung, tetapi lebih singkat. *Bekel atau penewu* tidak akan menanyakan kepada pelanggar kenapa ia melanggar, tetapi langsung menjatuhkan sanksi atau catatan untuk masa yang akan datang, sementara itu hukuman dari masyarakat yang berupa 'dibicarakan' atau menjadi 'pembicaraan banyak orang' sudah berlaku. Kuatnya sanksi ini membuat setiap warga berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibannya dalam menyumbang, meskipun harus berhutang kepada sanak saudaranya.

### ***Selamatan***

Hukum adat yang berlaku dalam selamatan memiliki sanksi yang eling berat dibandingkan dengan lainnya, terutama selamatan yang berkenaan dengan selamatan desa. Sementara selamatan yang berkenaan dengan kelahiran bayi, kematian dan mendirikan rumah tidak berbeda dengan lainnya. Baik dalam bentuk sumbangannya maupun sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Hal ini berlaku di semua desa di Gunung Kidul, tidak terkecuali di Desa Mulusan, Sodo dan Nglegi.

Selamatan desa berkenaan dengan upacara bersih desa, sebagai awal tanam padi gogo, dan selamatan panen.

Pada saat selamatan ini seluruh anggota masyarakat terlibat didalamnya, termasuk warga desa yang bekerja dan mondok di luar desa. Mereka akan menyempatkan diri untuk pulang, meskipun harus cuti dari pekerjaannya atau libur sementara dari berdagang dan menjadi buruh. Berbeda dengan sumbangan diatas, jumlah bahan pangan yang diberikan dalam selamatan ini jauh lebih sedikit, yaitu hanya berupa nasi, urapan dan lauk satu piring dan setiap keluarga hanya satu piring.

Penyetoran kepada pihak dukuh atau desa dicatat kelengkapannya oleh orang yang dipercaya *bekel atau penewu* untuk mengontrol. Orang ini biasanya juga yang mencatat dalam kegiatan menyumbang. Sanksi yang diberikan apabila dilanggar berlaku saat selamatan itu juga. Mulai dari dibicarakan dengan sindiran, dipermalukan sampai pengucilan dari semua kegiatan yang berhubungan dengan desa atau dusun. Hal ini secara psikologis berarti juga pengucilan dari masyarakat secara umum, karena orang yang tidak terlibat dalam selamatan ini dianggap tidak memiliki tetangga. Kuatnya sanksi ini membuat setiap warga berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibannya dalam selamatan, meskipun harus berhutang kepada sanak saudaranya.

Migrasi yang dilakukan oleh manusia ke segala penjuru dunia, ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa, baik dampak positif maupun negatif. Seiring dengan hal itu usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah mengerem dampak negatif yang ditimbulkan di daerah asal maupun daerah tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Sapari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Bayunus, Ilyas dan Farid Ahmad. 1988. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*. Mizan. Bandung
- Belling & Kotten. 1985. *Modernisasi*. CV Rajawali & YIIS. Jakarta
- Bendix, R dan Lipset, SM. 1968. *Max Weber, "Class, Status and Party", Class, Status and Power*. Routledge & Kegan Paul Ltd. London.
- Beteille, Andre. 1979. *Studies in Agrarian Social Structure*. Cetakan ketiga. Oxford University Press. New Delhi.
- Bertrand, Alvin. 1980. *Sosiologi, Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori-teori tentang Sosiologi, Kepribadian dan Kebudayaan*. PT Bina Ilmu. Jakarta.
- Blau, Peter dan Marshall W Meyer. 1987. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahkan oleh Gary R Yusuf. UI Press. Jakarta
- Bouma, PJ. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Djambatan. Jakarta
- Castles, L, et.al. 1986. *Birokrasi: Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Kumpulan Esai). Hapsara. Surakarta.
- Chambers, Robert. 1996. *PRA, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius. Yogyakarta.
- Curson, P. 1981. *Remittance and Migration: The Commerce of Movement*. Journal of Population Geography. Vol. 3, Number 1 and 2. June-December 1981.
- Dube, S.C. 1988. *Modernization and Development: the Search for Alternative Paradigms*. London: Zed Book Ltd.
- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-organisasi Modern*. Diterjemahkan oleh Suryatim. UI-Press. Jakarta.
- Friedman M, Lawrence. 1977. *Law and Society, an Introduction*. Printice Hall. New Jersey.
- Geertz. C. 1963. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*. Terjemahan oleh Al Ghazali Usman dan Andre Bayo Ala. CV Rajawali.
- Goode, J.W. 1995. *The Family*. Terjemahan oleh Lailahanoum. Sosiologi Keluarga. Bumi Aksara Jakarta.
- Griffin, K. 1976. *Land Concentration and Rural Poverty*. New York: Holmes & Meier Publisher Inc.
- Hadisupadmo, Sunarto. 1991. *Pengaruh Remiten migran sirkuler Terhadap Kesejahteraan Keluarga Migran dan Desa Asal: Suatu Kajian di Desa Mulusan dan*

- Sodo. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Horton, Paul & Chester L Hunt. 1999. *Sosiologi jilid I & 2*. Ed 6. Erlangga. Jakarta.
- Hoult, T. F., ed. 1969. *Dictionary of Modern Sociology*. Totowa, New Jersey, United
- Inayatullah. 1980. *Development of Monitoring and Evaluation System for Rural Development in Asia, Some Asian Experiences*. Asian and Pacific Development Administration Centre Kuala Lumpur. Malaysia. P. 53-75.
- Johnson, Paul oyle. 1982. *Teori Sosiologi klasik dan Modern*. Diindonesiakan oleh Robert MZ Lawang. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. FE-UI Pres. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. Cambridge, MA: Peabody Museum
- Laeyendecker. 1983. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Gramedia. Jakarta.
- Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Lippitt, Ronald, Jeanne Watson dan Bruce Westley. 1958. *Planned Change*. Harcourt, Brace & World Inc.
- Mantra, I.B. 1988. *Population Mobility and The Link Between Migrants and the Family Back Homes in Ngawis Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region*. The Indonesian Journal of Geography. Vol. 18. No. 55 June.
- Peters A.A.G dan Koesrini Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Raharjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. UGM Press. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni Bandung.
- Rambo, Terry, 1981, *Coceptual Approaches To Human Ecology: A Sourcebook On Alternative Paradigms For The Study Of Human Interaction With The Environment*, East-West Environment and Policy Institut, Honolulu, Hawaii.
- Raz. Joseph 1980. *Concept of Legal System*. Clarendo Press. Oxford.
- Rusli, Said. 1982. *Gerak (Mobilitas) Penduduk Pedesaan di Jawa Tengah*. IPB. Bogor.
- Sairin, Sjafri, Pujo Semedi dan Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Sajogjo dan Sajogjo Pujiwati. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. UGM Press. Yogyakarta.
- Sajogjo, Pujiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Pascasarjana IKIP Jakarta dan BKKBN. Jakarta.
- Scott C James. 1976. *The Moral Economy of The Peasant*. Terjemahan Hasan Basri: *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta
- Sitorus, Felix dkk. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Dokis. IPB. Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. CV Rajawali. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Tjandrasari, Heri. 1983. *Beberapa aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni Bandung.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Bureaucracy in Changing Culture*. Indonesian Law and Administrative Review, Vol (1): 26-59.
- Sorokin, Pitirin. 1959. *Social and Cultural Mobility*. The Free Press Glencoe Collier-Mac Millan Limited. London.
- Simmons, A.B. 1984. *Migration and Rural Development, Coceptual Approachs, Research Finding and Policy Issues, Population, Distribution, Migration, and Development*. United Nation. New York.
- Smelser, N.J. 1966. *The Modernization of Social Relations*. Cambridge Mass. Voice of American Forum Lecture)
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. FE UI Press. Jakarta.
- Surjomihardjo, A. 2000. *Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial*. Yayasan Untuk Indonesia. Jakarta.
- Susanto, Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Sosiologi Pembangunan*. Bina Cipta. Jakarta.
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Syed Hasan, Syarifah Saleha. 1993. *Perubahan dan Kesinambunagn Tradisi Undang-undang Pribumi di Sabah*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Tjondronegoro, S.M.P. 1978. *Modernisasi Pedesaan: Pilihan Strategi dasar Menuju Fase Lepas Landas?*. Prisma 3 April 1978.

---

\_\_\_\_\_. 1984. *Social Organization and Planned development in Rural Java*. Singapore Oxford University Press Oxford, new York.

T.O. Ihromi. 1984. *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.